

345.009598435

ABD

P

@.1



**PERANAN LEMBAGA ADAT TRADISIONAL
MASYARAKAT REJANG (KUTEI) DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

M. ABDI, SH

Pembimbing :

Prof. DR. I.S. Susanto, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000**

**PERANAN LEMBAGA ADAT TRADISIONAL
MASYARAKAT REJANG (KUTEI) DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

Disusun Oleh :

M. A B D I, SH
NIM. B.4.A.097034

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 21 Pebruari 2000

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. DR. I.S. Susanto, SH
NIP. 130.324.239

Mengetahui,

Ketua Program magister ilmu Hukum



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130.350.519

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya-lah tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini berjudul : "Peranan Lembaga Adat Tradisional Masyarakat Rejang (Kutei) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana", ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih mempunyai kekurangan-kekurangan dikarenakan keterbatasan yang ada pada penulis. Meskipun demikian penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar Tesis ini tersusun dengan baik.

Di samping itu, dalam penulisan Tesis ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Penguji.
2. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, SH., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian Tesis ini.

3. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH., dan Prof. IGN. Sugangga, SH., yang bertindak sebagai anggota Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan guna penyempurnaan Tesis ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Seluruh karyawan dan karyawan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang banyak membantu kelancaran urusan administrasi dan akademik.
6. Bapak Kaditsospol Tingkat I Jawa Tengah, Kaditsospol Tingkat I Bengkulu dan Kakansospol Tingkat II Rejang Lebong yang telah memberikan izin penelitian pada penulis.
7. Bapak Firdaus Latif, SH., selaku Camat Kecamatan Curup yang telah membantu kelancaran proses penelitian pada Kelurahan dan Desa di wilayah Kecamatan Curup.
8. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Tak lupa ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa sepenuh hati. Khususnya kepada Ibunda Hajipah, Ayahanda M. Solihin dan Ibu Mertua Maslikah, penulis sampaikan terima kasih dan Ta'zim yang mendalam atas doa dan cinta kasih beliau yang telah memberikan kesejukan, nasehat dalam kehidupan berkeluarga, karier dan jenjang pendidikan yang sedang penulis jalani. Demikian pula terima

kasih yang teramat manis untuk Istriku Surya Sukesih dan anak-anakku yang tercinta Wahyu, Tedi dan Aldi yang telah setia mendampingi penulis baik dalam keadaan suka dan duka.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada dan tidak lupa pula kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Februari 2000

Penulis

RINGKASAN

Penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana dilakukan oleh sub-sub peradilan pidana sebagai lembaga resmi pemerintah yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Realitas dalam masyarakat memberikan petunjuk sebagai pemahaman bahwa disamping lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara pidana, keperantaraan lembaga sosial tradisional seperti lembaga *Kutei* pada masyarakat Rejang di Bengkulu masih tetap eksis sebagai lembaga penyelesaian konflik yang terjadi diantara warga masyarakat. Penggunaan lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana bagi masyarakat Rejang merupakan jalan penyelesaian konflik dan guna menghindari penyelesaian melalui lembaga formal pemerintah. Penggunaan lembaga *Kutei* ini tentunya tidak lepas dari adanya persepsi masyarakat Rejang terhadap peranan dan fungsi lembaga tersebut. Bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) penyelesaian tindak pidana melalui lembaga ada *Kutei* ini diakui keberadaannya dan oleh karena itu aparat penegak hukum juga mempunyai persepsi tersendiri terhadap keberadaan lembaga tersebut.

Dengan berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dan gambaran permasalahan yang diajukan yaitu : (1) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana; (2) Bagaimanakah persepsi aparat penegak hukum terhadap lembaga ada tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui dan menemukan makna yang lebih mendalam dan terinci mengenai akar permasalahan penelitian yang nampak dalam fenomena masyarakat Rejang yang menggunakan lembaga adat tradisional *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana. Pendekatan yuridis sosiologi dimaksudkan sebagai upaya kritis untuk mendekati permasalahan yang tidak hanya dengan kajian norma hukum, tetapi juga dari sisi perilaku masyarakat dalam penegakan fungsi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Bahwa persepsi masyarakat Rejang terhadap peran dan fungsi lembaga adat tradisional *Kutei* sebagai lembaga informal yang dapat menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan, kepatuhan dan penghormatan warga masyarakat Rejang terhadap keputusan lembaga *Kutei*. Keputusan lembaga *Kutei* mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati bagi masyarakat Rejang.
- (2) Terdapat perbedaan persepsi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam memandang keberadaan lembaga adat tradisional *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana. Bagi polisi penyelesaian melalui lembaga *Kutei* dianggap telah selesai, oleh karena itu sebagai penghormatan terhadap keputusan tersebut Polisi menganggap tidak perlu lagi meneruskan proses kasus tersebut lebih lanjut. Kecuali terhadap kejahatan yang menyangkut nyawa, maka meskipun telah diselesaikan di lembaga *Kutei*

proses hukum dalam lembaga hukum formal tetap berjalan. Sedangkan Jaksa dan Hakim memandang bahwa penyelesaian tindak pidana melalui lembaga *Kutei* tidak mempengaruhi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Keputusan lembaga *Kutei* hanya dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang meringankan terdakwa bukan faktor yang menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dipidana.

THE ROLE OF TRADITIONAL CUSTOMARY INSTITUTION OF THE REJANG SOCIETY (KUTEI) IN THE SETTLEMENT IF CRIMINAL CASES

**By :
M. ABDI**

ABSTRACT

This research is purposed to understand perception of the society and law enforcement agency for the role and function of the traditional customary institution *Kutei* in the settlement of criminal cases. Based on the analysis of the literature data and field data, the writer draws conclusions as follows : (1) perception of the Rejang Society for the role and function of the traditional customary institution *Kutei* as an informal institution that can settle criminal cases in the society is extremely positive. This is proved by the existence of recognition, obedience, and respect of the Rejang society for decision of the *Kutei's* institution. The decisions of the *Kutei's* institution have a high and respectable position for Rejang society, (2) there is different perception between law enforcement agency (police, public prosecutor, and judge) in viewing the existence of the traditional customary institution *Kutei* as an institution of settlement for criminal cases. For police the settlement through the *Kutei's* institution is considered finish, hence, as a respect for the decisions police consider that they do not need to continue process of the further cases. Except for the crimes related to one's life, even though the case has been processed in the *Kutei's* institution, the process of law keeps continuing. While the judge and the public prosecutor regard that the settlement of criminal cases through the *Kutei's* institution does not affect in the process of prosecution and investigation in the trial. The decisions of *Kutei's* institution may only be applied as one of the commutation factors for the defendant, not a determining factor whether the defendant can be sentenced or not.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Kerangka Pemikiran.....	17
E. Metode Penelitian.....	35
F. Sistematika Pe.....	
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 44
A. Hukum dan Sistem Sosial.....	44
B. Kedudukan Hukum Adat di dalam Hukum Nasional Indonesia ...	48
C. Keberadaan Hukum Adat Rejang dalam Hukum Nasional Indonesia	73
D. Peranan Lembaga Adat Tradisional Kutei dalam Penyelesaian Konflik.....	81
E. Fungsi Hukum dalam Penyelesaian Konflik (Tindak Pidana) bagi Masyarakat.....	87
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	 97
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Adat Tradisional Kutei dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	99
B. Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Lembaga Adat Tradisional Kutei dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	129
 BAB IV PENUTUP.....	 146
A. Kesimpulan Umum	147
B. Kesimpulan Khusus.....	147
B. Saran.....	148
 DAFTAR PUSTAKA.....	 150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia meliputi segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan pertahanan keamanan. Bidang-bidang Pembangunan Nasional tersebut, tidak hanya dilakukan untuk membawa perubahan masyarakat, tetapi dipengaruhi pula oleh tuntutan dan perubahan masyarakat yang makin kompleks. Dalam hubungan ini, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa “perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak dapat cepat atau lambat; dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat yang bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja”.¹

Pembangunan hukum nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keinginan politis, khususnya pada masa awal revolusi kemerdekaan. Keinginan politis dalam arti untuk segera menggantikan tata hukum dari masa sebelum kemerdekaan adalah wajar, karena:

Dengan berdirinya negara Indonesia sebagai negara merdeka, dengan kembalinya kedaulatan negara kepada bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia yang sekarang dapat menentukan nasibnya menurut kemauannya sendiri dengan penuh kemerdekaan akan dapat menetapkan bagaimana bentuk dan sifat hukum baru di Indonesia.²

¹. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 202.

². Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, halaman 15.

Kenyataan lain, dapat pula dipahami melalui para pemikir hukum yang saat itu terlibat langsung dalam pergerakan memperjuangkan kemerdekaan. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa ide pembangunan hukum timbul oleh adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini menjadi landasan untuk mencari bentuk hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti pernah dianjurkan oleh van Vollenhoven, yaitu: agar supaya hukum yang berlaku cocok untuk negeri serta bangsa ini, haruslah hukum Indonesia, dalam hal ini mencari jalannya sendiri yang mandiri, bukan menjadi kereta tambahan dari hukum di negeri Belanda.³ Hal ini mempunyai makna bahwa *"the real transformation of legal system of former colonies depends largely on the transformation new ideals which impel the law in fundamentally different direction, from those the colony"*⁴ Artinya pembangunan hukum itu mengacu pada penuangan ide-ide baru yang berbeda dibandingkan dengan ide-ide yang dituangkan di dalam ketentuan hukum yang berlaku sebelum pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan dasar fundamental dalam melakukan perubahan tujuan bangsa berdasarkan rasa keadilan yang bersemayam pada bangsa Indonesia. Mengenai hal ini Koesnoe mengatakan

³. Kusumadi Poedjosewoyo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1961, halaman 57.

⁴. Daniels S. Lev, *"The Banyan Tree : Civil Law Change in Indonesia,"* The American Journal of Comparative Law, Vol. XIV, 1965, halaman 306.

bahwa “tujuan bangsa Indonesia pada waktu dijajah berbeda dengan tujuan bangsa Indonesia dalam masa kemerdekaan. Keadilan pada masa lalu berbeda isinya dengan keadilan pada saat ini”.⁵ Atas dasar inilah pembangunan hukum di Indonesia dilaksanakan, dalam rangka meruntuskan kembali rasa keadilan yang telah mengalami perubahan yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, untuk memenuhi keadilan masyarakat saat ini, pembangunan hukum harus diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan disegala bidang, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pengayoman dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum guna memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan hukum harus memperhatikan cara bekerja sistem hukum dalam masyarakat yang meliputi “struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum”⁶ Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa yang dimaksud *struktur hukum (legal structure)* adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan formal. Misalnya bagaimana pengadilan dan pembuatan hukum dilaksanakan. Yang dimaksud *substansi hukum (legal substantive)* hukum adalah peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman para pelaku hukum pada waktu

⁵ Moh. Koesnoe, “Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini (Sebuah Pengantar)”, Dalam Artudjo Alkotsar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Akademik Presindo, Jakarta, 1989, halaman 101.

⁶ Lawrence M. Friedman and Stewart Maccaulay, *Law and Behavioral Sciences*. Indianapolis: The Bpbb-Merrill Company, Inc., 1969, halaman 1003-1004.

melakukan perbuatan-perbuatan hukum serta hubungan-hubungan hukum. Sedangkan yang dimaksud *kultur hukum (legal culture)* adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan cara-cara masyarakat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Misalnya mengapa pihak-pihak yang bersengketa tidak menggunakan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian konflik, tetapi justru menggunakan lembaga tradisional. Untuk memahami bagaimana realitas budaya hukum dalam suatu masyarakat, Friedman mengatakan bahwa kultur hukum mencakup "*the network of values and attitudes relating to law, which determines who and why and where people turn to the law, or to government, or turn away*". Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang meliputi sektor materi hukum, aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum harus dititikberatkan pada pembinaan budaya hukum. Sebab, budaya hukum merupakan suatu proses bagaimana para penegak hukum mempertahankan hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum.⁷ Cara-cara penegak hukum merupakan cermin budaya penegakan hukum akan mempengaruhi dan menentukan sikap-sikap warga masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Artinya budaya penegak hukum akan menentukan apakah warga masyarakat akan menggunakan atau tidak menggunakan lembaga hukum seperti pengadilan sebagai lembaga penyelesaian konflik. Dengan kata lain, bahwa orang akan memilih jasa pengadilan sebagai lembaga penyelesaian konflik, apabila orang mempunyai penilaian yang baik terhadap pengadilan.

⁷ Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum*, Pada Simposium Masalah Penegakan Hukum BPHN, Bina Cipta, 1979, Denpasar bali, halaman 90.

Penegakan hukum sebagai suatu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspek, yaitu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum dan sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.⁸

Hukum itu diam dan hanya melalui penegakan hukum oleh para aparat hukum citra moral hukum dapat diekspresikan. Hukum dapat pula dikatakan muatan janji-janji yang hanya dapat diwujudkan secara nyata melalui karya para penegak hukum. Dalam usaha yang demikian itu maka tampil aspek penegakan hukum sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Penegakan hukum sebagai usaha yang dilakukan oleh manusia akan terbuka kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Penegakan hukum dikatakan berhasil, apabila terdapat kesesuaian antara pesan atau janji yang tercantum dalam hukum dan pesan atau janji itu benar-benar dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum itu disebut gagal, apabila terjadi ketidaksesuaian antara pesan atau janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan praktik penegakan hukum. Dalam hubungan inilah tampil para penegak hukum sebagai orang-orang yang dituntut untuk memiliki kualitas kejiwaan, penegakan dan ketrampilan tertentu agar usaha penegakan hukum itu dapat berhasil.⁹ Oleh sebab itu, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dapat dicermati melalui penyelenggaraan proses sistem peradilan pidana.

⁸ Satjipto Rahardjo *Kendala dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum Dewasa Ini*, Pada Simposium Masalah Penegakan Hukum BPHN, Bina Cipta, 1979, Denpasar Bali, halaman 25.

⁹ Ibid, halaman 25.

Persoalan budaya penegakan hukum dan budaya penegak hukum yang menjadi bidang garapan dalam pembangunan hukum nasional dimuat dalam amanat rakyat yang dirumuskan dalam Tap MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pada intinya rakyat Indonesia menghendaki pembangunan dan pengembangan budaya hukum diarahkan untuk:

- (1) membentuk sikap dan perilaku masyarakat termasuk penyelenggaraan negara agar budaya hukum yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila lebih dihayati dalam kehidupan sehingga kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum makin meningkat, hak-hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi;
- (2) menciptakan ketenteraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkembangkan disiplin nasional; dan
- (3) meningkatkan kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat untuk mematuhi dan mentaati hukum sehingga sehingga terwujud suatu bangsa yang berbudaya hukum.

Arahan pembangunan budaya hukum harus diikuti dengan pembaharuan di bidang materi hukum dan perubahan perilaku penegak hukum sesuai dengan substansi hukum. Misalnya, pembaharuan di bidang penegakan hukum pidana, tidak hanya mengharuskan pembaharuan hukum pidana materil (KUHP Nasional Indonesia Baru) tetapi juga diikuti dengan pembaharuan hukum pidana formal (KUHP) sebagai substansi hukum yang

ditujukan untuk menuntun sikap dan perlakuan penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa.

Apabila titik berat pembangunan hukum nasional Indonesia yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia seperti dijelaskan di atas dapat dipahami, maka dapat dikemukakan bahwa seluruh warga masyarakat di negeri ini menghendaki perwujudan fungsi dan peran hukum sebagai sarana pengayoman yang mempunyai makna:

- (1) hukum sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang demokratis;
- (2) hukum sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan; dan
- (3) hukum sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial.¹⁰

Apabila kita mencermati pembangunan hukum nasional Indonesia, maka pembangunan hukum harus dilakukan secara integratif. Artinya, pembangunan budaya hukum harus diikuti dengan pembaharuan materi hukum dan restrukturisasi struktur hukum. Misalnya, materi hukum yang menjadi pedoman aparat hukum dalam menegakkan keadilan masih banyak menggunakan materi hukum warisan kolonial. Mengenai hal ini, Sudarto dan Muladi menegaskan bahwa ada tiga alasan pembaharuan hukum di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional;
2. Alasan sosilogis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa; dan
3. Alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak difahami oleh generasi muda dari negara yang baru

¹⁰ Persahi, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989, halaman 5.

merdeka. Hal ini biasanya negara yang baru merdeka ingin menjadikan bahasanya sebagai bahasa kesatuan.....¹¹

Khusus mengenai alasan politik, Muladi menyatakan bahwa sesuai dengan kondisi nasional Indonesia masalahnya tidak hanya menyangkut kebanggaan nasional saja, melainkan tercakup pemikiran integrasi hukum sesuai dengan Wawasan Nusantara.¹² Sedangkan arahan GBHN 1999 mengenai pembangunan di bidang materi hukum digariskan bahwa “pembentukan hukum mengindahkan ketentuan-ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹³

Dalam ruang lingkup pembangunan hukum nasional, khusus di bidang budaya penegak hukum dalam menegakkan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan yang sampai kini terus menjadi perhatian khusus dari masyarakat pencari keadilan, secara empiris pengaruh budaya kolonial masih mewarnai penegakan hukum di negeri ini. Hal ini dapat dipahami melalui krikitik Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa:

Salah satu penyebab adalah adanya pengaruh-pengaruh ketentuan dan lembaga hukum yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang telah mempengaruhi persepsi dan tingkah laku manusia Indonesia. Pengalaman yang kuat dan mendalam penjajahan ini berlangsung dan berhubungan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Proses penjajahan dapat dilihat sebagai penetrasi.....

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, halaman 1. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, halaman 70-72

¹² Muladi, *Ibid.*,

¹³ Pembangunan Bidang Hukum Nomor 1 Materi Hukum butir (e) dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara*.

sehingga sedikit demi sedikit akhirnya struktur masyarakat Indonesia mengalami perubahan.¹⁴

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dapat pula dikemukakan bahwa pengaruh penjajahan kolonial Belanda terhadap hukum positif Indonesia, tidak hanya pada substansi hukum, melainkan juga pada proses penegakan hukum. Masyarakat pencari keadilan banyak merasa tidak puas terhadap hukum positif yang berlaku sekarang. Penegakan hukum yang dilakukan banyak tidak memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat. Oleh karena penegak hukum dalam menjalankan tugas dinilai masyarakat tidak mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pengayoman, maka banyak masyarakat memilih cara-cara lain yang dianggap adil dalam menyelesaikan konflik. Misalnya, masyarakat memilih cara-cara yang berlaku dalam hukum adat dengan menggunakan jasa lembaga hukum adat sebagai lembaga penyelesaian konflik, karena lembaga penyelesaian adat dianggap lebih adil dibanding menyelesaikan kasus melalui pengadilan negeri.

Keberadaan hukum adat dalam penegakan hukum modern yang tercermin melalui penyelenggaraan peradilan pidana sesungguhnya tetap eksis. Hal ini dapat dipahami dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Bunyi rumusan Pasal 27 (1) bahwa "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 28.

hidup dalam masyarakat". Rumusan Pasal 27 (1) tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu, ia harus ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pengakuan keberadaan hukum adat tercermin dalam budaya politik yang mencakup sikap kesadaran akan akar-akar hukum nasional bangsa Indonesia, yang dikenal sebagai hukum-hukum adat setempat yang merupakan susunan asli sistem pemerintahan tradisional yang menentukan batas-batas administratif dan politik daerah di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini sangat menentukan dan membantu jalannya pemerintahan setempat.

Budhisantoso dalam tulisan yang berjudul *Kebudayaan dan Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk* menyatakan:

Budaya politik seperti dalam *hukum-hukum adat* setempat serta *pranata sosial tradisional* akan berposisi saling mendukung secara timbal balik dengan budaya ekonomi dan sosial daerah setempat yang pada tahap selanjutnya merupakan aspek yang sangat mendukung bidang Kesradikbud (Kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan) di pedesaan, karena kebudayaan-kebudayaan suku bangsa itu hingga kini masih berfungsi sebagai kerangka acuan bagi para pendukungnya dan ditanamkan pada generasi muda lewat pendidikan keluarga.¹⁵

¹⁵ Budhisantoso, *Kebudayaan dan Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk*, halaman 34 dan lihat Chaidir Basrie (ed) *Pemantapan Pembangunan melalui Pendekatan Ketahanan Nasional*, PPS-UI Dirjen Persmanvet Mabes ABRI, Jakarta, 1994, halaman 34.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum adat yang berlaku serta pranata sosial tradisional yang ada di masyarakat tersebut haruslah dapat difungsikan dan berkiprah untuk kepentingan pembangunan antara lain adalah di bidang pembangunan hukum, di sektor materi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.

Untuk itu hukum-hukum adat setempat yang dijalankan oleh masyarakat dan pranata sosial tradisional yang berfungsi sebagai media sosial perlu dikaji kembali peran, fungsi dan perkembangannya hingga saat ini. Hal ini mengingat pembangunan menjadi kegiatan ekstern yang dibawa oleh pemerintah dan aparturnya tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Ini berarti fungsi keperantaraan pranata sosial tradisional dalam pembangunan menjadi faktor pendukung pembangunan yang harus diperhitungkan untuk menghindari adanya konflik dalam pembangunan. Fungsi keperantaraan dalam pembangunan daerah pedesaan merupakan bagian dari mekanisme untuk penyelesaian konflik, dan dari segi positifnya fungsi tersebut membantu untuk menjadi penggerak masyarakat dari bawah guna memulai proses perubahan serta mempersiapkannya untuk berhubungan dengan pemerintah dan pihak lain agar program pembangunan lebih sukses.

Keperantaraan pranata sosial tradisional yang masih digunakan oleh warga masyarakat adalah dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi diantara warga masyarakat, baik sengketa yang bersifat hukum publik seperti

tindak pidana maupun yang bersifat hukum privat seperti pembagian hasil dalam penggarapan lahan pertanian dan jual beli tanah.

Khusus mengenai penyelesaian kasus tindak pidana, maka lembaga hukum yang berhak mengadili dalam menyelesaikan konflik adalah badan-badan pengadilan negara, karena pengadilan swapraja dan pengadilan adat dinyatakan hapus berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dengan tujuan menciptakan unifikasi hukum. Khusus untuk pengadilan adat yang berada di Kresidenan Bengkulu¹⁶ dihapus dengan Penetapan Menteri Kehakiman Nomor J.B. 4/3/20 tahun 1956.¹⁷ Sedangkan keberadaan Peradilan Desa dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 3 a RO tetap diakui, karena Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tidak mengurangi hak peradilan desa untuk tetap melakukan peradilan.

Sejak penghapusan Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, susunan, kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (LN Tahun 1951 Nomor 9) yang mulai berlaku 14 Januari 1951 dan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Nomor J.B. 4/3/20 tahun 1956 yang menghapus Pengadilan Adat di Kresidenan Bengkulu, maka penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh Pengadilan Negeri melalui penyelenggaraan proses peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana dilakukan oleh sub-sub sistem peradilan pidana sebagai lembaga resmi pemerintah

¹⁶ Abdullah Sani, *Bengkulu menjadi propinsi ke XXVI pada 18 Nopember 1968*, Curup, 1980, halaman 5

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Simbur Cahaya, 1976, halaman 109.

yakni Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim yang diberi kepercayaan mengadili.

Realitas dalam masyarakat memberikan petunjuk sebagai pemahaman bahwa di samping lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara pidana, keberantaraan lembaga sosial tradisional seperti “Lembaga Kutei” pada masyarakat Rejang di Bengkulu masih tetap eksis sebagai lembaga penyelesaian konflik yang terjadi di antara warga masyarakat.

Lembaga Kutei sebagai lembaga sosial tradisional yang berlaku bagi masyarakat Rejang yang tinggal di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga adat tradisional *Kutei*. Lembaga adat tradisional *Kutei* merupakan lembaga adat yang menjalankan penegakan hukum adat Rejang baik yang menyangkut persoalan-persoalan keperdataan maupun pidana.

Bagi masyarakat Rejang, hukum adat setempat itu bersumber pada “*Oendang-oendang Simboer Tjahajo*” yang dikumpulkan pertama kali oleh J.F.R.S. Van den Bossche dalam tahun 1825-1854 (Van den Berg, 1894). Secara fungsional undang-undang *Simbur Cahaya* ini dijalankan oleh Lembaga sosial tradisional atau lembaga adat masyarakat Rejang yang dikenal dengan sebutan *Kutei*.

Oleh karena dalam kaitan dengan program pembangunan, terutama pembangunan di bidang hukum, *Kutei* seharusnya berfungsi sebagai mitra lembaga formal dalam penyelesaian konflik dan sebagai media sosial

(perantara) dalam menjabarkan dan mengkomunikasikan program pembangunan hukum di tingkat pedesaan.

Penggunaan lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat Rejang merupakan jalan dalam penyelesaian konflik, guna menghindari penyelesaian melalui lembaga formal pemerintah (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) Apabila tindak pidana yang telah diselesaikan oleh lembaga adat tradisional *Kutei*, maka tindak pidana yang terjadi tersebut tidak perlu lagi diteruskan penyelesaiannya melalui lembaga formal. Pihak Kepolisian yang ditugaskan oleh undang-undang sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali melakukan proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi, terhadap tindak pidana yang telah diselesaikan melalui lembaga adat tradisional *Kutei* tidak menggunakan haknya untuk memproses lebih lanjut perkara tersebut, meskipun tindak pidana yang terjadi tersebut bukan tergolong kedalam delik aduan. Demikian juga terhadap tindak pidana yang telah diproses oleh pihak penyidik bagi masyarakat Rejang terutama para pihak (pelaku dan korban) dapat memohon kepada penyidik agar perkara pidana yang sedang diproses tersebut dapat diselesaikan di lembaga adat tradisional *Kutei*. Terhadap permohonan ini penyidik dengan berbagai pertimbangan yang ada dapat mengeluarkan suatu kebijakan terhadap perkara tersebut.

Di samping uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas penelitian lembaga adat tradisional *Kutei* dipandang penting untuk dilakukan, karena penelitian masalah penyelesaian tindak pidana melalui lembaga adat belum banyak dilakukan. Dalam rangka menghadapi keluarnya

KUHP Nasional yang di dalam rancangannya telah menetapkan dapat diterapkannya sanksi adat di samping jenis-jenis sanksi yang lain, maka keberadaan jenis-jenis sanksi adat yang ditetapkan dalam hukum adat Rejang dan diputuskan melalui lembaga adat *Kutei* sangat membantu penerapan KUHP Nasional yang akan datang. Kemudian masalah lembaga adat desa ini sekarang lagi hangat dibicarakan dan telah masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Penjelasan Pasal 101 huruf e UU RI No. 22 Tahun 1999 telah dinyatakan bahwa "Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih."¹⁸

Berdasarkan uraian di atas serta dalam kerangka dan ruang lingkup pembangunan hukum nasional, terutama di bidang pembinaan aparatur penegak hukum, maka keberadaan dan pendayagunaan lembaga adat tradisional masyarakat Rejang (*Kutei*) sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana dipandang penting untuk diteliti. Hal ini sesuai dengan Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 yang menegaskan:

Pembaharuan hukum pidana Indonesia harus melalui penelitian mendalam tentang:

1. hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia; dan
2. keinginan yang mendasar dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, terutama untuk menentukan asas-asas hukum pidana Indonesia yang tepat¹⁹

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*, DP RI, halaman 102.

¹⁹ BPHN Departemen Kehakiman, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, halaman 160-161.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang melatarbelakangi penulisan tesis yang diberi judul “Peranan Lembaga Adat Tradisional Masyarakat Rejang (Kutei) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana,” maka untuk mempertajam penelaahan dan analisis diajukan permasalahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana?
2. Bagaimanakah persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diajukan di atas, maka ada dua tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian “Peranan Lembaga Adat Tradisional Masyarakat Rejang (Kutei) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana,” yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana.
2. Untuk mengetahui persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana.

Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis penelitian ini dapat memberikan gambaran yang berarti bagi pendidikan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan studi peradilan pidana dan perkembangan hukum adat di tanah air.

2. Dari segi praktis penelitian ini memberikan data berupa informasi aktual dan faktual kepada penegak hukum sebagai penyelenggaraan sistim peradilan pidana, serta kepada masyarakat Rejang guna menegakkan proses hukum yang adil.

D. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum mendekatkan hukum sebagai suatu "*Sollen gesetze*" dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu :

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum.
3. Struktur penegakan hukum.
4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.²⁰

Apabila terjadi proses interaksi diantara keempat unsur tersebut, maka ada kecenderungan terjadi berbagai hal yang dapat dikelompokkan ke dalam kejadian-kejadian yang menghambat terciptanya suatu penegakan hukum yang baik. Fuller mengemukakan ragam kejadian yang menghambat penegakan hukum, yakni sebagai berikut :

1. Kekeliruan dalam penafsiran hukum..
2. Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum.
3. Keinginan akan kekuasaan.

²⁰ Satjipto Raharjo, op cit, halaman 26.

4. Penyuapan.
5. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi.²¹

Pendapat lain dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa para penegak hukum ada kemungkinan dihadapkan pada halangan-halangan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Halangan-halangan yang dimaksud adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menenpatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservativisme.²²

Kelima halangan yang dikemukakan Soerjono Soekanto di atas merupakan halangan yang bersumber dan melekat pada diri pribadi penegak hukum. Berhubungan dengan kelima hal yang dapat menghambat penegakan hukum yang baik, lebih lanjut Soerjono Soekanto menulis sebagai berikut:

1. Berbicara masalah penegakan hukum tanpa menyinggung manusia yang menjalankan penegakan hukum itu merupakan pembicaraan yang steril. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya memperoleh gambaran sterilitas yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia.
2. Masalah yang kedua adalah berhubungan soal lingkungan dari penegakan hukum tersebut. Masalah lingkungan ini dapat

²¹ Fuller, Lon.L., *The Morality of Law*, (New Haven, Conn : Yale University Press, 1964, halaman 81 dan dikutip oleh Satjipto Raharjo dalam tulisan yang berjudul *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*, halaman 26.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 24.

dikaitkan dengan manusianya secara individu, serta dengan penegakan hukum sebagai lembaga.²³

Dalam lingkup pekerjaan hukum dalam masyarakat, Robert B.

Seidmen,²⁴ mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat (termasuk aspek penegakannya). Ketiga unsur dimaksud adalah : (a) lembaga pembuat peraturan; (b) lembaga penerap peraturan; (c) pemegang peran itu sendiri.

Ketiga unsur pendukung penegakan hukum yang diajukan Seidman itu didasarkan pada empat dalil sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak ;
- b. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya ;
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, kekuatan sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran itu ;
- d. Bagaimana pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, kekuatan sosial politik, ideologi, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.²⁵

²³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, halaman 22.

²⁴ Ibid, halaman 5.

²⁵ Ibid, halaman 27.

Berhubungan dengan persoalan penegakan hukum, I.S Susanto²⁶ mengajukan empat elemen yang berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum, yaitu Undang-undang, pelanggar, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum. Keempat komponen itu berada dalam hubungan yang saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam situasi tertentu.

Khusus mengenai substansi suatu undang-undang hal yang perlu dicermati adalah persoalan mengenai "cacat" yang terdapat dalam undang-undang antara lain seperti kepentingan-kepentingan yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan lebih besar melalui peraturan itu, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi.

Dimensi pelanggar hukum yang perlu diperhatikan adalah hal yang menyangkut pandangan atau persepsi mereka terhadap undang-undang, korban/masyarakat, dan aparat penegak hukum, serta pandangan pelanggar hukum terhadap bekerjanya hukum. Sedangkan faktor korban berhubungan dengan persepsi mereka tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-hak yang diatur dalam ketentuan hukum.

Faktor aparat penegak hukum merupakan faktor yang menempati posisi strategis, bahkan menempati posisi kunci dalam menegakkan hukum. Untuk itu hal yang perlu diberi perhatian khusus adalah yang berhubungan

²⁶ I.S. Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Dalam masalah-masalah Hukum Nomor 9, tahun 1992, halaman 17.

dengan “kepentingan-kepentingan” dan hal-hal yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam berinteraksi dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya.²⁷

Dalam berbagai kajian sistematis tentang penegakan hukum dan keadilan perteori (*by theory*) terdapat lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar penegakan hukum efektif. Kelima pilar hukum dimaksud adalah aparat penegak hukum, peralatan penegakan hukum, masyarakat sebagai adressat hukum, dan birokrasi penegakan hukum.²⁸ Pendapat lain dikemukakan Walter C. Reklès bahwa efektivitas penegakan hukum secara empiris sangat bergantung pada sistem dan organisasi kepolisian, sistem hukum, sistem peradilan, dan birokrasi penegakan hukum.²⁹

Penegakan hukum yang baik akan tercermin pada cara kerja komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yakni Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang mengadili, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga perubahan perilaku. Komponen sistem peradilan pidana tersebut secara empiris mempunyai tugas yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama

²⁷ Ibid, halaman 17.

²⁸ Lihat dalam Anto Tabah, “*Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, Dalam Kunarto (penyunting), *Merenungi Kritik Terhadap Polri* (buku 2), Jakarta, Cipta Manunggal 83. Bandingkan pula dengan Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1986.

²⁹ Ibid, halaman 83.

dalam menegakkan hukum³⁰. Keberhasilan kerja dalam mencapai tujuan penegakan hukum harus dilihat secara integratif. Artinya keberhasilan komponen yang satu merupakan keberhasilan komponen yang lain atau kegagalan komponen yang satu merupakan kegagalan komponen lainnya. Oleh karena itu, kebersamaan dan kerjasama yang baik antar komponen dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat diperlukan dalam mencapai tujuan penegakan hukum pidana. Dalam lingkup penyelenggaraan peradilan pidana, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana seharusnya lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat bekerjasama yang tulus dan ikhlas serta positif diantara aparaturnya penegak hukum dan mengemban tugas menegakkan keadilan hukum (legal justice).³¹

Sistem Peradilan Pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas sangat penting guna mencapai fungsi sistem peradilan pidana yang diharapkan.

Sistem peradilan pidana disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*Crime Containment System*), sedangkan di lain pihak sistem peradilan pidana justru berfungsi untuk pencegahan sekunder (*Secondary*

³⁰ Tujuan penegakan hukum melalui penyelenggaraan peradilan pidana adalah "the prevention of crime and treatment of offenders (pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum)"

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986, halaman 26.

preention), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.³² Oleh karena itu penyelenggaraan sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu jaringan (*net-work*) kegiatan yang mengoperasionalkan hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana harus sesuai dengan cita-cita penegakan hukum, serta mempertimbangkan dinamika dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum yang hanya melalui pendekatan yuridis semata-mata sudah tidak memadai lagi, sehingga penegakan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan sosio politis dan sosio kultural.³³ Dengan demikian, penegakan hukum melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan, di samping harus dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis mempunyai makna bahwa peradilan pidana merupakan rangkaian kegiatan menerapkan norma-norma hukum yang menuntun penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan cara-cara yang benar sesuai dengan proses hukum yang adil (*due process of law*).

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, halaman 21.

³³ Sukarton Marmosudjono, *Menegakkan Hukum Di Negara Pancasila*, Ceramah Jaksa Agung RI di Universitas Bengkulu, 1988, halaman 26.

- b. Pendekatan sosio-politik dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas, dan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pendekatan sosio-kultural dalam penegakan hukum mempunyai makna bahwa penegak hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat yang menghormati ketentuan hukum dan penegak hukum.

Penggunaan pendekatan sosio kultural dan sosio-politik sebagai pelengkap pendekatan yuridis diperlukan didasarkan pada alasan keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana ;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural dsb.) ;
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*," oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan *simptomatik*" dan bukan "pengobatan *kausatif*".
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "remidium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif ;
- e. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional ;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif ;

- g. Bekerjanya berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih tinggi bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".³⁴

Dalam hukum pidana orang dilarang melakukan tindakan penyelesaian tindak pidana dengan cara-cara menghakimi sendiri, karena penyelesaian tindak pidana menjadi kewenangan negara yang dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum yang diberi kepercayaan menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Oleh karena penyelesaian kasus tindak pidana merupakan kewenangan negara, maka penyelesaian tindak pidana harus dilakukan melalui proses peradilan pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diundangkan 31 Desember 1981.

KUHP merupakan pedoman penyelenggaraan proses peradilan pidana yang diciptakan dan ditujukan untuk memberikan tuntunan kepada penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana. Oleh karena itu, KUHP sesungguhnya bukan ditujukan kepada para kriminal atau pelanggar hukum, melainkan tertuju kepada penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan kehidupan hukum sebagai sarana yang demokratis, berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Hal ini terungkap dalam tulisan Jerome H. Skolnick yang menyatakan "*The substantive law of crimes is intended to control the behavior of people who wilfully injure*

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986, halaman 8-9.

*person or property..... Criminal procedure, by contrast, is intended to control authorities, not criminals.*³⁵

Tulisan Skolnick tersebut di atas memberikan koreksi kepada penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana dengan mengingatkan bahwa KUHAP merupakan aturan yang melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar melakukan proses hukum yang adil dalam melakukan pemeriksaan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa. Sebab, dalam ketentuan KUHAP yang mengatur hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai manusia harus ditegakkan oleh penegak hukum.

Dalam lingkup penegakan hukum melalui penyelenggaraan peradilan pidana yang sampai saat ini masih dihadapkan pada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, tidak keliru jika Romli Atmasasmita mengajukan kritik sebagai berikut:

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.³⁶

Kritik yang dikemukakan Romli Atmasasmita di atas sesungguhnya dapat dicermati dalam berbagai isu yang cenderung negatif terhadap penegak hukum dalam menegakkan keadilan hukum. Sebab, kecenderungan

³⁵ Jerome H. Skolnick, *"Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society,"* dalam Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, *Law and The Behavioral Science*, Indianapolis: The Bobb-Merrill, 1969, halaman 902-903.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Op cit*, halaman 39.

ketidakseimbangan antara nilai kebendaan dengan nilai keakhlakan serta adanya orientasi yang lebih mengutamakan orientasi pada status dibanding orientasi pada peranan yang menjadi pesan undang-undang kepada penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan pencari keadilan memilih penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa lembaga sosial tradisional yang justru dianggap lebih adil dibanding putusan pengadilan negeri.

Sampai saat ini gejala-gejala penggunaan jasa lembaga tradisional masih terus dilakukan masyarakat dalam penyelesaian konflik, meskipun masyarakat mengetahui bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui lembaga formal, yakni pengadilan negeri. Khusus bagi masyarakat yang hidup di pedesaan yang memegang teguh hukum adat, maka penyelesaian tindak pidana yang terjadi dilingkungan tidak harus melalui penyelesaian lembaga formal, melainkan diselesaikan melalui lembaga adat.

Lembaga adat di pedesaan merupakan lembaga sosial yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kedudukan dan peranan mengandung unsur struktural juga proses yang fungsional. Dengan demikian suatu lembaga sosial (*Sosial Institution*) merupakan suatu kompleks dari peranan-peranan. Hal ini disebabkan oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan, yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.³⁷ Fungsi suatu lembaga sosial adalah, antara lain :

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1981, halaman 89.

1. Memberikan pedoman pada warga-warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap tindak masyarakat ;
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan ;
3. Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar memenuhi kaidah dari nilai yang berlaku.³⁸

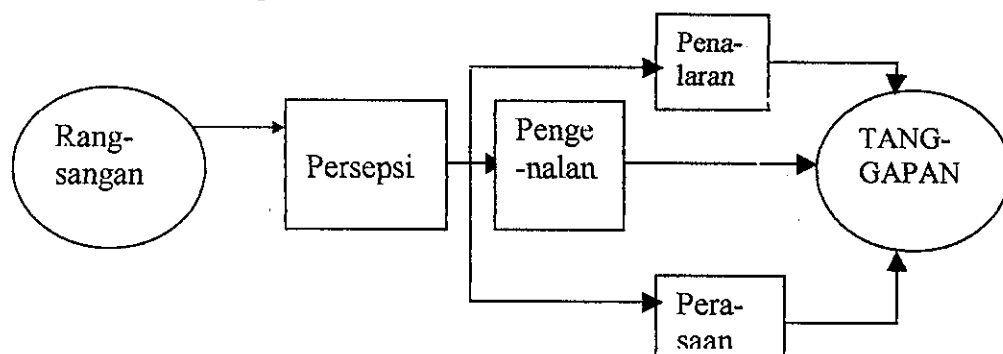
Memilih penyelesaian tindak pidana melalui lembaga formal atau melalui lembaga adat tradisional sebenarnya erat sekali kaitannya dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut. Persepsi merupakan sesuatu yang esensial di dalam diri seseorang, di mana persepsi itu akan melahirkan rangsangan baik untuk mengetahui atau melakukan sesuatu yang diperoleh melalui alat indra, fakta, maupun pengalaman. Individu dalam hidupnya cenderung selalu menggunakan nalar atau intuisi yang ada padanya untuk mempersepsikan, menanggapi gejala objek yang terdapat di lingkungannya, walaupun kemampuannya berbeda. Kemudian dengan nalar tersebut mereka dapat menentukan sikap, memberikan respon dan tanggapan atau pendapat terhadap proses sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Hamner persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya dan menafsirkan serta menanggapi

³⁸ Ibid. halaman 89.

segala sesuatu yang terjadi dilingkungannya.³⁹ Sedangkan Sadely dalam Miftah Toha mengatakan bahwa persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal sesuatu dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu baik lewat indra penglihatan, indra peraba dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadari.⁴⁰

Pendapat Sidi gorba dalam Miftah Toha mengatakan bahwa persepsi merupakan istilah dari tanggapan yang berupa pergaulan atau pengetahuan tentang objek yang ditangkap pancaindera.⁴¹ Lain halnya pendapat Gerungan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan persepsi masyarakat adalah kecepatan untuk melihat, memahami perasaan, sikap-sikap serta kebutuhan anggota-anggotanya.⁴² Dalam hal ini Bernard Hennessey⁴³ mengemukakan teori *Stimulus-Response* yang menggambarkan proses psikologis adanya rangsangan yang menghasilkan tanggapan yang dapat digambarkan dengan ragaan sebagai berikut:



³⁹ Hamner, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 41.

⁴⁰ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Ke Arah Sejarah dan Aplikasinya*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, halaman 26.

⁴¹ Ibid. halaman 26

⁴² W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Erisco, Bandung, 1983, halaman 14.

⁴³ Bernard Hennessey, *Pendapat Umum* (dialih bahasakan) oleh Amiruddin Nasution, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta, 1989, halaman 117-118.

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah diterapkan kepada manusia. Persepsi (*perception*) dapat didefinisikan sebagai suatu cara manusia menangkap rangsangan. Penalaran (*reason*) adalah proses yang menghubungkan rangsang dengan rangsangan yang lain pada tingkat psikologis. Kognisi (*cognition*) atau pengenalan adalah proses cara manusia memberikan arti untuk menimbulkan rangsangan. Sedangkan perasaan (*Feeling*) adalah konotasi emosional yang dihasilkan atau yang muncul karena rangsangan, baik dalam arti individual maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami atau menanggapi keberadaan, manfaat, peranan dan fungsi lembaga adat tradisional masyarakat Rejang *Kutei* sebagai suatu lembaga penyelesaian tindak pidana.

Penggunaan lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana berkaitan erat dengan tindakan manusia baik individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat. Weber mengatakan bahwa tindakan manusia harus didasarkan pada rasionalitas tindakan sosial, karena makin rasional tindakan sosial makin mudah kita memahami suatu tindakan. Weber membedakan empat tipe rasionalitas tindakan sosial sebagai berikut:

- 1). *Zwerk Rational* dapat diartikan tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai

⁴⁴ Ibid. halaman 117 – 118.

tujuan dengan menentukan nilai tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *Zwerk Rational* tidak absolut, karena dapat dijadikan cara mencapai tujuan lain berikutnya. Apabila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka orang akan lebih mudah memahami tindakan sosial yang dilakukannya.

- 2). *Werk Ratural Action* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor yang tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilih merupakan cara yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain yang ditunjukkan melalui tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini antara tujuan dan cara-cara mencapai tujuan cenderung menjadi sukar dibedakan. Namun tindakan ini tetap rasional, karena pilihan terhadap cara-cara telah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama, sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.
- 3). *Affectual Action* merupakan suatu bentuk tindakan yang dibuat-buat yang dipengaruhi perasaan emosi dan kepura-puraan aktor. Oleh karena itu tindakan tipe ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional.
- 4). *Traditional Action* merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja.⁴⁵

Dalam lingkup tindakan sosial, Herbert Blumer mengajukan tiga premis dalam teori interaksionis simbolis. Ketiga premis dimaksud adalah sebagai berikut:

⁴⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Penyadur Drs. Alimandan), Rajawali Pers, Jakarta, 1992, halaman 47-48. Dan lihat Hotman Siahaan, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Airlangga, Surabaya, 1986, halaman 200.

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.⁴⁶

Blumer berpendirian bahwa individu tidak seluruhnya ditentukan oleh lingkungan objek-objek potensial yang memegang kendali tindakan. Gambaran yang benar bahwa individu membentuk objek-objek itu, memberi arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau interpretasi subjektif.

Lebih lanjut Blumer menegaskan bahwa seseorang tidak langsung memberikan respons pada tindakan orang lain. Orang akan melakukan suatu respon setelah orang menemukan dasar pengertian yang diberikan kepada tindakan itu. Dengan demikian manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol oleh penafsiran untuk memperoleh kepastian makna suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

Interaktionisme simbolik yang dikemukakan oleh Blumer mengandung sejumlah *root image* atau ide-ide dasar sebagai berikut :⁴⁷

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi, kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-interaksi non-simbolis mencakup stimulus-respons yang sederhana. Interaksi simbolis mencakup "penafsiran tindakan".
3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik : makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Objek-objek dapat

⁴⁶ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism, Perspektif and Method*, Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall, Inc, 1969, halaman 2.

⁴⁷ Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 269.

- diklasifikasikan ke dalam tiga kategori ; (a) objek fisik, (b) objek sosial, (c) objek abstrak seperti nilai-nilai dan sebagainya.
4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal. Mereka dapat melihat dirinya sebagai objek. Pandangan terhadap diri sendiri ini, lahir disaat proses interaksi simbolis.
 5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri.
 6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi "organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan sebagai manusia". Tindakan berulang-ulang dan stabil, dan melahirkan apa yang disebut dengan kebudayaan dan aturan sosial.

Berbeda dengan Blumer, Mc Call dan Simmon mengemukakan bahwa pelaksanaan serangkaian tindakan, pelaku akan memperhatikan sesuatu dalam situasi ketika situasi itu dihadapkan kepadanya. Serangkaian tindakan dapat membawa arah dan siklus baru dalam pengertian yang dinyatakan individu dalam situasi tertentu berdasarkan hal-hal yang ada dalam dirinya. Objek-objek yang diperhatikan individu dapat dikembalikan kepada serangkaian tindakan yang sedang dilakukan. Serangkaian tindakan yang dikehendaki individu sangat penting dalam menentukan jenis objek yang ia pilih dari alternatif objek-objek yang menghadang.⁴⁸

Di dalam interaksionisme simbolik motif-motif menjadi penting dalam pengertian bahwa sesuatu hal yang dijadikan alasan bagi tindakan yang akan dilakukan seseorang atau tindakan orang lain untuk membedakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Motif-motif merupakan usaha seseorang untuk meringkas dan membuat makna dari tindakan kompleks. Motif merupakan label, pernyataan ringkas dari alasan tindakan yang terjadi.

⁴⁸ Joel M. Charon, *Symbolic Interaction, An Introduction, An Interpretation, An Integration*, New Jersey: Prentice Hall, 1989, halaman 120.

Oleh sebab itu motif adalah penting untuk memahami bagaimana orang bisa menjelaskan dan merasionalisasikan setiap tindakan orang lain dan tindakannya sendiri dengan cara yang relatif sederhana.⁴⁹

Penggunaan hukum adat melalui lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana bagi masyarakat Rejang merupakan suatu tindakan individu atau kelompok yang menjadi cermin atau optik persoalan ide-ide yang harus dicapai dalam penegakan hukum, yaitu : *Rechtssieherheit* (kepastian hukum), *Zweekmassigheit* (kemanfaatan hukum), dan *Gerechtigheit* (keadilan hukum).⁵⁰ Ketiga ide penegakan hukum tersebut harus diwujudkan secara serasi, sehingga secara empirik hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, berperikemanusiaan, dan berkeadilan sosial.

Kepastian hukum ditujukan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Kondisi ini diperlukan agar setiap orang dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.⁵¹ Nilai kemanfaatan yang diemban oleh hukum secara ideal harus diarahkan dan dicerminkan dalam upaya membantu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakat.⁵² Sedangkan mewujudkan keadilan adalah tujuan yang paling ideal yang hendak dicapai dengan menggunakan hukum. Hukum dalam hal ini berupaya

⁴⁹ Ibid, halaman 130-131

⁵⁰ Anton Tabah, *Op cit*, halaman 83

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1976, halaman 18.

⁵² Ibid, halaman 18.

untuk menciptakan kondisi yang dianggap setiap orang telah diperlakukan adil. Hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dengan keadilan umum yang tidak dapat dipisahkan dari nilai etis untuk menumbuhkan kebaikan seseorang, masyarakat dan kebudayaan.⁵³

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif⁵⁴ dengan pendekatan yuridis sosiologis⁵⁵. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui dan menemukan makna yang lebih mendalam dan terinci mengenai akar permasalahan penelitian yang nampak dalam fenomena masyarakat Rejang yang menggunakan lembaga tradisional “Kutei” sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana.

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai upaya kritis untuk mendekati permasalahan yang tidak hanya dengan kajian norma hukum, tetapi juga dari sisi perilaku masyarakat dalam penegakan fungsi hukum.

⁵³ Huijbers, *Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, halaman 163

⁵⁴ Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Periksa Lexy J. Kuleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996, hal. 3.

⁵⁵ Periksa Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang medasari serta data penunjang penlitit untuk mengamati dan menganalisis permasalahan secara objektif.

b. Sumber data

- (1) Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi berupa pendapat-pendapat atau penilaian-penilaian dari responden (Informan) mengenai peranan lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana.
- (2) Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis seperti pendapat, pandangan, asas-asas hukum mengenai fungsi hukum dan lembaga hukum (*Kutei* dan Pengadilan) sebagai lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian konflik (tindak pidana). Untuk mendapatkan data-data tersebut digunakan referensi yang bersifat umum dan khusus. Referensi yang bersifat umum seperti buku-buku teks, kamus, dan ensiklopedia. Sedangkan referensi bersifat khusus seperti jurnal, review, majalah, dan dikumen-dokumen resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Wawancara

Wawancara sebagai alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dalam bentuk tak berstruktur⁵⁶ yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat dan penegak hukum terhadap eksistensi lembaga tradisional masyarakat Rejang (Kutei) sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana.

Wawancara dititikberatkan pada jenis wawancara informal dalam arti pewawancara dan yang diwawancarai mempunyai kebebasan mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang ada dengan argumentasi yang logis.

(b) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini termasuk pengamatan partisipan. Oleh karena itu, peneliti tidak mengemukakan maksud dan tujuan kepada kelompok sosial yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan tujuan bahwa pengamatan sebagai salah satu alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data berupa informasi.

(c) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sumber data untuk menunjang kejelasan mengenai landasan kerja lembaga Kutei sebagai lembaga penyelesaian konflik dalam masyarakat Rejang yang sampai saat ini masih tetap eksis karena putusan lembaga Kutei sangat dihormati.

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, halaman 59.

4. Lokasi dan Sampel

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Curup Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong. Lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Lembaga *Kutei* merupakan lembaga tradisional masyarakat Rejang yang masih eksis di Kecamatan Curup Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong.
2. Kecamatan Curup mempunyai dua kesatuan kerabat keturunan darah (petulai) masyarakat Rejang yakni *petulai bermani* dan *petulai selupu*. Sedangkan kecamatan-kecamatan lain di daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong tidak memiliki karakteristik kekerabatan seperti yang dimiliki Kecamatan Curup. Oleh karena itu, teknik penentuan sampel lokasi termasuk multi stage sampling area. Artinya dalam meneliti peranan Lembaga *Kutei* sebagai lembaga tradisional masyarakat Rejang dalam penyelesaian tindak pidana, dianggap representative untuk mewakili kecamatan-kecamatan lain di Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong

b. Penentuan Sampel

Penentuan sampel untuk memperoleh data lapangan menggunakan metode purposive rasional (logical purposive sampling). Oleh karena itu informan yang menjadi sumber informasi dilakukan dengan cara memilih orang yang benar-benar mengetahui dan memahami eksistensi lembaga “*Kutei*” sebagai lembaga tradisional masyarakat Rejang yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik.

Sesuai dengan metode purposive rasional, maka yang menjadi informan awal dalam memperoleh data adalah:

- a. Seorang fungsionaris hukum adat pada petulai bermani dan petulai selupu;
- b. Seorang tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Kepala Desa atau Lurah di wilayah domisili masyarakat Rejang petulai bermani dan petulai selupu;
- c. Seorang anggota masyarakat yang pernah memilih Lembaga Kutei sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik yang pernah dihadapi; dan
- d. Seorang aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas di wilayah hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Rejang Lebong.

Data berupa informasi diperoleh berdasarkan perkembangan ketika wawancara dengan informan mengikuti prinsip “bola salju” (snow balls) sehingga pilihan sumber informasi dalam perolehan data berakhir apabila tidak ada lagi indikasi kemungkinan muncul informasi baru.⁵⁷

5. Analisis Data

Analisis data penelitian diawali pengolahan data dengan melakukan langkah-langkah berikut:

⁵⁷ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, halaman 44.

- a. Pengelompokan data merupakan suatu kegiatan mengelompokkan data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen sesuai dengan item-item yang menjadi objek bahasan yang diteliti;
- b. Penyuntingan data dilakukan setelah pengelompokan data dengan tujuan untuk memilah data yang relevan dengan bahasan masalah penelitian.

Setelah langkah-langkah kegiatan pengolahan data, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis data induksi konseptualisasi⁵⁸ yang diarahkan untuk mengabstraksikan informasi empirik ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis.

Untuk mempertajam pembahasan masalah yang diteliti digunakan teknik analisis domein, tkasonomis, komponensial, dan tema⁵⁹ sebagai berikut:

1. Analisis domein digunakan untuk membahas data berupa informasi tentang peranan dan fungsi lembaga tradisional masyarakat rejang “Kutei” sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana;
2. Analisis taksonomi dan komponensial digunakan untuk menjelaskan data-data mengenai persepsi masyarakat Rejang terhadap keberadaan lembaga Kutei, sehingga dapat diketahui adanya antaraksi antara masyarakat Rejang, penegak hukum dengan lembaga Kutei;

⁵⁸ Ibid, halaman 90

⁵⁹ Ibid, halaman 91.

3. Analisis tema digunakan untuk mengetahui dan menemukan “benang merah” dalam upaya menemukan jawaban yang menjadi fokus permasalahan penelitian

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, yang terdiri dari bab pertama yang berisi uraian tentang pendahuluan; bab kedua yang berisi tentang tinjauan pustaka; bab ketiga yang berisi uraian tentang hasil penelitian dan analisis; dan bab ke empat yang merupakan kesimpulan sekaligus penutup dari tesis ini.

Pada bagian pendahuluan (Bab I) akan diuraikan latar belakang yang dipakai sebagai titik tolak merumuskan permasalahan dalam kaitannya dengan peranan lembaga adat tradisional masyarakat Rejang (Kutei) dalam penyelesaian tindak pidana. Kemudian untuk menentukan arah penelitian, maka diuraikan tujuan yang ingin dicapai dan manfaat penelitian yang diharapkan, baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan kerangka pemikiran perlu dipaparkan sebagai titik tolak pemecahan masalah. Sedangkan bagian lain dari bab I ini dicantumkan juga metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II akan diuraikan lima hal, yakni mengenai Hukum dan Sistem Sosial, Kedudukan Hukum Adat di dalam Hukum Nasional Indonesia, Keberadaan Hukum Adat Rejang didalam Hukum Nasional Indonesia, Peranan Lembaga Adat Tradisional Kutei dalam Penyelesaian Tindak Pidana, dan Fungsi Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bagi Masyarakat.

Masalah Hukum dan Sistem Sosial perlu diuraikan karena lembaga tradisional yang ada di masyarakat sangat berkaitan erat dengan hukum yang berlaku di masyarakat dan perubahan-perubahan sosial yang ada, kebudayaan yang hidup dan terpelihara di masyarakat. Kedudukan Hukum Adat di dalam Hukum Nasional Indonesia penting diuraikan untuk melihat perkembangan hukum adat sebagai salah satu bagian hukum positif yang berlaku di berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan Hukum Adat Rejang di dalam Hukum Nasional Indonesia dicantumkan guna untuk mengetahui asal usul Hukum Adat Rejang, ciri-ciri Hukum Adat Rejang. Peranan lembaga adat tradisional Kutei dalam penyelesaian tindak pidana perlu diuraikan untuk memberikan gambaran keberadaan dari lembaga adat Kutei bagi masyarakat Rejang, landasan yang digunakan oleh lembaga Kutei dalam bertindak, dan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan di lembaga adat Kutei. Fungsi hukum dalam penyelesaian tindak pidana penting diuraikan untuk mengetahui fungsi-fungsi hukum sebagai central sosial, pengendalian sosial dan integrasi sosial. Hal ini penting dibahas untuk mengetahui bagaimana hukum itu berfungsi dalam penyelesaian tindak pidana pada lembaga adat Kutei.

Pada Bab III dipaparkan mengenai data hasil penelitian, yang dalam hal ini berupa persepsi masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga adat Tradisional Kutei dalam penyelesaian tindak pidana dan persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap lembaga adat tradisional Kutei dalam penyelesaian tindak pidana. Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan mempergunakan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Hasil dari analisis data tersebut merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dihubungkan dengan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang di dapat dengan menarik benang merah antara latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian serta analisis terhadap data hasil penelitian. Pada bab penutup ini juga di kemukakan rekomendasi atau saran dari peneliti yang diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Sistem Sosial

Hakekat hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu merupakan suatu sistem yang disebut “Sistem Hukum”.⁶⁰ Hukum sebagai sistem kemasyarakatan senantiasa dihadapkan pada persoalan dan tantangan tentang bagaimana cara kerja hukum mempertahankan kelangsungan hidup di tengah-tengah tarikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tantangan hukum menghadapi perubahan sosial yang makin cepat dapat berakibat kegagalan hukum. Tantangan demikian menghendaki hukum mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut sehingga hukum dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan masyarakat di bidang hukum. Suatu sistem dikatakan hancur sebagai suatu akibat pertukaran dengan perubahan-perubahan apabila hukum tidak mampu mempertahankan eksistensinya, sehingga harus mengalah terhadap tekanan perubahan tersebut. Sebaliknya apabila ia sanggup mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya maka sistem hukum akan hidup terus.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *op cit*, halaman 200

Kehidupan dalam masyarakat senantiasa berubah, tidak ada yang statis. Perubahan itu selalu terjadi dengan sifat yang berbeda. Ada dua kategori perubahan yakni: (1) perubahan yang lambat, yang inkremental, bertambah sedikit demi sedikit dan (2) perubahan dalam skala besar, perubahan revolusioner.⁶¹ Masing-masing perubahan tersebut melontarkan persoalan, sedangkan hukum harus dapat menemukan cara-cara yang berbeda pula untuk melakukan adaptasi terhadap masing-masing perubahan.

Di dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai taraf kebudayaan dan struktur sosial madya dan modern, hampir selalu ada perbedaan antara pola-pola perilaku yang nyata dengan pola-pola perlakuan yang dikehendaki oleh hukum yang disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas dan derajat diferensiasi. Perbedaan tersebut merupakan suatu gejala yang wajar dan tidak berarti bahwa hukum selalu tertinggal. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh karena biasanya hukum dibentuk dan disahkan oleh bagian kecil masyarakat yang pada suatu saat memegang kekuasaan. Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat merasakan setiap kebutuhan bagian terbesar warga masyarakat.⁶² Tertinggalnya perkembangan hukum apabila dibandingkan dengan perubahan sosial pada umumnya baru terjadi dalam

⁶¹ . Satjipto Rahardjo, *loc cit*, halaman 202

⁶² . Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 34.

situasi-situasi dinamis, dimana perubahan-perubahan sosial tidak diikuti oleh pengembangan hukum.

Dalam situasi-situasi dinamis masyarakat selalu berubah. Masyarakat menghendaki perubahan pada semua aspek kehidupan. Oleh karena itu pemerintah membuat sasaran pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata.

Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana disebut di atas, syarat-syarat ekonomi yang primer masih amat tergantung kepada faktor-faktor sosial budaya. Salah satu sub sistem sosial budaya adalah hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat.

Penelitian Melalatoa (1985) tentang pengaruh faktor sosial budaya terhadap kemakmuran desa menyimpulkan bahwa faktor kepemimpinan desa baik yang formal maupun informal dan orientasi terhadap norma-norma adat merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Kesimpulan Mellatoa itu diperkuat oleh hasil studi Bank Dunia (World Bank) terhadap 57 proyek pembangunan yang menyimpulkan bahwa proyek-proyek yang berhasil adalah proyek yang cukup mempunyai sifat *socio-cultural compatibility*. Kompabilitas sosio kultural ini menuntut fleksibilitas struktur dan prosedur untuk dapat menyesuaikan dengan variasi lokal.⁶³

⁶³ . Budhisantoso, *op cit*, halaman 36

Antara hukum disatu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya dilain pihak terdapat kaitan yang erat.⁶⁴ Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁶⁵

Unsur-unsur sosio-kultural yang mempunyai dasar yang luas, dijunjung tinggi, dan bertahan bertahun-tahun seharusnya digunakan sebagai sarana penyampaian pesan pembangunan dengan menempatkannya dalam suatu kerangka struktur fungsional dan struktur (pranata) budaya yang ada. Itu berarti bahwa fungsi-fungsi struktur tradisional sebagai media budaya asli dan pesan pembangunan harus diupayakan saling menunjang. Untuk itu kebudayaan asli perlu diselidiki secara serius dalam usaha mengenali jaringan penyebaran yang ada dan mengaitkannya dengan pemecahan masalah pembangunan.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa lembaga tradisional masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan yang hidup dan terpelihara di masyarakat harus ditingkatkan dalam keterlibatan sosial masyarakat desa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Peran kebudayaan dalam pembangunan ditegaskan oleh Coletta (1987) yang

⁶⁴ Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 84.

⁶⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Halaman 8. Lihat juga Soeryono Soekantor, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, 1977, halaman 20.

mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan media yang memungkinkan pembangunan dapat berlangsung secara sukses. Hal ini menunjukkan bahwa fungsionalisasi lembaga-lembaga tradisional masyarakat secara tepat perlu diwujudkan secara maksimal untuk kepentingan keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

B. Kedudukan Hukum Adat di dalam Hukum Nasional Indonesia

Apabila kita berbicara mengenai hukum maka secara otomatis tidak dapat lepas dari penelaahan terhadap masyarakat sebagai adressat hukum, karena hukum merupakan suatu abstraksi nilai-nilai tentang hal-hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Oleh karena itu, hukum sebagai norma bertujuan untuk memberikan kesamaan pandangan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan, sehingga ada kedamaian hidup bermasyarakat dalam melakukan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dalam arti lain bahwa keberadaan hukum sebagai sarana untuk menjaga ketenteraman di dalam masyarakat.⁶⁶ Untuk mencapai tujuan menenteramkan masyarakat maka hukum melakukan pekerjaan dengan cara membatasi perilaku manusia

⁶⁶. Roescoe Pound. Diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara, Jakarta, 1989, halaman 35.

melalui norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat dapat kita pahami melalui adagium “dimana ada masyarakat disitu ada hukum,” sekalipun dalam masyarakat yang masih primitif. Hal ini menunjukkan bahwa manusia menghendaki adanya keteraturan dan ketertiban sehingga ada ketenteraman dan kedamaian. Hal yang demikian yang hanya mungkin dicapai dengan adanya aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan dan dilarangelakukan. Untuk menjamin larangan dan kewajiban itu maka diciptakan sanksi negatif berupa penderitaan atau perasaan tidak menyenangkan yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Misalnya dalam hukum adat dikenal hukuman “dera” yang dikenakan terhadap orang yang melakukan delik susila seperti melakukan zina.

Manusia mempunyai bermacam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat bagi manusia mempertahankan kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia saling berinteraksi dalam melakukan produktivitas. Manusia dalam berinteraksi cenderung menimbulkan konflik sehingga hukum diperlukan sebagai sarana penanggulangan kemungkinan terjadinya konflik dengan cara mengendalikan perilaku manusia melalui norma-norma hukum agar manusia mempunyai kesamaan pandangan tentang apa yang boleh, diharuskan, dan diwajibkan. Oleh sebab itu tidak keliru

pendapat yang mengatakan bahwa hukum berusaha untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian merupakan salah satu karakteristik yang melekat pada hukum sebagai sarana dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku semua orang. Hal ini sesuai dengan ungkapan *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang bermakna dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum.⁶⁷

Dalam ruang lingkup konsep kepastian hukum, Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi persoalan. Pertama persoalan mengenai hal-hal yang dapat ditentukan hukum secara konkret. Misalnya hukum dapat menentukan hal-hal apakah yang harus diketahui oleh pencari keadilan sebelum ia mengajukan perkaranya. Kedua, kepastian hukum dalam arti keamanan hukum yang menyangkut perlindungan bagi pihak-pihak terhadap kemungkinan kesewenangan hakim. hakim.⁶⁸ Nilai kemanfaatan dalam norma hukum sangat berguna, khususnya dalam norma hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi, apabila memang masyarakat merasakan manfaat yang diberikan hukum dalam membantu tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁹

⁶⁷ . Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. MHP-BPG. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 44.

⁶⁸ . L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, halaman 390.

⁶⁹ . Roscoe Pound, *op cit*, halaman 47.

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Nilai keadilan lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik. Sekalipun keadilan hukum bersifat abstrak, manusia selalu berjuang mendapatkan keadilan. Oleh karena keadilan hukum bersifat abstrak, maka orang-orang berusaha menafsirkannya sesuai tujuan masing-masing, sehingga keadilan hukum cenderung bersifat subyektif dan makin abstrak. Ketidaksamaan penafsiran keadilan yang bersifat abstrak itu menyebabkan sampai saat ini belum ada konsep keadilan yang utuh dan berlaku umum. Keadilan merupakan tujuan yang sesungguhnya yang hendak dicapai melalui fungsi hukum sebagai sarana pengayoman yang sampai kini terus menjadi tuntutan masyarakat, baik regional, nasional, maupun internasional. Oleh karena keadilan menjadi tujuan ideal yang hendak dicapai oleh hukum, maka hukum menciptakan kondisi yang mengharuskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Misalnya dalam penyelesaian tindak pidana, masalah keadilan tidak hanya tercermin melalui pemidanaan, tetapi harus tercermin dalam sikap tindak penegak hukum terhadap pencari keadilan melalui penyelenggaraan peradilan pidana. Sejak ditangkap seseorang tersangka/terdakwa harus diperlakukan oleh penegak hukum berdasarkan proses hukum yang adil (due process of law).

Aristoteles menjelaskan bahwa “adil” adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat (negara).⁷⁰ Keadilan dalam arti formal adalah keberadaan hukum yang berlaku umum, sedangkan

⁷⁰ J. Van Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988, halaman 27.

dalam arti material dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.⁷¹ Hal ini berarti bahwa hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dengan keadilan umum yang tidak dapat dipisahkan dari nilai etis untuk menumbuhkan kebaikan seseorang, masyarakat dan kebudayaan.

Frans Magnis Suseno⁷² membagi keadilan dua bagian yaitu :

Keadilan individual yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Keadilan sosial yaitu keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi.

Untuk menciptakan kondisi yang dianggap setiap orang telah diperlakukan adil sampai saat ini masih menjadi suatu harapan atau suatu yang dicita-citakan, karena realitas budaya penegakan hukum di negeri ini masih menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dengan yang diharapkan hukum. Di samping itu dalam hal-hal tertentu dapat pula kita pahami bahwa pada waktu dan tempat tertentu hal yang dianggap adil berbeda pada tempat dan waktu yang lainnya. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan adanya persamaan terhadap ide serta bentuk keadilan dalam suatu masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu, karena adanya

⁷¹ . Frans Magnis Suseno, *Etika Politik (prinsip-prinsip moral kenegaraan Modern)* Gramedia, Jakarta, halaman 81.

⁷² . Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta, halaman 44.

kecenderungan dan kemampuan serta pengetahuan yang berbeda diantara kelompok masyarakat. Gejala ini digambarkan oleh Genny yang membedakan unsur-unsur tetap dan unsur-unsur yang berubah-ubah dalam lingkup situasi hukum tertentu. Geny menyebut kedua perbedaan tersebut dengan istilah *Le donne rationale* dan *Le donne ideal*.⁷³ Variasi nilai dan bentuk penjelmaan ide keadilan dalam masyarakat tertentu dapat diperjelas dan dipahami dengan mengacu pada kerangka *Sibernetik* oleh Norert Weiner yang dipopulerkan oleh Talcott Parson dan dikembangkan lebih lanjut oleh Bredemeier).⁷⁴

Ada empat proses fungsional yang utama dalam suatu sistem sosial, yaitu: *adaptation*, *goal pursuance*, *pattern maintenance*, dan *integration*. Parsons menjelaskan bahwa yang dimaksud *adaption* adalah proses ekonomi; *goal pursuance* adalah proses politik atau mencapai tujuan; *pattern maintenance* diartikan sebagai proses sosialisasi dalam kebudayaan, sedangkan "*integration*" adalah proses hukum.⁷⁵

Berdasarkan acuan kerangka *Sibernetik*, maka masyarakat dapat kita pahami sebagai suatu sistem yang mempunyai sub-sub sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam kerangka seperti ini, maka hukum

⁷³. W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Telaah Kritis Asas-asas dan teori-teori Hukum), Susunan I, Rajawali Pres, Jakarta, 1990, halaman 133.

⁷⁴. Satjipto Rahardjo, *op cit*, halaman 39.

⁷⁵. Soerjono Soekanto, *op cit*, halaman 35.

merupakan bagian dari sub sistem politik yang mempunyai fungsi primer sebagai wahana untuk mencapai tujuan.

Hukum sebagai bagian dunia ide dan nilai dapat juga dilihat sebagai sistem harapan yang diartikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, sehingga berdasarkan kerangka *Sibernetik*, maka hukum merupakan hasil interaksi dan interdependensi antara sub sistem tersebut.

Bentuk hukum sebagai implementasi keadilan bergantung pada variasi intensitas dan dominasi sub sistem tertentu dalam suatu masyarakat dan dipengaruhi pula oleh sumber informasi (*ultimate reality*) sebagai arus atas yang mempengaruhi sub sistem bawahan (mulai sejak sub sistem budaya sampai pada sub sistem ekonomi). Sebaliknya masyarakat dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya (*bio physical environment*) sebagai arus bawah yang mempengaruhi sub sistem bawahan kepada sub sistem atasan (mulai sejak sub sistem ekonomi sampai kepada sub sistem budaya). Sistematisasi pemikiran dalam teori siberetik memberi pemahaman mengenai perbedaan bentuk hukum dan variasi nilai yang mempunyai perkaitan erat dengan ide keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum diantara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain pada suatu tempat dan waktu yang lain. Hal demikian dapat disebabkan oleh adanya sumber informasi lebih kuat mempengaruhi dan mendominasi sub sistem dalam masyarakat dan sebaliknya pada saat yang lain dan di tempat yang lain pula, sumberdaya sebagai arus bawah lebih kuat mempengaruhi dan mendominasi sub sistem masyarakat.

Perkembangan pemikiran hukum tidak lepas dari usaha untuk mencari dan menemukan hukum yang ideal. Oleh karena itu ada sebagian orang berkeyakinan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang berlaku universal. Gagasan ini lebih banyak didasarkan pada mashab hukum alam yang dipengaruhi gagasan tentang tatanan universal yang mengatur seluruh umat manusia dan gagasan tentang hak-hak dasar individu (hak-hak asasi manusia).⁷⁶

Khusus mengenai gagasan hukum alam yang berlaku universal, ada sebagian orang berkeyakinan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat tertentu. Gagasan ini memunculkan dua sisi perkembangan pemikiran hukum yang berbeda. Di satu sisi hukum yang ideal adalah hukum yang rasional dan universal yang menjadi ciri hukum modern, sedangkan di sisi lain terdapat realitas bahwa adakalanya hukum yang demikian itu justru menimbulkan ketidakadilan dan pertentangan pada masyarakat tertentu. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk mengembangkan hukum lokal yang lebih diyakini dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat tertentu, walaupun ada anggapan bahwa hukum seperti ini merupakan hukum yang tradisional dan intuitif.

Usaha untuk mempertahankan hukum lokal, yang dianggap sesuai dengan jiwa masyarakat (bangsa) telah diperkenalkan Von Savigny dalam tesis sebagai berikut:

Pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya adat istiadatnya, dan konstitusinya. Gejala seperti ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan

⁷⁶ . W. Friedmann, *op cit*, halaman 48-49.

kemampuan dan kecenderungan-kecenderungan dari masyarakat tertentu, disatukan secara tak terpisah dalam tabiat dan menurut pandangan kita mempunyai atribut yang jelas. Yang mengikat semua itu dalam satu keseluruhan adalah kesamaan pendirian dari rakyat. Kesadaran batiniah yang sama perlu untuk membuang pikiran tentang asal mula yang kebetulan dan tak pasti ... hukum berkembang dengan berkembangnya rakyat dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat dan akhirnya lenyap kalau rakyat kehilangan kebangsaannya ... maka inti teori ini adalah bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara, seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa, tetapi tidak teralu cepat, dibentuk, diyakini bahwa hukum, mulanya dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dari pembuat undang-undang.⁷⁷

Pemikiran Savigny tersebut dikembangkan dalam mazhab sejarah dengan ide utama bahwa hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum suatu bangsa (masyarakat), yakni: kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan terutama terhadap orang lain. Ini berarti bahwa kesadaran akan kewajiban hukum terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo seliro atau toleransi.⁷⁸

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagian tidak tertulis yang ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁷⁹ Keadaan hukum adat (hukum lokal) selalu dipertentangkan dengan Hukum Barat. Kombinasi antara

⁷⁷ W. Friedmann, *op cit*, halaman 60-61.

⁷⁸ Sudikno Martokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 3.

⁷⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, 1968, halaman, 16.

keduanya sering memberikan gejala penampakan yang berbeda pada masing-masing negara. Pertentangan antara hukum adat (*Customary Law*) dengan Hukum Barat (*Western Law*), biasanya menjadi sangat terasa pada negara-negara berkembang. Hal ini terjadi karena sebagian besar negara berkembang tersebut sebelum merdeka merupakan negara jajahan. Proses kolonialisasi meliputi pula bidang hukum yang berpengaruh terhadap hukum adat sebagai hukum asli suatu masyarakat, karena kaum kolonial memberlakukan hukum positif tertulis untuk kepentingan kaum penjajah, sehingga hukum adat dianggap sebagai lawan Hukum Barat (hukum tertulis). Hukum positif tertulis yang diterapkan kaum kolonial tentu saja ditentang oleh masyarakat pribumi, karena tidak sesuai dengan budaya pribumi.

Bagi bangsa Indonesia yang menjadi persoalan bukan masalah hukum tertulis dan tidak tertulis, karena bangsa Indonesia sesungguhnya dapat menerima keberadaan hukum positif tertulis. Keinginan bangsa Indonesia adalah hukum positif tertulis yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, bukan hukum tertulis yang diciptakan berdasarkan kebudayaan kolonial. Keinginan demikian dapat dipahami melalui Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang menghendaki bahwa hukum pidana nasional harus memperhatikan hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta keinginan yang mendasar dalam masyarakat yang beragam untuk menentukan prinsip hukum pidana Indonesia yang tepat. Sasaran ini bertujuan untuk menjamin keadilan hukum dan perasaan keadilan masyarakat Indonesia yang beragam.

Perjuangan untuk mempertahankan hukum adat sebagai sistem hukum Indonesia telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali dalam tulisan para sarjana Barat antara lain ditemukan dalam buku "*De Atjehers*" (1893-1894).⁸⁰ Hukum adat adalah padanan istilah *Adatrecht* yang lebih populer sejak terbitnya buku standard yang ditulis oleh van Vollenhoven yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlansch Indie* pada 1906. Di dalam buku tersebut terkumpul bahan-bahan keterangan tentang hukum adat yang dikutip dari seluruh perpustakaan tentang Indonesia.

Hukum adat lazimnya dipertentangkan dengan hukum modern atau peraturan tertulis (kondifikasi) atau diidentikkan dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan pola tingkah laku manusia, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Perbuatan demikian merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.⁸¹ Pada tingkat ini kebiasaan tersebut belum menjadi hukum tetapi masih bersifat norma atau kaidah yang bentuknya dapat berupa kesusilaan, sopan-santun, atau adat istiadat lainnya. Adat dapat diartikan pencerminan

⁸⁰ C. van Vollenhoven, *Orientasi dalam hukum adat Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1981, halaman 7.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Masalah kedudukan dan peranan hukum adat*, Academica, Jakarta, 1971, halaman 76.

kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa suatu bangsa dari abad ke abad.⁸²

Apabila adat telah disepakati untuk dipertahankan dengan jalan memberikan sanksi negatif kepada pelanggar dengan melibatkan seluruh warga masyarakat untuk menjalankan dan menegakkannya dan sanksi tersebut dapat dipaksakan keberlakuannya maka adat tersebut menjadi hukum adat. Biasanya masyarakat menentukan wakilnya dalam membentuk dan menegakkan hukum adat tersebut, wakil masyarakat di dalam masyarakat tersebut sebagai Fungsionaris Adat.

Pergerakan mempertahankan hukum adat, dimulai jauh sejak Indonesia belum menyatakan Proklamasi kemerdekaan. Di antara tahun 1870-1900 muncul berbagai pihak yang mengkehendaki agar bagi golongan pribumi dilakukan pula kodifikasi hukum adat. Gagasan tersebut terjadi pada tahun 1900 ketika Menteri Jajahan Belanda Cremer memerintahkan kepada Mr. Carpentier Alting untuk memeriksa kemungkinan melaksanakan kodifikasi hukum adat di daerah Minahasa yang bersifat lokal dalam rangka kodifikasi hukum adat di seluruh daerah Indonesia. Alting berhasil membuat peraturan hukum perdata untuk pribumi di daerah Minahasa Keresidenan Manado. Namun hasil kerja Alting tersebut tidak diterima, karena bagian terbesar dari kodifikasi itu berdasarkan sistem hukum Eropa. Pada tahun 1930 diadakan perubahan politik hukum adat yang baru dengan melakukan

⁸². Soerojo Wignjodipoero, *op cit*, halaman 13.

peningkatan penelitian untuk menjajaki kemungkinan melakukan kodifikasi hukum adat. Namun sampai sekarang usaha kearah kodifikasi itu hanya merupakan harapan.

Gagasan kodifikasi hukum adat sesungguhnya didasarkan pada pengakuan kolonial Belanda terhadap kedudukan hukum adat sebagai sistem hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Pengakuan kolonial Belanda secara yuridis dirumuskan dalam Pasal 11 *Algemene Bepaligen Van Wetgeving voor* Indonesia (ketentuan-ketentuan umum bagi perundang-undangan Indonesia).⁸³ Rumusan Pasal 11 AB kemudian diadopsi "*Regering Reglement Baru*" yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920.⁸⁴ Selain itu pengakuan terhadap hukum adat terdapat pula dalam rumusan Pasal 131 (*Indische Staatsregeling*) yang berlaku sejak 1 Januari 1926.

Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa menjelang runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dalam perang dunia kedua, bangsa Indonesia mewarisi dua konsep hukum adat, yaitu⁸⁵:

Pertama, konsep hukum adat dari pemerintahan kolonial yang dituangkan dalam Pasal 131 ayat 2 b IS yang ditujukan kepada pembentuk perundangan negara, dan
Kedua, konsep hukum dari Kongres pemuda Indonesia, yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan bangsa.

⁸³ . *Ibid*, halaman 48.

⁸⁴ . *Ibid*, halaman 55.

⁸⁵ . Hilman Hadikusumah, *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia* , Mandar maju, Bandung, 1992, halaman 95.

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka hukum adat tetap berlaku. Pengakuan keberlakuan hukum adat tercantum dalam makna rumusan Pasal II Aturan Peralihan UUD 45 yang menyatakan: *segala Badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini*. Rumusan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 merujuk peraturan-peraturan yang pernah berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda termasuk ketentuan dalam rumusan Pasal 11 AB, dan Pasal 131 IS.

Azas-azas serta lembaga-lembaga hukum adat yang dalam kenyataan kini masih hidup dengan suburnya di dalam kehidupan rakyat sehari-hari dipelbagai daerah di seluruh nusantara ini, perkembangan dan pembinaannya wajib diarahkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia masa kini dan masa mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasrakan Pancasila dan UUD 1945.⁸⁶

Keberlakuan hukum adat di Indonesia menimbulkan beragam perbedaan pendapat. H.M. Hidjazie Kartawidjaja mengemukakan bahwa ada tiga pendapat para Sarjana Hukum mengenai keberadaan hukum adat di Indonesia, yaitu :

1. Tidak sedikit di antara para Sarjana Hukum Indonesia berpendapat bahwa hukum adat (baca : *Adatrecht*) yang hidup dan berlaku pada zaman kolonial Belanda dahulu, setelah

⁸⁶. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, 1982, halaman 36.

Indonesia menjadi bangsa yang merdeka (bukan golongan pribumi lagi), tidak ada tempat berpijak lagi di negara kita bagi suatu sistem hukum yang bentuknya tidak tertulis, yang sifatnya statis (tegar) serta tradisional. Dengan kata lain, hukum adat hanya cocok bagi masyarakat priinitif seperti golongan pribumi pada zaman penjajahan dahulu.

2. Terdapat pula pandangan para Sarjana Hukum Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku pada zaman lampau telah dijadikan dasar atau landasan bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Dengan demikian maka hukum adat yang berlaku pada zaman kolonial dahulu, dewasa ini telah berintegrasi dalam hukum nasional Indonesia.
3. Adapula Sarjana Hukum Indonesia yang berpendapat bahwa di negara kita dewasa ini berlaku hukum adat sebagai warisan atau kelanjutan dari hukum adat pada masa lampau, yang sistem maupun asas-asasnya tidak berbeda dengan sistem dan asas hukum adat masa lampau. Hukum adat yang berlaku di negara kita dewasa ini, disebutnya sebagai Hukum Nasional Indonesia. Pendapat terakhir ini, adalah pendirian dari BPHN maupun dari kalangan Fakultas Hukum yang ada di negara kita.⁸⁷

Apabila kita perhatikan tiga pandangan di atas, maka dapat dikemukakan suatu pemahaman bahwa perbedaan pandangan para Sarjana Hukum terhadap hukum adat yang berlaku saat ini disebabkan kekurang-cermatan para Sarjana Hukum di Indonesia melihat dan memahami keberadaan dan perkembangan hukum adat yang seharusnya berlaku di negara kita. Padahal pengakuan terhadap berlakunya hukum adat di berbagai peraturan perundang-undangan sudah ada, meskipun ada dari peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku lagi.

⁸⁷. H.M. Hidjazie Kartawidjaja, *Eksistensi dan kedudukan hukum adat tanah dalam hukum Agraria Nasional Indonesia*, Akademi Agraria, Jogjakarta, 1984, halaman 21.

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum adat dapat kita cermati dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1. Konstitusi RIS

Pada Pasal 146 ayat 1 menetapkan bahwa segala Keputusan Kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

2. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Pasal 104 ayat 1 menegaskan kembali apa yang tercantum pada Pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS yaitu bahwa segala Keputusan Pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

3. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960

Pada Keteapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 memuat garis-garis politik di bidang hukum sebagai berikut :

- (a). Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

- (b). Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
- (c). Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.

Berpedoman pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Moh. Koesnoe memberi komentar sebagai berikut:⁸⁸

- a. Bahwa hukum adat tidak lagi dinyatakan sebagai hukum golongan yang lambat laun harus hilang karena tertuang dalam kodifikasi dan undang-undang. Hukum adat dengan ketentuan tersebut merupakan landasan, dasar susunan dan sumber hukum nasional. Dengan perkataan lain hukum adat bukan hanya sebagian hukum nasional, tetapi adalah hukum nasional Indonesia.
- b. Bahwa pengertian hukum adat tidak akan lagi dapat mengikuti pengertian-pengertian yang diterima pada waktu sebelum perang dunia kedua dengan ciri-cirinya yang diketahui pada waktu itu.
- c. Bahwa akibat perubahan kedudukan di atas, yaitu berubah pula isinya dan berubahnya pula lingkungan kuasanya atas orang dan ruang. Hukum adat tidak lagi dapat dihubungkan dengan satu niveau yang lebih tinggi dan abstrak.

4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 5 dikatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,

⁸⁸ . Hadikusumah, *op cit*, halaman 101.

5. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pada Pasal 20 ayat 1 mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat.

6. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁸⁹

Pada Pasal 27 ayat 1 ditegaskan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan Umum butir 7 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dinyatakan:

Penegasan bahwa peradilan adalah Peradilan Negara dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi Peradilan-Peradilan Swapraja atau Peradilan Adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penetrapan hukum itu kepada Peradilan-Peradilan Negara. Dengan ketentuan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dari penetrapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.

Pembahasan mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum nasional Indonesia sebenarnya telah banyak diungkapkan para Sarjana Hukum di

⁸⁹. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia, baik melalui forum seminar-seminar Hukum Nasional maupun melalui penulisan-penulisan karya ilmiah. Hal dimaksud dapat dicermati melalui temu ilmiah dalam seminar hukum nasional sebagai berikut:

1. Seminar Hukum Nasional I

Seminar Hukum Nasional I di Jakarta tanggal 11-16 Maret 1963 melaporkan kesimpulan antara lain bahwa "Selain hukum tertulis diakui berlaku hukum tidak tertulis sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia".⁹⁰

2. Seminar Hukum Nasional II

Seminar Hukum Nasional II yang diselenggarakan di Surabaya tanggal 11-15 Maret 1974 antara lain melaporkan kesimpulan bahwa Pembinaan Hukum Nasional harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).⁹¹

3. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tanggal 15-17 Januari 1975 di Jogjakarta kesimpulannya antara lain :

⁹⁰ . Abdurrahman, *Perkembangan pemikiran tentang pembinaan hukum nasional Indonesia*, Akademika. Pressindo, Jakarta, 1988, halaman 95.

⁹¹ . *Ibid*, halaman 98.

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju pada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan hukum.
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya seperti :
 - a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia ;
 - c. Memasukan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional, merupakan intinya.
4. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.⁹²

5. Seminar Hukum Nasional IV

Seminar Hukum Nasional IV di Jakarta pada tanggal 26-30 Maret 1979 menghasilkan kesimpulan antara lain menegaskan bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan

⁹² . *Ibid*, halaman 77.

kepastian hukum untuk memperlancar pembangunan nasional, hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional.⁹³

Dalam ruang lingkup keberadaan hukum adat dan sumber hukum pembangunan hukum nasional Indonesia, Soepomo menegaskan sebagai berikut:⁹⁴

- a. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai rakyat Indonesia.
- b. Bahwa hukum pidana dari sesuatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka hukum adat pidana akan memberi bahan-bahan yang berharga dalam pembentukan KUH Pidana baru untuk negara kita.
- c. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum/tidak ditetapkan oleh undang-undang.

Khusus mengenai eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional Lebih lanjut mengatakan, Soepomo menegaskan bahwa peranan Hukum adat dalam sistem hukum nasional yang akan datang ternyata masih penting pula. Hukum adat yang bersumber kepada kebudayaan tradisional serta kesadaran hukum rakyat ternyata merupakan unsur yang esensiil dalam pembanguan hukum nasional.⁹⁵

Hukum adat yang dipakai sebagai azas-azas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹⁶

⁹³ . *Ibid*, halaman 78.

⁹⁴ . Soerojo Wignjodipoero, *op cit*, halaman 65.

⁹⁵ . *Ibid*, halaman 66.

⁹⁶ . IGN, Sugangga, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, 1999, halaman 16.

1. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
2. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila;
3. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan tertulis (Undang-undang);
4. Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapitalisme, serta pengisapan manusia atas manusia;
5. Hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.

H.M. Hidjazie Kartawidjaja dalam makalah yang berjudul *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat Tanah Dalam Hukum Agraria Nasional Indonesia*, yang disampaikan dalam Diskusi Panel Agraria Nasional Akademi Agraria Jogjakarta tahun 1984 mengatakan:⁹⁷

Sejalan dan sesuai dengan kedudukan serta hubungan antara hukum Dasar yang tidak tertulis (Konvensi) dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Hukum Dasar Tertulis), maka hukum adat versi baru mempunyai kedudukan sebagai pendamping dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Selain dari itu, juga berkedudukan sebagai pelengkap dan mengisi kekosongan yang terdapat dalam Undang-Undang (baca : Hukum Tertulis) yang bersangkutan.

Pendapat lain dikemukakan A. Hamid S. Attamimi dalam makalah Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Ke VI tanggal 25-29 Juli 1995 di Jakarta mengatakan:⁹⁸

Dalam membicarakan Peraturan Perundang-undangan Indonesia haruslah senantiasa dipraktikkan, bahwa disamping hukum yang

⁹⁷ H.M. Hidjazie Kartawidjaja, *op cit*, halaman 27.

⁹⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Pengembangan hukum tertulis peraturan perundang-undangan Indonesia*, makalah, Seminar Hukum Nasional ke VI, Jakarta, 1995, halaman, 12.

tertulis ada hukum yang tidak tertulis. Keduanya saling mengisi dan saling melengkapi meskipun hukum tertulis memperoleh “keutamaan” dari pada hukum tidak tertulis.

Herman Sihombing yang bertindak sebagai pembahas makalah yang berjudul *Hukum Kebiasaan selaku sumber Hukum Nasional* pada Seminar Hukum Nasional ke VI tanggal 25-29 Juli 1995 di Jakarta, mengatakan:⁹⁹

“..... untuk diturunkan menjadi kaidah hukum positif dalam segala bidang dan sektor, maka oleh karena itu saya kemukakan, bahwa sesungguhnya hukum kebiasaan itu adalah sumber hukum nasional dalam segala bidang dan sektor menurut kebutuhan masyarakat.

Berhubungan dengan eksistensi hukum adat, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga alasan untuk mempelajari hukum pidana dari sudut hukum yang hidup di dalam masyarakat, yaitu:¹⁰⁰

Pertama, kalau Pendidikan Tinggi (Fakultas) “Hukum” tidak mau disebut Fakultas Undang-Undang, maka yang dipelajari seyogyanya tidak hanya hukum tertulis (UU) tetapi juga hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Kedua, sebagai suatu lembaga ilmiah yang objektif seyogyanya Fakultas Hukum juga mempelajari konsep/sistem hukum (pidana) dari berbagai keluarga hukum. Jadi tidak hanya berorientasi pada KUHP (WvS) yang termasuk “*Civil Law System*” (“*the Romano-Germanic Family*”), tetapi juga dapat “menoleh” atau berorientasi pada keluarga hukum lain yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia, yaitu keluarga hukum tradisional dan hukum agama.

⁹⁹. Herman Sihombing, *Pengembangan Hukum Kebiasaan*, Makalah Seminar Hukum Nasional ke VI, Jakarta, 1995, halaman 4.

¹⁰⁰. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, halaman, 24.

Ketiga, berhubungan dengan perkembangan Konsep KUHP Baru yang memperluas perumusan asas legalitas di dalam Pasal 1 (1) KUHP secara materiil dengan menegaskan, bahwa ketentuan dalam Pasal 1(1) itu tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Ini berarti perlu dipersiapkan “generasi baru” yang diharapkan mengetahui dan memakai seluk beluk hukum yang hidup di dalam masyarakat (baik sistem nilainya, asas-asasnya, maupun norma-normanya, dsbnya).

Pengakuan dan pengembangan hukum adat walaupun telah ditempatkan di dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan ternyata masih sulit direalisasikan. Hal ini disebabkan kesulitan dalam melakukan perubahan undang-undang, karena pembuatan undang-undang bukan hanya persoalan juridis semata-mata. Di lain pihak perkembangan kesadaran hukum masyarakat dan kepentingan manusia cepat berubah.

Sarana lain yang tidak kalah penting artinya bagi perkembangan hukum Indonesia adalah perkembangan hukum melalui putusan pengadilan, sekalipun dalam peradilan di Indonesia tidak mengenal asas preseden seperti yang ada di negara-negara yang termasuk tradisi *Common Law*. Kedudukan yurisprudensi di dalam hirarki sumber hukum Indonesia walaupun tidak tegas mengikat hakim dalam menentukan keputusan, namun keputusan hakim terdahulu merupakan pertimbangan moral yang penting bagi hakim dalam menentukan putusan pengadilan.

Yurisprudensi secara teoritis banyak berpengaruh di lingkungan fungsionaris hukum adat dalam mengembangkan hukum. Di dalam memutus suatu perkara, fungsionaris adat dapat menyelesaikan perkara berdasarkan putusan adat yang pernah dilakukan oleh pendahulunya. Sebaliknya bila ia

menganggap bahwa perkara tersebut menunjukkan hal-hal yang baru atau situasi dan kondisi masyarakat saat ini menghendaki solusi yang baru, maka fungsionaris adat tersebut dapat mengesampingkan keputusan pendahulunya.

Pengakuan hukum adat sebagai hukum pidana positif di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu yang ada padanannya dalam KUHP dan yang tidak mempunyai padanannya dalam KUHP. Dua kategori tersebut dapat dicermati dan dipahami melalui putusan Makamah Agung tanggal 19 November 1977 No. 93/K/Kr/1976¹⁰¹ terhadap putusan pokok perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kasus persetujuan atau perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan yang dilakukan Zainabun binti Muhammad dengan Hasyim bin Hamzah yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan zinah sebagai perbuatan yang melanggar rumusan Pasal 284 jo Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951. Sedangkan untuk hukum adat yang dianggap tidak mempunyai padanannya di dalam KUHP tercermin dalam putusan Makamah Agung tanggal 8 Oktober 1979 No. 195 /k/Kr/1978 yang mengangkat hukum adat Bali *Lokika Sanggraha* jo Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951¹⁰² sebagai hukum pidana positif. Putusan tersebut secara konsisten dipertahankan Makamah Agung dengan putusan serupa, yaitu putusan tanggal 28 Februari 1985 Reg. No, 666 K/Pid/1984, yang pada pokok perkara dinyatakan bahwa terdakwa (Arifin Lagonah) bersalah telah

¹⁰¹ . Makamah Agung, *Yurisprudensi Indonesia*, 1978, halaman 16-28.

¹⁰² . Makamah Agung, *Yurisprudensi Indonesia*, Jilid II, 1979, halaman 90-93.

melakukan delik adat zinah di daerah Pengadilan Negeri Luwuk, Sulawesi Tengah.

C. Keberadaan Hukum Adat Rejang dalam Hukum Nasional Indonesia

Keberadaan hukum adat di tanah air telah ada dan diakui dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengakuan terhadap hukum adat di dalam sistem hukum nasional ditujukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum tertulis.

Hukum adat Rejang adalah suatu contoh keragaman hukum adat di Indonesia yang hidup dan berlaku bagi suku bangsa Rejang. Suku bangsa Rejang umumnya berdomisili di wilayah pegunungan seperti Kepahiang, Curup, Lebong, dan Padang Ulak Tanding yang saat ini menjadi bagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Sebelum menjadi bagian Propinsi Bengkulu wilayah tersebut menjadi bagian wilayah Kesultanan Palembang berdasarkan keputusan pemerintah kolonial Belanda dalam S. 1860-30a tanggal 6 Juni 1861-14.¹⁰³ Pada tahun 1904 berdasarkan Keputusan Pemerintah Jajahan Belanda No. 20 (S. 1904-118) tanggal 6 Februari 1904, wilayah suku Rejang menjadi bagian dari wilayah Keresidenan Bengkulu.¹⁰⁴

Asal mula suku bangsa Rejang dapat diketahui berdasarkan tulisan William Marsden dalam buku "*History of Sumatera*" pada tahun 1783.

¹⁰³ . Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, halaman 90.

¹⁰⁴ . *Ibid*, halaman 91.

Marsden yang pernah menjabat wakil pemerintah kolonial Inggris untuk wilayah Sumatera yang berkedudukan di Bengkulu ternyata mempunyai perhatian besar terhadap suku bangsa Rejang. Hal ini terbukti melalui tulisan Marsden mengenai kebudayaan, kebiasaan dan hukum adat rejang. Khusus mengenai sejarah suku bangsa Rejang, Marsden menyatakan melalui tulisan sebagai berikut:

The Rejangs are distinguished in to tribe, the defendants of different pooyang or ancestor of these there are four principal tribes, Joorcalang, Bermanie, Seloopo and Toobye; said to drive their origin from for brothers, and to have been united from time immemorial in language of offensif and deffensive; the permency however of this bond, maybe conjectured to have been owing to the expediency resulting from their situation, rather than their consanguity, or any formal compact. Their also several inferior tribes.¹⁰⁵

Di dalam bahasa Rejang kesatuan masyarakat yang disebut oleh Marsden sebagai “*Tribes*” itu adalah *Petulai*. Keempat *Petulai* berasal dari satu keturunan yang ditarik secara unilateral jalur orang tua laki-laki (*patrilineal*) yang mempunyai pusat wilayah yang berbeda yaitu :

1. *Tubei* berpusat di Palabaai di Lebong
2. *Jurukalang* berpusat di Suka Negeri di wilayah Lebong
3. *Selupu* berpusat di Batu Lebar (Kesambe) di Curup
4. *Bermani* di Kutei Rukam

¹⁰⁵ . William Marsden, *History of Sumatera*, Bandung, 1783, MDCCXXXIII, halaman 178.

Keempat *Petulai* tersebut kemudian menyebar dan mengembangkan keluar daerah yakni yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian menyebar ke arah pesisir (Bengkulu Utara) dan wilayah Kotamadia Bengkulu. Sedangkan ke arah Timur, keempat *Petulai* menyebar ke arah Padang Ulak Tanding, Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Lahat di Daerah Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kesatuan masyarakat di tempat-tempat baru tersebut tetap mempunyai keterikatan emosional pada *Petulai* asalnya. Artinya, mereka yang berasal dari *Petulai* Bermani akan merasa dan terikat sebagai warga Bermani dimanapun mereka berada, sekalipun sesungguhnya mereka telah membentuk suku baru sebagai pecahan *Petulai* asal. Saat ini suku bangsa Rejang yang mendiami wilayah tertentu mendapat sebutan baru, yaitu :

Suku bangsa Rejang yang mendiami *onderafdeling* Lebong dalam jaman pemerintahan jajahan Belanda dinamai Rejang Lebong, yang mendiami *onderafdeling* Rejang dinamai Rejang Musi dan Rejang Lembak ; yang mendiami *onderafdeling* Bengkulu dinamai Rejang Pesisir dan yang mendiami *onderefdeling* Tebing Tinggi dinamakan Rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas.¹⁰⁶

Hukum adat Rejang seperti hukum adat lainnya, mempunyai ciri khas dan kekhususan sebagai penjelmaan nilai-nilai dan keyakinan pandangan hidup pada masyarakat suku bangsa Rejang. Karakteristik demikian didasarkan pada corak hukum adat Indonesia yakni tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan

¹⁰⁶ . Abdullah Siddik, *op cit*, halaman 32.

menyesuaikan, tidak menganut kodifikasi, dan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat.¹⁰⁷

Kedelapan corak hukum adat di Indonesia yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusumah tersebut secara sederhana dapat dipahami melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Keagamaan

Hukum adat pada umumnya bersifat keagamaan (*Magis Religius*) yang mempunyai makna bahwa perilaku umumnya atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.

¹⁰⁷ . Hilman Hadikusumah, *op cit*, halaman 32-34.

4. Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah “konkret” artinya jelas, nyata, berwujud dan “visual” dalam arti dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

5. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu “terbuka” artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sifat “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat sesungguhnya bukan merupakan suatu aturan yang kaku, karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan sesuai dengan waktu dan tempat serta dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat .

7. Tidak dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasikan seperti hukum barat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan.

8. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan dan ketatanegaraan. Prinsip musyawarah dan mufakat digunakan dan diterapkan dalam memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan. Terlebih lagi dalam menyelenggarakan “peradilan” untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian perselisihan selalu mengutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai yang didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat.

IGN. Sugangga memberikan nilai-nilai universal yang dimiliki hukum adat adalah :¹⁰⁸

1. Asas gotong royong
2. Asas fungsional manusia dan milik dalam masyarakat
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

Corak hukum adat yang telah dijelaskan diatas berlaku juga bagi masyarakat suku bangsa Rejang. Pengorganisasian kebersamaan di dalam masyarakat memerlukan simbol untuk dapat tetap mempertahankan kebersamaan tersebut. Simbol tersebut dapat saja berbentuk manusia yang dipercayakan masyarakat karena dianggap atau dinilai memiliki kemampuan mempertahankan kebersamaan. Orang yang menjadi simbol tersebut

¹⁰⁸ IGN. Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Universitas Diponegoro Semarang, 1994, halaman 85.

dijadikan tokoh yang diakui dan dipercaya dapat mempertahankan kebersamaan dan menghindari serta menyelesaikan konflik yang terjadi, biasanya dikenal sebagai fungsionaris adat. Fungsionaris adat selalu berada bersama-sama dengan masyarakatnya. Namun dalam hal masyarakatnya telah tersebar ke beberapa wilayah lain yang tidak mungkin diikuti oleh fungsionaris adat, maka ditunjuklah wakil sebagai pengganti fungsionaris adat. Penggantian demikian tidak mencakup semua urusan, karena hanya dalam hal tertentu saja wakil fungsionaris adat dapat bertindak. Sedangkan hal-hal lain yang dianggap penting tetap diserahkan pada fungsionaris adat.

Para fungsionaris adat mempunyai peran yang besar dalam menciptakan dan mempertahankan hukum adat Rejang. Mengenai peran fungsionaris adat, William Marsden menulis sebagai berikut:

The law and custom of the Rejang, hitherto preserved by tradition, are now, after being discussed, amended, and ratified in assembly of the Pangeran, Pembarabs, and Proateens, committed to writing, in order that they may not be liable to alteration; that justice may be regularly and impartially administered; that those deserving death or fine may meet their reward; that causes may be brought before the proper judges, and due amends made for insults; that the compensations for murder may be fully paid; that the property that gifts may become the undoubted property of the receiver; that debts may be paid and credit received, agreeably, to the customs that have been ever in force, beneath the heaven and on the face of the earth, by the observance of the law, a country is made to flourish, and where they are neglected or violated ruin ensues.¹⁰⁹

¹⁰⁹ . William Marsden, *op cit*, halaman 185-186.

Persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan bersama berpotensi menimbulkan konflik, karena hal-hal yang dianggap buruk belum tentu buruk bagi orang lain. Sebaliknya apa yang dianggap baik belum tentu baik bagi orang lain. Oleh karena itu yang perlu disikapi adalah bagaimana mencegah konflik dan dalam hal terjadi konflik bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik ditujukan untuk mengembalikan ketentraman dan keseimbangan di dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa penyelesaian tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada orang-orang yang terlibat, tetapi kepada seluruh masyarakat dan lingkungan yang lebih luas, sehingga diharapkan tidak akan menyebabkan timbulnya persoalan lain.

Ada beberapa sarjana yang telah berhasil mengamati dan menginventarisasikan ketentuan dan norma hukum Adat Rejang. Misalnya William Marsden berhasil menginventarisasikan masalah-masalah warisan, orang dibawah pengampuan, pencurian, pembunuhan, hutang piutang, perkawinan, hasil hutan, dan tanah. Pengamat lain adalah Hazairin yang menuangkan hasil penelitian dalam bentuk disertasi yang berjudul "*De Rejang*" pada tahun 1939. Dalam disertasi Hazairin berhasil mengklasifikasikan dan menginventarisasikan norma dan ketentuan hukum adat Rejang tentang Perkawinan.¹¹⁰

¹¹⁰ . Hazairin, *De Rejang*, AC NIX & Co, Bandung, 1939, MCMXXXVI.

Putra Bengkulu selain Hazairin tercatat pula karya penelitian Abdullah Siddik yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang berjudul "Hukum Adat Rejang" pada tahun 1977. Dalam buku tersebut Abdullah Siddik membahas hal-hal yang berhubungan dengan adat Rejang, yaitu hukum tanah, perjanjian mengenai tanah, hukum perkawinan, dan hukum waris.

Pada dasarnya hukum adat Rejang, seperti halnya hukum adat lainnya di Indonesia tidaklah mengadakan pemisahan secara tegas antara hukum privat dan hukum publik seperti dalam sistem hukum barat. Perbedaan yang terdapat di dalam karya-karya hukum adat tidak lebih sebagai alat untuk mempermudah penelaahan. Oleh karena itu perlu dijelaskan hukum adat berdasarkan salah satu sudut pendekatan seperti yang berhubungan dengan bidang hukum publik, misalnya hukum pidana. Seluruh aturan dan norma didalam hukum Adat Rejang merupakan satu kesatuan yang ditujukan untuk kepentingan hidup bersama.

D. Peranan Lembaga Adat Tradisional *Kutei* dalam Penyelesaian Konflik

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berinteraksi dan berantaraksi untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-masing yang secara empiris tidak senantiasa sama, sehingga dibutuhkan aturan-aturan yang membatasi kebebasan manusia dalam berperilaku. Untuk menjamin norma-norma berperilaku maka sanksi negatif dalam hukum adat diperlukan agar warga masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku. Namun

kenyataan pula menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat tetap terjadi, baik yang bersifat kriminal maupun non-kriminal, sehingga penyelesaian berdasarkan hukum adat perlu ditegakkan oleh fungsionaris adat.

I Made Widnyana menulis bahwa konflik adat yang bersifat kriminal yang sering terjadi dalam masyarakat antara lain seperti pencurian benda-benda suci, delik kesusilaan (*lokika sanggraha*, *amandel sanggama*, *gamia gemana*, *drati krama*) dan delik penghinaan (*wakparusya*). Disamping itu ada pula konflik yang bersifat adat murni seperti *manak salah*, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban adat serta perbuatan-perbuatan lainnya.¹¹¹ Konflik yang timbul biasanya didasarkan pada alasan dan sebab tertentu akibat aktivitas antaraksi dalam masyarakat dan lingkungan sehari-hari dalam skala yang lebih luas. Pokok perkara yang menjadi sebab perselisihan tersebut tentunya dari waktu ke waktu berkembang dan bertambah kompleks.

Di dalam hukum adat Rejang penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan prosedur tertentu. Penyelesaian konflik dilakukan melalui suatu lembaga adat tradisional yang disebut "*Kutei*". *Kutei* berasal dari perkataan Hindu yaitu "*Kuta*" yang berarti dusun yang berdiri sendiri.¹¹² Abdullah Siddik mengartikan istilah *Kutei* sebagai masyarakat hukum adat asli Rejang yang berdiri sendiri, genealogis dan tempat berdiamnya jurai-jurai.¹¹³

¹¹¹ . I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung, 1993, halaman 107.

¹¹² . Abdullah Siddik, *op cit*, halaman 104.

¹¹³ . *Ibid*, halaman 109.

Pendapat lain dikemukakan Abdullah Sani bahwa arti *Kutei* berbeda dengan dusun. Dusun adalah wadah/tempat, sedangkan *Kutei* adalah perangkat dusun yang didalamnya ada beberapa orang ketua *Kutei*, tua suku, cerdik cendikio, tua-tua jurai, dan alim ulama.¹¹⁴ Perasaan *Kutei* artinya sudah dimufakati oleh tua-tua, alim ulama, cerdik pandai, tua-tua suku, ketua adat dan sebagainya¹¹⁵ merupakan contoh suatu tindakan hasil kerja lembaga *Kutei* dalam arti perangkat dusun.

Lembaga adat *Kutei* biasanya dipimpin oleh seorang Ginde/Depati (sekarang Kepala Desa) yang didampingi beberapa anggota seperti unsur alim ulama, tua-tua suku cerdik pandai, tua jurai dan lain-lain anggota yang dianggap penting dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Lembaga adat *Kutei* bekerja untuk masyarakat Rejang dalam hal-hal penyelesaian konflik, perkawinan, pembangunan desa dan sebagainya. Dengan perkataan lain bahwa pekerjaan lembaga *Kutei* mencakup semua pekerjaan dalam desa, baik hal-hal yang bersifat peristiwa baik maupun peristiwa buruk. Semua pekerjaan tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat rejang.

Pelaksanaan kegiatan Lembaga adat *Kutei* didasarkan pada norma-norma adat yang berlaku bagi masyarakat Rejang yang tercantum dalam *Undang-undang Simbur Cahaya*. Undang-undang adat lembaga ini merupakan aturan yang lebih bersifat sosiologis, karena mengatur mengenai :

¹¹⁴ . Abdullah Sani, *Jurai Adat Rejang*, Curup, 1983, halaman 13.

¹¹⁵ . *Ibid*, halaman 13.

(1) adat bujang gadis dan kawin; (2) aturan marga; (3) aturan dusun dan berladang; (4) aturan kaum; (5) adat perhukuman; (6) aturan pajak.¹¹⁶

Norma-norma adat yang ada di dalam undang-undang *Simbur Cahaya* tersebut tetap dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat Rejang. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Simbur Cahaya* dijadikan dasar bertindak. Namun demikian, penerapannya tidak bersifat kaku karena aturan-aturan yang ada disesuaikan dengan keadaan perkembangan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini William Marsden menyatakan :¹¹⁷

They are governed in their various disputes, by a set of long established custom (adat), handed down to them from their ancestors, their authority of which is founded on usage and general consent. The chiefs, in pronouncing their decisions, are not heard to say, "so the laws directs" but, such is the custom". It is true, that if any case arises, for which there is no precedent on record (of memory), they deliberate and agree on some mode, that shall serve as rule in future similar circumstance. If the affair be trifling, this is sheldom objected to, but when it is a matter of cosequence the pangeran, or calippah, consults, with the proateens, or lower order of chiefs, who frequently desire time to consider of it, and consult with the inhabitants of their dooson. When the point is thus determined, the people voluntary submit to observe it as an established custom; but they do not acknowledge a right in the chiefs, to constitute what law think or oper, or to repeal or alter their ancient usages.

Norma-norma adat yang ada dalam undang-undang *Simbur Cahaya* hanyalah merupakan norma-norma dasar (pokok) untuk masyarakat dalam

¹¹⁶. Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga*, dari sembilan Onderafdeelingen *Dalam Gewest Bengkoelen*, Sriwijaya Media Utama, Palembang, 1938. Kemudian dicetak dan diperbaharui dengan ejaan yang telah disempurnakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985, dengan judul *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga* dari sembilan Onderafdeeling dalam Keresidenan Bengkulu, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1985, halaman 251.

¹¹⁷. William Marsden, *op cit*, halaman 184.

bertingkah laku, sedangkan di dalam praktik pelaksanaannya bisa berkembang sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan.

Sehubungan dengan sifat keterbukaan, maka pelanggaran-pelanggaran di dalam delik adat tidak ditulis secara rinci ada dalam undang-undang tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum delik adat pada umumnya yang tidak menganut sistem "*Pre-existente regels*" yang berarti tidak menganut sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu, karena hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Pemahaman mengenai hal tersebut diungkapkan oleh Soepomo dalam tulisan seperti berikut:

Seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang, dan apa yang diperbolehkan. Tiap-tiap perubahan atau situasi yang tidak selaras dengan atau yang memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan teman semasyarakat (anggota famili dan sebagainya), dapat merupakan pelanggaran hukum. Bahwa suatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu saat dapat dianggap oleh Ketua adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikain rupa, sehingga dianggap perlu upaya (reaksi adat) guna memperbaiki kembali hukum.¹¹⁸

Sifat keterbukaan di dalam pelanggaran adat sesungguhnya didasarkan pada alasan keterbatasan kemampuan manusia meramalkan atau memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, ketentuan hukum adat tidak bersifat pasti, sehingga sifat ketentuan dalam hukum adat selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Dalam hukum adat yang penting dijadikan ukuran adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan

¹¹⁸. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Universitas Jakarta, 1963, halaman 94.

perkembangan keadaan, waktu dan tempat. Mengenai hal ini dapat dipahami pula melalui tulisan Hilman Hadikusumah sebagai berikut:

Bahwa sistem pelanggaran yang dianut hukum delik adat adalah terbuka tidak tertutup seperti hukum pidana barat yang terikat pada suatu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP, oleh karena apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum adat akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan hidup seluruhnya. Segala sesuatu yang terjadi dapat saja merupakan pelanggaran apabila perbuatan itu tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat.¹¹⁹

Kemudian mengenai jenis-jenis delik adat (tindak pidana) yang diselesaikan melalui lembaga adat *Kutei*, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jenis-jenis delik di dalam hukum adat pada umumnya. Imam Sudiyat mengajukan ragam jenis delik dalam hukum adat, yaitu Penghianatan Pembakaran kampung; Delik terhadap diri pribadi Ketua Adat; Sihir atau tenung; Pengganggu kekuatan batin masyarakat; Incest (sumbang); Hamil tanpa nikah; Melarikan gadis; Zinah; Pembunuhan; Perbuatan melukai; Pencurian.¹²⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai jenis-jenis delik di dalam hukum adat sebagaimana yang telah disebut di atas di dalam undang-undang *Simbur Cahaya* telah ada dan diatur pada bagian tersendiri yaitu mengenai "Adat Perhukuman" mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 99.

Selanjutnya diingatkan oleh Wuisman bahwa arti sosiologis sistem hukum adat sebenarnya jauh lebih luas daripada ruang lingkup sosial masyarakat desa itu sendiri karena hampir seluruh hubungan antar desa

¹¹⁹ . Hilman Hadikusumah, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 31.

¹²⁰ . Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 195.

ditentukannya.¹²¹ Dengan demikian, *Kutei* sebagai salah satu pranata sosial tradisional masyarakat perlu mendapatkan peran dan fungsinya dalam kegiatan pelaksanaan dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Collecta bahwa salah satu sarana yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan massa adalah dengan menggunakan saluran-saluran pengaruh informal tradisional dari pemimpin-pemimpin setempat, karena pengaruhnya yang mendalam struktur budaya, mereka sering lebih didengar, dipahami, dan dituruti oleh rakyat dari pada pemimpin yang bersifat legal dari pihak pemerintah.¹²²

Atas dasar-dasar hal tersebut, *Kutei* sebagai salah satu pranata sosial tradisional masyarakat Rejang perlu dikaji peranan dan pendaayagunaannya. Sebab, secara teoritis lembaga *Kutei* adalah salah satu bentuk sub-sistem struktur hukum dalam sistem sosial kemasyarakatan yang beradab.

E. Fungsi Hukum Dalam Penyelesaian Konflik (Tindak Pidana) Bagi Masyarakat

Apabila masyarakat ditinjau secara lebih mendalam, maka nyata bahwa masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing mempunyai sistem nilai-nilai dan norma-norma. Apabila hal ini menyangkut kehidupan serta kesejahteraan bagian-bagian tersebut, maka hal itu dapat disebut sebagai kepentingan-kepentingan. Kadang-kadang kepentingan-kepentingan tersebut dapat digolongkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang terbanyak dilakukan oleh

¹²¹ . Wuisman, J.J.J.M., *Perubahan Sosial di Bengkulu*, Prisma 6, 1985, halaman 72.

¹²² . Nat J. Collecta, Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, halaman 78.

masyarakat, yaitu menurut urutan institusional atau kelembagaan dalam masyarakat. Masing-masing bagian masyarakat mempunyai orientasi sendiri-sendiri terhadap kepentingan-kepentingannya. Adanya orientasi yang demikian itu tidak jarang anggota masyarakat memaksakan kehendaknya sehingga menimbulkan suatu konflik dalam masyarakat.

Dalam ruang lingkup sistem hukum yang berlaku di masyarakat, dapat dinyatakan bahwa terjadinya masalah hukum, karena ada konflik antar pihak-pihak yang memerlukan bantuan penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berwujud bermacam-macam badan atau lembaga, umpamanya seorang kepala suku, suatu dewan, suatu rapat anggota, seorang anggota yang berhubungan darah dengan kedua belah pihak yang bersengketa, seorang rohaniawan, seorang ilmuwan dari cabang spesialisasi tertentu, semua ini menempati fungsi sebagai hakim.¹²³ Dalam hal ini hukum berkaitan erat dengan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral, tidak memihak, yang dalam pengertian ini, hukum tidak identik dengan negara. Sebab dalam masyarakat yang belum mengenal bentuk negara sekalipun, terdapat aturan-aturan yang memaksa, bagaimana orang harus bertindak jika terjadi konflik.

Aturan hukum dan konflik terdapat korelasi yang erat. Sebab, terdapat kecenderungan bahwa hampir dapat dipastikan dalam kehidupan bersama terjadi berbagai bentuk konflik, sehingga diperlukan suatu bentuk peradilan

¹²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985, halaman 111. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Agung, Semarang, 1990.

tertentu dalam kehidupan sosial untuk menyelesaikan konflik terjadi dimasyarakat. Perlu pula dicatat, bahwa bentuk-bentuk peradilan dan penyelesaian konflik sepanjang sejarah pada masyarakat yang berbeda, masih dapat ditemukan dalam masyarakat modern. Kenyataan menunjukkan tidak semua konflik yang terjadi di masyarakat diajukan ke sidang pengadilan. Berbagai macam konflik, baik besar maupun kecil diselesaikan menurut cara-cara mereka sendiri, baik oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun oleh lingkungan di tempat mereka berada, yakni oleh pihak yang bertindak sebagai mediator dan pendamaian konflik. Salah satu masalah pokok yang berkaitan dengan hukum adalah cara-cara warga masyarakat menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. Yang terpenting dalam hal ini adalah perimbangan antara bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang bersifat yuridis dan non-yuridis, seberapa jauh bentuk penyelesaian non-yuridis menghormati cara-cara penyelesaian yang beradab. Disamping itu yang penting pula bagi kehidupan sosial adalah yang menyangkut pilihan bentuk penyelesaian konflik yang paling memadai untuk tipe-tipe konflik dan tipe-tipe hubungan yang terjadi.¹²⁴

Oleh karena ada kecenderungan bentuk penyelesaian non-yuridis dilakukan dengan cara-cara yang kurang bahkan tidak beradab, maka hukum diperlukan dalam penyelesaian konflik dengan kekerasan menjadi penyelesaian konflik tanpa kekerasan; dan mengubah penyelesaian konflik

¹²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, halaman 113.

sepihak.¹²⁵ Dengan demikian segera dapat ditegaskan bahwa hukum dalam penyelesaian konflik, tidak hanya berfungsi *law as a tool of social control* dan *law as a tool of social engineering*, tetapi juga berfungsi sebagai sarana *social interaction* dan *social integration*.

Disamping itu, fungsi hukum bagi bangsa Indonesia dinyatakan sebagai sarana pengayoman, dalam arti bahwa hukum berfungsi untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, dan berprikemanusiaan.¹²⁶

Fungsi hukum yang essensial mendasar adalah fungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian dan dua hal ini merupakan tujuan-tujuan utama dari hukum. Menurut Ronny Hanitijo untuk dapat memahami lebih dalam masalah mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat perlu diperhatikan pendapat Rudolf Von Ihering yang mengemukakan:¹²⁷

"laws were only one way to achieve the end namely social control" ("hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial") Selanjutnya menurut Rudolf Von Ihering hukum merupakan : *"an instrument for serving the needs of society where there is an inevitable conflict between the social needs of man and each individual's self interest"* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

¹²⁵ . Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 126.

¹²⁶ . Persahi, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, halaman 13.

¹²⁷ . Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989, halaman 21.

Fungsi hukum yang telah banyak diketahui oleh umum ini adalah fungsi hukum sebagai suatu mekanisme pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sosial merupakan satu proses yang direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan mengajak, mempengaruhi bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum sedang berlaku. Pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi pengendalian sosial yang bersifat preventif dan pengendalian sosial yang bersifat refresif, bahkan ada pengendalian sosial yang bersifat preventif-refresif. Pengendalian sosial yang bersifat preventif berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas masyarakat. Pengendalian sosial refresif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.¹²⁸ Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga Status Quo. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat.

Pengendalian secara sadar terhadap sistem normatif mewujudkan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh akal dan kesadaran manusia guna mengendalikan proses-proses sosial untuk mencapai suatu masyarakat

¹²⁸ . Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, halaman 117.

yang dicita-citakan. Pengembangan organisasi yang secara khusus ditujukan untuk membentuk norma-norma dan memberikan sanksi-sanksi, menimbulkan potensi untuk melakukan pengendalian secara rasional pada proses-proses sosial. Norma-norma memberikan suatu bentuk struktural pada masyarakat. Dengan memanipulasikan sistem normatif secara sadar, negara memperoleh sarana yaitu hukum untuk merubah masyarakatnya sendiri dengan mengadakan usaha secara sadar dan rasional.

Roescoe Pound menamakan usaha pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarana demikian ini sebagai proses "*social-engineering*" atau rekayasa sosial.¹²⁹ Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat dari pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh pejabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana. Untuk tiap pejabat ini terdapat serangkaian tujuan-tujuan untuk kedudukan mereka masing-masing dan terdapat pula norma-norma yang menentukan bagaimana mereka harus bertindak.¹³⁰

¹²⁹ . Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, halaman 46.

¹³⁰ . Ronny Hanitijo Soemitro, *Op cit*, halaman 27.

Berkaitan dengan fungsi-fungsi hukum yang telah diuraikan diatas, Darji Darmodiharjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum memiliki berbagai fungsi hukum itu sendiri.¹³¹ Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah:

Pertama, sistem hukum berfungsi untuk sistem kontrol sosial. Sistem hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial. *Kedua*, sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*). *Ketiga*, sistem hukum adalah untuk memperbaharui masyarakat (*social engineering*).¹³²

Berangkat dari suatu pemahaman bahwa hukum dipakai untuk mengayomi masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum menurut Bredemeier (dalam fungsinya melakukan integrasi) ditempatkan pada kedudukan sentral di tengah-tengah suatu proses hubungan masukan dan keluaran. Satjipto Rahardjo (mengutip Bredemeier), mengatakan bahwa hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.¹³³

Khusus mengenai konsep fungsi integratif sistem hukum dan fungsi sebagai sarana pengayoman, Harry C. Bredemeier menitikberatkan perhatian pada struktur hukum eksistensi pengadilan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian konflik yang secara ideal harus memperhatikan

¹³¹ . Darji Darmodiharjo, *Op cit*, halaman 159.

¹³² . *Ibid*, halaman 159-161.

¹³³ . Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, halaman 31.

nilai-nilai dasar hukum yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik secara tertib¹³⁴

Kepastian hukum dalam arti keputusan pengadilan adalah konkretisasi *law in book* dan *law in action*. Kemanfaatan dalam arti keputusan pengadilan adalah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi pelaksanaan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keadilan, dalam arti putusan pengadilan dilakukan atas dasar *due process of law* serta bersifat *fair and impartial court*.

Perlu pula dicatat bahwa bukan hal yang mudah bagi pengadilan untuk mengharmonisasikan ketiga nilai dasar hukum tersebut. Sebab, fungsi pengadilan tidaklah berjalan tanpa masalah, terlebih lagi jika kita mengkorelasikan sang hakim dengan kehidupan sosial yang lebih luas, sehingga kita akan mengetahui bahwa peranan yang dimainkan sang hakim di masyarakat sangat ditentukan oleh adanya beban pengaruh berupa harapan dan tuntutan yang datang dari masyarakat.

Hampir dapat dipastikan bahwa keputusan hakim perdamaian adat dihormati oleh anggota masyarakat, karena keputusan berdasarkan hukum adat setempat dinilai lebih adil dibanding keputusan hakim pengadilan dalam

¹³⁴. Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik, Kekuasaan dan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, halaman 59.

hukum modern. Sebab, keputusan dalam hukum adat didasarkan musyawarah untuk menemukan dan menerapkan sanksi yang terbaik, baik bagi pihak korban maupun pelaku, juga masyarakat dalam arti keseluruhan. Sedangkan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim modern, sampai saat ini oleh masyarakat masih dinilai bermasalah.

Terhadap penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pengadilan, hakim harus benar-benar memperhatikan bentuk-bentuk penyelesaian yang terbaik dari konflik tersebut. Hakim sebagai praktisi hukum selama ini dalam menyelesaikan suatu masalah selalu berpijak pada posisinya (sebagai jurisprudential model) dengan bertitik tolak pada pemikiran-pemikiran *rules, logic, universal, participant, practical dan decision*.

Pendekatan penyelesaian konflik yang digunakan Hakim selalu terikat dengan normatff yuridis, akibatnya putusan yang dijatuhkan kadangkala menimbulkan reaksi dari pihak-pihak berperkara. Timbulnya sikap reaksi yang demikian adalah sebagai pelampiasan adanya ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan.

Dalam hubungan dengan pranata yang dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara para anggotanya, ada dua unsur yang turut menentukan, yaitu.¹³⁵

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu. Apabila tujuan yang hendak dicapai adalah untuk merukunkan para pihak sehingga selanjutnya mereka dapat hidup bersama kembali dengan baik sesudah penyelesaian sengketa, maka orang dapat mengharapkan, bahwa tekanan di situ akan lebih diletakkan

¹³⁵ . Satjipto Rahardjo, *Op cit*, halaman 52-53.

pada cara-cara mediasi dan kompromi. Sebaliknya, apabila tujuannya adalah untuk melakukan penerapan peraturan-peraturan, maka cara-cara penyelesaian yang bersifat birokrasi mungkin akan lebih banyak dipakai.

2. Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat. Semakin tajam pelapisan itu, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat disitu. Dalam keadaan yang demikian itu, maka lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan cara memaksakan berlakunya peraturan-peraturan dengan pembebanan sanksi merupakan pola yang cocok. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat sederhana yang tingkat pemakaian teknologi dan pembagian kerjanya masih rendah dan kesepakatan nilai-nilai masih mudah dicapai. Di sini perukunan merupakan pola yang cocok.

Meskipun keadilan dan kebenaran yang hakiki itu sangat sulit untuk didapatkan, dalam penyelesaian tindak pidana hal itu harus menjadi tuntutan untuk diwujudkan. Keadilan dan kebenaran yang ingin dicapai oleh masyarakat tidak hanya diperoleh melalui lembaga formal (pengadilan) tapi bisa juga melalui lembaga informal misalnya lembaga adat tradisional *Kutei*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan bahwa penentuan sampel menggunakan prinsip “bola salju” (*Snowballs*), maka data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan informan (responden) yang terpilih. Khusus untuk mengetahui peran lembaga adat tradisional masyarakat Rejang (Kutei) dalam penyelesaian tindak pidana, maka penentuan informan (responden) fungsionaris adat adalah fungsionaris adat yang pernah menjadi pemimpin pada dua *Petulai* (Kesatuan masyarakat berdasarkan hubungan atau pertalian darah), yakni *Petulai Selupu* dan *Petulai Bermani*. Kedua *Petulai* ini berada di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Pada masing-masing *Petulai* telah dilakukan wawancara dengan enam responden sebagai berikut:

1. Bapak Abdullah Sani, mantan Pasirah di wilayah Bermani
2. Bapak H.A.F. Ramli Alibudin mantan Datuk Pasar Curup di wilayah *Petulai Selupu*
3. Bapak Agustami, pemuka adat dan mantan Ketua Adat Kelurahan Dusun Curup wilayah *Petulai Selupu*
4. Bapak Hi. Kader, pemuka adat dan mantan Ketua Adat Desa Batu Panko di wilayah Bermani
5. Bapak Drs. Lahmudin Pemuka Adat Pasar Curup di wilayah *Petulai Selupu*
6. Bapak M. Zein Pemuka Adat Desa Tunas Harapan di wilayah Bermani.

Di samping fungsionaris adat, telah dilakukan pula wawancara dengan tujuh Kepala Desa/Lurah dan 14 orang warga masyarakat biasa yang mewakili tujuh desa/kelurahan. Keempat belas anggota masyarakat biasa dipilih berdasarkan penilaian bahwa yang bersangkutan dinilai memahami keberadaan dan pelaksanaan peran lembaga *Kutei* serta mampu memberikan informasi yang sah. Ketujuh Kepala Desa dan Lurah serta empat belas anggota masyarakat biasa sebagai informan (responden) dimaksud adalah:

1. Kepala Desa dan 2 (dua) anggota masyarakat desa Batu Panco
2. Kepala Desa dan 2 (dua) anggota masyarakat desa Parbo
3. Kepala Desa dan 2 (dua) anggota masyarakat desa Tunas Harapan
4. Lurah dan 2 (dua) anggota masyarakat kelurahan Dusun Curup
5. Lurah dan 2 (dua) anggota masyarakat kelurahan Kepala Siring
6. Kepala Desa dan 2 (dua) anggota masyarakat desa Kesambe Baru
7. Kepala Desa dan 2 (dua) anggota masyarakat desa Talang Ulu

Khusus untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum terhadap peran dan fungsi lembaga adat *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana, maka penulis telah melakukan wawancara dengan:

1. Kapolres Rejang Lebong dan 2 (dua) orang Penyidik di Polres R/L;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Curup dan 2 (dua) orang Penuntut Umum; dan
3. Ketua Pengadilan Negeri Curup dan 2 (dua) orang Hakim

Berdasarkan perolehan data, baik data yang bersifat kepustakaan maupun lapangan, maka dalam uraian berikut akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian dengan sistematika bahasan sebagai berikut:

- 1) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Adat tradisional *Kutei* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana;
- 2) Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Lembaga Adat Tradisional *Kutei* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Kedua bahasan tersebut menggunakan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan data hasil penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggambarkan jawaban permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Adat Tradisional *Kutei* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh informan dapat dikemukakan pemahaman bahwa secara histories lembaga adat *Kutei* merupakan warisan budaya nenek moyang suku bangsa Rejang yang digunakan sebagai tradisi di kalangan para raja-raja dan masyarakat pada waktu itu. Diturunkan oleh informan bahwa menurut hikayat pada zaman dahulu kala yang tidak ada yang tahu abad kejadiannya, terjadilah suatu peristiwa dengan keanehan mengenai hal-hal yang dilihat dan didengar. Segala kejadian itu kemudian ditetapkan dengan pemberian nama sesuai dengan hal-hal yang terjadi. Hal ini dibuktikan oleh informan dengan merujuk nama-nama daerah yang ada yang sesuai dengan kejadian-kejadian pada waktu itu seperti *Kutei natet* dan *Kutei Belek Tebo* (*Kutei Balik Bukit*).

Ketika era kolonial di Rejang Lebong, lembaga adat *Kutei* tetap digunakan oleh suku bangsa Rejang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anggota masyarakat suku bangsa Rejang, sekalipun pada waktu itu pemerintah kolonial telah memberlakukan Hukum Barat di samping Hukum Adat Rejang.

Suku bangsa Rejang terus tumbuh dan berkembang dengan kemunculan beragam dusun dan desa baru, namun keberadaan lembaga *Kutei* terus dipertahankan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat pada masing-masing dusun dan desa yang baru tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa segala norma-norma yang ada dan berlaku dalam lembaga *Kutei* tetap menjadi norma dalam memelihara kedamaian hidup bermasyarakat.

Mencermati informasi informan seperti dituturkan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Lembaga adat *Kutei* merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat suku bangsa Rejang yang berada di tiap-tiap dusun atau desa. Susunan keanggotaan lembaga *Kutei* terdiri atas tua-tua dusun, tua-tua desa, tua-tua jurai, dan alim ulama. Sesuai perkembangan masyarakat dan kemajuan masing-masing desa yang ada, maka keanggotaan lembaga *Kutei* juga dikembangkan dengan menambahkan para cerdik-cendikiawan (cerdik pandai). Dahulu, jabatan ketua lembaga *Kutei* secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa. Namun sesuai dengan dinamika masyarakat, jabatan ketua Lembaga *Kutei* telah mengalami pergeseran, karena pada saat ini sudah ada beberapa desa yang memisahkan jabatan Kepala Desa dengan Jabatan Ketua *Kutei*. Kepala Desa hanya sebagai

Pembina sedangkan ketua *Kutei* dipegang oleh Ketua Adat Desa setempat. Pergeseran atau perubahan demikian merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena akibat pembauran atau heterogenitas masyarakat maka kepala desa atau Lurah belum tentu dijabat oleh anggota masyarakat suku asli bangsa rejang.

Pembentukan lembaga adat *Kutei* ternyata didasarkan pula pada pertimbangan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di desa, karena keberadaan lembaga *Kutei* dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di desa guna mempertahankan kerukunan hidup bersama. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga *Kutei* mempunyai perkaitan erat dengan nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat yang berlaku dan harus dijunjung tinggi oleh suku bangsa Rejang. Hal ini sesuai dengan ungkapan budaya yang mengatakan "*Dusun/Kampung berkandang Adat, Negeri/Kota berkandang Undang-undang*". Artinya kalau kita berada di desa (kampung) maka adatlah yang dipegang dan dijunjung, tetapi bila kita berada di kota maka undang-undanglah yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi.

Lembaga *Kutei* adalah wadah atau wahana bagi masyarakat suku bangsa Rejang memecahkan masalah-masalah kehidupan bersama, karena sejak dahulu lembaga *Kutei* merupakan lembaga yang mampu menangani persoalan-persoalan yang menyangkut perbuatan yang bersifat terpuji dan perbuatan yang bersifat tercela seperti pelanggaran terhadap hukum adat serta musibah akibat bencana alam maupun akibat ulah manusia. Sekadar

contoh persoalan-persoalan tersebut antara lain yang menyangkut kenduri, perkawinan, pembagian waris atau pusaka dan penyelesaian konflik antar anggota masyarakat baik bersifat individual maupun kelompok.

Apabila penjelasan di atas dapat dipahami, maka berdasarkan informasi informan dapat tegaskan bahwa realitas di masyarakat suku Rejang keberadaan Lembaga Kutei sampai kini. Pengakuan keberadaan lembaga adat *Kutei* didasarkan pada realitas bahwa *Kutei* mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Lembaga *Kutei* berfungsi sebagai wadah musyawarah masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat, baik secara individual, kelompok, maupun secara keseluruhan atau kolektif;
2. Lembaga *Kutei* berfungsi menampung dan memusyawarahkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
3. Lembaga *Kutei* berfungsi melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa;
4. Lembaga *Kutei* berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas formal pemerintah desa;

5. Lembaga *Kutei* berfungsi menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antar sesama masyarakat, pemuka adat, tua-tua adat dan aparat pemerintahan desa;
6. Lembaga *Kutei* berfungsi sebagai lembaga non pemerintah yang berusaha menanggulangi masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman, keseimbangan masyarakat baik yang bersifat sengketa atau tindak pidana.

Mencermati keenam fungsi lembaga *Kutei* tersebut, maka segera dapat dipahami bahwa fungsi lembaga *Kutei* mempunyai perkaitan yang erat dengan pembangunan di bidang hukum yang diarahkan untuk menegakkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menegakkan kehidupan yang demokratis, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Dasar penegakan hukum yang dilakukan Lembaga *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian konflik adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang *Simbur Cahaya*.

Dalam lingkup pelaksanaan tugas lembaga *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian konflik yang bersifat kriminal diperoleh penjelasan dari informan sebagai berikut:

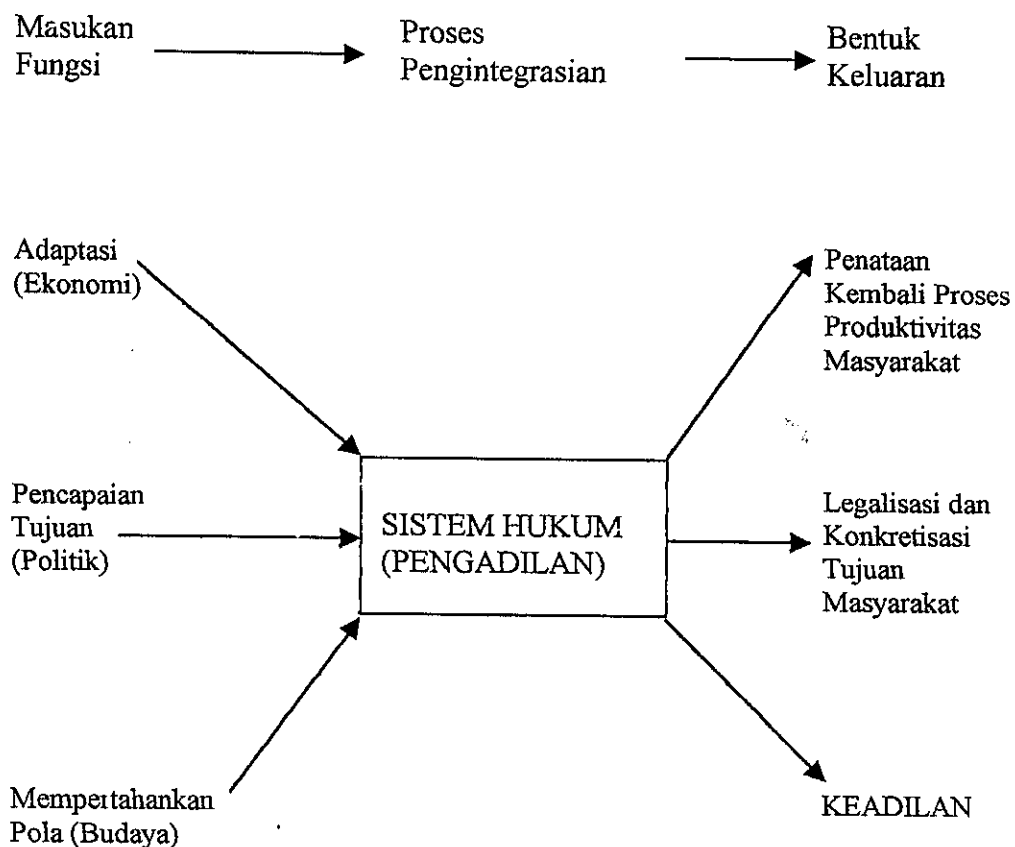
1. Lembaga *Kutei* sebagai lembaga penegak hukum adat Rejang, tidak memisahkan secara tegas perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Tiap kasus tindak pidana di lihat seberapa jauh akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan yang akan digolongkan ke dalam perbuatan salah (pelanggaran) yang bersifat berat atau ringan;

2. Lembaga Kutei akan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal tindak pidana yang bersifat berat, maka petugas Kutei dapat melakukan inisiatif penyelesaian tanpa harus diminta oleh pihak yang dirugikan. Misalnya dalam kasus zinah dan penganiayaan. Sedangkan dalam kasus kriminal yang bersifat ringan seperti perkelahian, maka petugas Kutei baru bertindak setelah ada permintaan warga masyarakat atau salah satu pihak yang bersengketa. Dengan demikian Lembaga Kutei secara moral tidak dapat menolak dalam hal ada permintaan untuk melakukan tindakan penyelesaian dalam suatu perkara. Sedangkan pada sisi lain, Lembaga Kutei secara moral harus melakukan tindakan untuk menyelesaikan suatu kasus kriminal tanpa harus ada permintaan untuk bertindak;
3. Ada tiga kriteria yang menjadi ukuran suatu konflik (tindak pidana) diselesaikan lembaga *Kutei*, yaitu:
 - a). Tindak pidana yang terjadi masuk ruang lingkup perbuatan yang melanggar Hukum Adat (Rejang);
 - b). Adanya permintaan pihak korban atau pelaku atau kedua-duanya agar konflik yang terjadi diselesaikan di lembaga *Kutei*;
 - c). Adanya permintaan dari anggota masyarakat supaya pelanggaran yang terjadi di desa tersebut diselesaikan di lembaga *Kutei*. Misalnya seorang gadis atau janda yang hamil di luar nikah yang belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab yang menyebabkan kehamilan sang wanita tersebut.

4. Permintaan penyelesaian tindak pidana melalui lembaga *Kutei* dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban; pelaku atau keluarga pelaku; atau warga masyarakat;
5. Permintaan penyelesaian melalui lembaga *Kutei* cukup dilakukan secara lisan kepada Ketua *Kutei* (Kepala Desa) atau pada anggota lembaga *Kutei*. Berdasarkan permintaan tersebut Ketua *Kutei* akan menentukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang dihadiri seluruh anggota *Kutei* dan kedua pihak yang bersengketa.

Apabila kelima hal di atas dapat dimengerti, maka dapat ditegaskan bahwa lembaga *Kutei* identik dengan Pengadilan dalam hukum formal yang menyelenggarakan peradilan pidana sebagai wujud kegiatan menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu kerangka teoritis yang dikembangkan oleh H.C. Bredemeier yang memberikan pemahaman fungsi dan sistem hukum sebagai sarana menyelesaikan konflik dapat diadopsi dan diadaptasikan sebagai kerangka teoritis memahami fungsi Lembaga *Kutei* dalam penyelesaian konflik dalam suku bangsa Rejang. Bredemeier yang mengembangkan teori Sibernetika yang dipopulerkan oleh Talcott Parsons lebih menitikberatkan fungsi hukum sebagai sarana mengintegrasikan masyarakat melalui fungsi pengadilan.

Kerangka teoritis dimaksud divisualisasikan Bredemeier melalui suatu proses keterhubungan masukan (input) dan luaran (out-put) sebagai berikut:



Ragaan: Fungsi sistem hukum (Lembaga Pengadilan) sebagai sarana untuk mengintegrasikan masyarakat

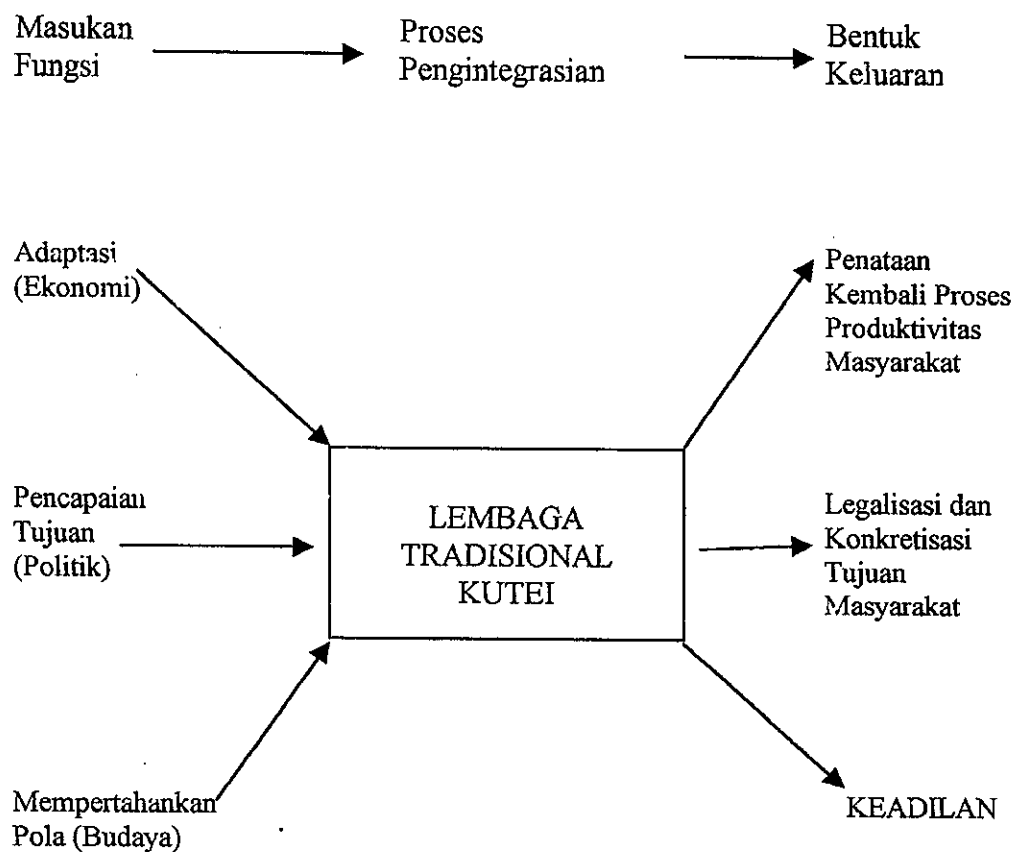
Fungsi integratif pengadilan yang diajukan Bredemeier lebih ditekankan pada fungsi penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat.

- (1) *Adaptation* (adaptasi), adalah proses ekonomi yang memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana penyelesaian konflik dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerjasama yang produktif. Pertukaran antara proses integrasi dan adaptasi

menghasilkan out put berupa pengorganisasian atau penstrukturan masyarakat. Melalui keputusan hukum ditegaskan apa yang menjadi hak, kewajiban dan pertanggungjawaban.

- (2) *Goal pursuance*, adalah proses politik dengan bidang garapan masalah penentuan tujuan-tujuan yang harus dicapai. Hukum dalam hal ini pengadilan, menerima masukan dalam bentuk petunjuk tentang apa dan bagaimana pengadilan menjalankan fungsinya. Petunjuk-petunjuk tersebut secara konkret dan eksplisit tercantum dalam hukum positif dan inilah yang menjadi pegangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya.
- (3) *Pattern maintenance*, adalah pertukaran proses sosialisasi dengan hukum. Hukum sebagai mekanisme pengintegrasi hanya dapat menjalankan pekerjaannya, jika ada kesediaan anggota masyarakat menggunakan jasa pengadilan sebagai tempat penyelesaian konflik. Kesediaan anggota masyarakat akan bergantung pada penilaian atau persepsi masyarakat terhadap pengadilan. Apabila persepsi masyarakat bersifat positif, maka masyarakat akan menggunakan jasa pengadilan dalam penyelesaian konflik. Sebaliknya, anggota masyarakat akan menghindari pengadilan dan memilih lembaga lain, apabila persepsi masyarakat bersifat negatif. Pertukaran dari masukan yang datang dari budaya adalah keluaran yang datang dari pengadilan adalah keadilan.

Ragaan fungsi Pengadilan yang divisualisasikan tersebut sengaja dipinjam, karena fungsi lembaga *Kutei* dalam penyelesaian konflik di masyarakat dapat pula digambarkan seperti ragaan Bredemeier tersebut, yang dalam hal ini sistem hukum (pengadilan) diganti dengan lembaga *Kutei*. Ragaannya adalah sebagai berikut :



Ragaan: Peran dan Fungsi Lembaga *Kutei* sebagai Lembaga Pengintegrasikan dalam masyarakat

Realitas menunjukkan bahwa bagi masyarakat Rejang, *Kutei* merupakan lembaga kemasyarakatan yang ditempatkan pada kedudukan yang

tinggi dan dihormati, terutama peran *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian konflik atau tindak pidana. Hal ini tidak hanya didasarkan pada realitas di masyarakat bahwa berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh ketua *Kutei*, tokoh adat, tua-tua adat, dan tokoh masyarakat bahwa masyarakat setempat sampai saat ini masih menggunakan jasa lembaga *Kutei* dalam penyelesaian konflik. Bagi masyarakat suku bangsa Rejang, lembaga *Kutei* dianggap sebagai lembaga penegak hukum yang mampu memberikan penyelesaian secara adil, sehingga putusan lembaga *Kutei* sangat dihormati, tidak hanya oleh pihak yang bersengketa, tetapi juga masyarakat suku bangsa Rejang dalam arti totalitas.

Berdasarkan informasi yang dituturkan oleh responden (seperti tua-tua adat, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat yang pernah menggunakan jasa lembaga *Kutei*) dapat dikemukakan bahwa putusan lembaga *Kutei* dianggap lebih adil dibanding putusan pengadilan negeri, karena kedua pihak yang konflik dihadirkan dan kedua pihak secara legowo menerima solusi yang ditetapkan oleh ketua lembaga *Kutei*. Dikemukakan pula bahwa dalam proses penyelesaian kedua pihak yang bersengketa berhak mengajukan keberatan apabila tawaran yang diajukan ketua *Kutei* dianggap belum adil bagi salah satu pihak. Kemudian ketua *Kutei* menawarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa keberatan kepada pihak lainnya. Biasanya keberatan, tidak hanya datang dari pihak korban, tetapi juga pihak pelaku. Keberatan pihak pelaku umumnya menyangkut kewajiban yang dikenakan oleh ketua *Kutei* dalam bentuk melakukan kewajiban adat, karena dirasakan

tidak mampu dipenuhi. Sedangkan keberatan dari pihak korban umumnya karena kewajiban adat dianggap belum setimbang. Dalam hal demikian ketua Kutei akan menentukan putusan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan kedua pihak yang pada umumnya dianggap adil oleh kedua pihak. Kedua pihak umumnya mampu saling menerima atas dasar bahwa sesuatu peristiwa buruk merupakan suatu musibah yang tidak pernah diharapkan oleh manusia. Rasa emphati diri kedua pihak berperan besar dalam penyelesaian konflik, sehingga kesediaan saling menerima dan tepo sliro merupakan sikap yang sangat membantu penyelesaian konflik.

Proses penyelesaian kasus kriminal melalui lembaga Kutei pada umumnya tidak berbeda, karena setiap penyelesaian dihadiri oleh Ketua Kutei dan seluruh unsur anggota Kutei serta dihadiri oleh kedua pihak (pelaku dan atau keluarga dan korban dan atau keluarga korban). Artinya dalam kasus tertentu ada perbedaan tindakan awal yang dilakukan salah satu pihak sebelum proses penyelesaian dilakukan dalam sidang Kutei. Tindakan pendahulu yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum diproses Lembaga Kutei adalah dalam hal kejahatan terhadap badan atau keselamatan jiwa seseorang.

Berdasarkan informasi Ketua Kutei dan masyarakat yang menjadi responden dapat dituturkan kembali bahwa apabila terjadi tindak pidana yang berakibat adanya cedera fisik, maka sebelum kasus diselesaikan dalam Lembaga Kutei, pihak yang mencederai harus melakukan "*Mulo Tepung*". Yang dimaksud tindakan "*Mulo Tepung*" adalah suatu tindakan pendahuluan

yang dilakukan oleh pihak yang menyebabkan cedera orang lain untuk melakukan penyelamatan dengan tindakan pengobatan terhadap pihak yang cedera. Dalam hal ini tidak dipersoalkan siapa yang salah atau yang benar, yang diutamakan adalah tindakan penyelamatan korban yang binasa karena perbuatan. Sedangkan untuk menentukan kesalahan akan diketahui dalam sidang lembaga Kutei.

Untuk lebih memahami “mulo tepung” dalam konteks proses penyelesaian konflik melalui lembaga Kutei seperti yang dikemukakan di atas dapat diajukan contoh sebagai berikut:

X menikam Y, karena X merasa terhina oleh Y yang menagih hutang X didepan kekasih X ketika menghadiri pesta ulang tahun di rumah Z di dusun Curup. Sedangkan yang sesungguhnya Y yang berhutang pada X. Akibat tikaman X, maka Y tak sadarkan diri dan terjatuh karena pendarahan.

Pada contoh kasus di atas, mulo tepung harus dilakukan oleh X atau keluarga X terhadap Y. Siapa yang salah dan siapa yang benar (X atau Y) dikesampingkan dahulu, karena yang utama adalah menyelemat nyawa Y akibat tikaman X.

Berkait erat dengan kasus yang menyangkut keselamatan fisik dan jiwa seseorang, maka dalam hukum delik adat di lingkungan suku bangsa Rejang dikenal beberapa istilah binasa atau cidera yang menyangkut tubuh manusia, yaitu :

1	Sigar Kulit	Kelabang atau bekas pukulan
2	Cucuk Kulit	Bekas cucukan
3	Mea bayang daleak	Memar bayang merah
4	Iram bedaleak	Memar dan berdarah
5	Iram coa bedaleak	Memar tidak berdarah
6	Tukak takek kukuk	Tukak takik
7	Tukak sebea/kokok	Tukak terbuka
8	Membalew	Bengkak memar
9	Cido celako	Cacat
	a. Putus tangen/Jiei b. Putus kekea/Jiei kekea c. Pecoak matei d. Putus tiuk e. Pecoak anak tiuk f. Putus nyung	Putus tangan/jari Putus Kaki/ Jari kaki Pecah mata Putus telinga Pecah anak telinga Putus hidung
10	Untuk cidera di leher ke atas: a. Kejunjung tenggak= b. Tenggak tepi= c. Mendaur tenggak	Bekas luka pada muka yang tidak ditutup Bekas luka kiri kanan tak dapat ditutup Kena pukulan atau luka di kuduk lambat kelihatan akibatnya menjadi celaka

Jenis-jenis cidera atau binasa perlu ditentukan untuk menentukan bentuk hukuman yang harus dijalani atau wujud denda yang wajib dipenuhi oleh pelaku sebagai pengimbalan atas perbuatan yang ia lakukan. Jenis-jenis binasa atau cidera yang disebutkan pada tabel di atas, tidak termasuk perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Khusus terhadap kejahatan menghilangkan nyawa orang ditentukan tersendiri.

Jenis-jenis cidera atau binasa dalam hukum (pidana) adat Rejang ditentukan terinci dan tidak sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHP yang menggolongkan jenis perbuatan melanggar hukum ke dalam "*Tindak Pidana Penganiayaan*" dengan hanya menyebut jenis penganiayaan ringan, sedang atau berat.

Mulo Tepung ini dilakukan untuk menanamkan rasa persaudaraan, keinsyafan, perikemanusiaan kedua pihak, terutama terhadap si cidera dan keluarganya karena merasa sekampunghalaman dan sependeritaan. Mulo tepung sesungguhnya bermakna mendalam yakni suatu sikap yang menunjukkan keinginan pihak si pelaku atau keluarga pelaku bahwa perkara yang terjadi lebih baik diselesaikan dengan berdamai secara kekeluargaan. Keinginan berdamai secara kekeluargaan pada masyarakat rejang yang tercermin melalui tindakan mulo tepung itu memberikan pemahaman bahwa suatu perkara yang diselesaikan melalui peradilan di pengadilan negeri berdasarkan hukum positif tertulis diibaratkan dengan pepetah "yang menang jadi arang yang kalah jadi abu". Artinya semuanya menjadi sia-sia, sehingga perdamaian yang menimbulkan ikatan kekeluargaan diantara kedua pihak

merupakan sikap dan tindakan yang dianggap lebih baik ketimbang berperkara yang umumnya cenderung berakibat tidak mengembalikan harmonisasi dalam hidup bermasyarakat. Sikap tawaran berdamai melalui tindakan mulo tepung selalu dilakukan melalui lembaga kutei sebagai lembaga penyelesaian konflik di masyarakat rejang.

Tindakan mulo tepung yang dilakukan oleh pihak yang menciderai secara empiris merupakan tindakan yang disikapi oleh keluarga korban secara positif. Artinya pihak korban menerima sikap ajakan berdamai keluarga pelaku. Oleh karena itu, setelah dilakukan tindakan *Mulo Tepung*, pihak korban atau pihak pelaku menyatakan sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui lembaga *Kutei*. Lalu masing-masing wakil kedua pihak menghadap Ketua *Kutei* atau salah satu anggota *Kutei* menyatakan kehendak mereka untuk melakukan perdamaian. Kemudian, berdasarkan laporan atau permintaan kedua pihak ditindaklanjuti oleh Ketua *Kutei* dengan menentukan hari dan tanggal yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Pada waktu sidang di lembaga *Kutei*, para pihak yang terlibat adalah seluruh anggota *Kutei*, pihak korban dan keluarga serta pihak pelaku dengan keluarganya. Pelaksanaan sidang di lembaga *Kutei* biasanya dipimpin oleh Ketua *Kutei*. Namun, dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan orang lain yang dituakan dalam lembaga kutei atau dalam desa yang dimintakan memimpin penyelenggaraan sidang *Kutei*. Mencermati keberadaan *mulo tepung*, maka inti agenda sidang adalah bermusyawarah untuk mufakat guna mewujudkan perdamaian kedua pihak yang mengalami konflik.

Kedudukan lembaga *Kutei* yang dihormati oleh masyarakat Rejang itu, tergambar pula dalam ungkapan budaya sebagai berikut :

Belek mengundang mai teneak ubet

(pulang kembali ke tanah ubet)

Mengubet ubet ka en

(jika mengobat obat sembuh)

Belek mengulok mai teneak gu-au

(kembali tenang ke tanah guru)

Amen begu-au, gu-au pacak

(jika berguru, guru pintar)

Untuk memahami mengenai mengapa masyarakat Rejang memilih lembaga *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian konflik, maka ungkapan Lawrence M. Friedman perlu diungkapkan kembali yang menyatakan:

*What do people think of law? Do group or individual wililngly go to court? For what purposes do people turn to lawyer, for what purposes do they make use of other officials and intermediaries? Is there respects for law, government, tradition? It is the legal culture, that is, the network of values and where people turn to the iaw, or government, or turn away.*¹³⁶

Berdasarkan pernyataan Friedman tersebut beberapa pertanyaan dalam memahami mengapa masyarakat rejang menghormati Lembaga *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian konflik, maka dapat diajukan pertanyaan:

¹³⁶ Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, op. cit. halaman 1004.

Mengapa masyarakat rejang tidak menggunakan pengacara atau ahli hukum atau pengadilan sebagai lembaga formal pemerintah untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan hukum yang mereka alami? Apakah yang menyebabkan mereka tidak mau menggunakan jasa hukum atau pengadilan, tetapi justru menggunakan lembaga Kutei? Apakah yang dijadikan alasan tidak menggunakan pengadilan atau penegak hukum formal?

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Rejang memilih penyelesaian konflik melalui lembaga *Kutei*, yaitu :

- (1) Bentuk atau cara penyelesaian konflik melalui lembaga *Kutei* mengutamakan cara-cara kekeluargaan, sehingga hasil putusan yang diambil melalui pemufakatan *Kutei* tidak menimbulkan rasa dendam bagi pihak keluarga korban maupun pihak keluarga pelaku;
- (2) Penyelesaian konflik melalui lembaga *Kutei* lebih sederhana tidak memerlukan biaya yang besar, tidak memerlukan prosedur birkorat, serta waktu yang digunakan sangat singkat dibanding menggunakan jasa Pengadilan sebagai lembaga formal pemerintah;
- (3) Putusan lembaga *Kutei* tidak bersifat menunjukkan ada yang menang dan ada yang kalah, karena putusannya lebih bersifat memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja;
- (4) Sanksi negatif yang diterapkan lembaga *Kutei* lebih mengutamakan aspek sanksi negatif non perampasan kemerdekaan. Umumnya lebih mengutamakan pidana denda adat yang relatif lebih ringan bila

dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan melalui lembaga formal pengadilan yaitu berupa pidana penjara atau kurungan atau bahkan pidana mati;

- (5) Putusan lembaga *Kutei* dianggap lebih memuaskan dan adil, karena baik pihak pelaku maupun pihak korban dapat berbicara langsung dan menyatakan keinginan masing-masing kepada pemufakatan *Kutei*;
- (6) Penyelesaian konflik melalui lembaga *Kutei* lebih cepat memulihkan keseimbangan, kerukunan antar pelaku dengan korban beserta keluarganya dan masyarakat pada umumnya, karena kedua pihak saling mengadopsi sebagai keluarga yang diikuti “doa selamat atau sedekah atau kenduri” sebagai ritualisasi pemulihan keseimbangan. Ritualisasi ini biasanya dihadiri oleh unsur lembaga *Kutei*;
- (7) Dalam sidang *Kutei* baik para pihak diberi keleluasaan dalam menyatakan pendapat kepada pemufakatan *Kutei*. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui lembaga formal yang berhadapan langsung dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). Kedua pihak, terutama pihak pelaku lebih merasa tertekan yang menyebabkan ketidakbebasan memberikan keterangan yang dimintakan oleh majelis hakim dan penuntut umum. Sedangkan di sidang *Kutei* kebebasan memberikan keterangan dirasakan sebagai suatu kepuasan psikologis.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka lembaga *Kutei* selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat bangsa rejang

menyelesaikan konflik, sekalipun mereka sebagian memaklumi prosedur hukum formal tak dapat dihapuskan. Oleh sebab itu, bagi masyarakat bangsa rejang, sekalipun orang menganggap pengadilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, putusan lembaga Kutei lebih dirasakan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, sehingga lembaga Kutei lebih diakui dan dihormati, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang bersifat tindak pidana.

Khusus mengenai mengapa masyarakat bangsa rejang menganggap putusan lembaga Kutei lebih adil dibanding putusan Pengadilan sebagai lembaga hukum formal, diperoleh kejelasan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan dinilai kurang bahkan tidak adil, karena hakim sering berpihak. Keberpihakan ini dihubungkan dengan adanya kecenderungan para pihak menggunakan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan putusan lembaga Kutei, upaya hukum seperti tersebut tidak ada. Seandainya ada, hampir dapat dipastikan tidak akan dilakukan karena putusan Kutei didasarkan pada keinginan kedua pihak, bukan menilai benar dan salahnya kedua pihak;
2. Putusan *Kutei* dinilai adil, tidak hanya oleh pihak-pihak yang terlibat konflik tetapi oleh masyarakat pada umumnya.

Keputusan *Kutei* dihormati oleh masyarakat tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam menjalankan keputusan tersebut. Bagi masyarakat Rejang, terutama pihak-pihak yang bersengketa, semua permasalahan yang diputus oleh lembaga *Kutei* dianggap selesai dan adil, sehingga tidak perlu diproses

melalui hukum formal, sekalipun kasus yang terjadi itu seharusnya diselesaikan berdasarkan hukum formal. Dalam konteks penyelesaian kasus oleh lembaga *Kutei* ini, berlaku adagium tradisional Rejang yang berbunyi "*Kaleak adat melawen janjei.*" Artinya, perjanjian yang dibuat oleh dan dihadapan *Kutei* adalah telah cukup dalam menyelesaikan masalah.

Sebagai lembaga informal yang berada di desa, lembaga *Kutei* mempunyai wewenang dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Wewenang lembaga *Kutei* adalah :

- (1) Mewakili masyarakat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
- (2) Menyelesaikan perselisihan konflik yang terjadi dalam masyarakat baik yang terjadi antar individu, kelompok maupun secara keseluruhan atau kolektif;
- (3) Menyelenggarakan upacara adat dan pelaksanaan adat istiadat setempat seperti kenduri, perayaan perkawinan dan sebagainya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat;
- (4) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

Di samping wewenang tersebut, Lembaga *Kutei* mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) Menyelesaikan setiap perselisihan konflik yang diminta penyelesaiannya oleh pelaku, korban, keluarga korban, keluarga

- pelaku maupun masyarakat dengan cara kekeluargaan sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat;
- (2) Membantu kelancaran pembangunan dan pemerintahan desa;
 - (3) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antar anggota *Kutei*, masyarakat dan aparat pemerintahan desa;
 - (4) Memelihara, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - (5) Melaksanakan putusan yang telah ditetapkan melalui pemufakatan *Kutei*;
 - (6) Menjaga kerukunan bersama antar pihak yang bersengketa pada waktu saat berlangsungnya penyelesaian konflik di lembaga *Kutei*; dan
 - (7) Melaksanakan ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang ada dalam undang-undang *Simbur Cahaya* sebagai pedoman.

Di dalam sidang lembaga *Kutei*, Ketua *Kutei* memberi kesempatan kepada anggota-anggota *Kutei* dan para pihak yang bersengketa. Kedua pihak yang bersengketa diperkenankan mengajukan keinginan dan cara penyelesaian dihadapan sidang *Kutei*. Kemudian anggota *Kutei* diperkenankan mengajukan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa dan ditawarkan kepada pihak yang bersengketa.

Kesempatan berbicara langsung ini diberikan kepada kedua pihak yang bersengketa dan para anggota *Kutei* bertujuan agar putusan yang akan diterapkan benar-benar putusan yang seimbang dan adil, karena putusan

ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat bersama, sehingga putusan yang diterapkan bisa dilaksanakan dengan lancar.

Putusan Kutei yang menjatuhkan hukuman kepada pihak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (1) Ada pengakuan baik dari pihak pelaku maupun korban;
- (2) Ada saksi atau ada keterangan buat menuduh; dan
- (3) Berbekas jajak naik, berbekas jajak turun dengan kata lain ada bukti.

Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka baru dapat dinyatakan orang tersebut bersalah. Dalam bahasa Rejang disebut dengan ungkapan berikut

“Monok puteak terbang kak bilei ingep nak keyue keing”. “Jelas Saleak ne”, ken leak ules ne, nanek jenis ne, titik saleak titik hutang, loi saleak loi hutangne (kalau sudah terang salahnya ditentukan jenis kesalahannya, kecil salahnya kecil pula hukumannya, besar salahnya besar pula hukumannya).

Apabila ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka orang tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman, yang dalam bahasa rejang disebut *waham*. Orang yang tidak terbukti kesalahan setelah diperiksa dalam sidang Kutei disebut dengan ungkapan berikut:

“Monok kumang terbang ingep nak keyue rimun daunnen” (orang tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka orang tersebut tidak dapat dihukum).

Menurut Hukum Adat Rejang ada beberapa perbuatan yang menunjukkan kelakuan jahat, membawa ke jalan tuduhan, dan membuat jalan cemooh. Perbuatan-perbuatan tersebut digolongkan ke dalam istilah yang disebut "*Undang-undang Dua Puluh*". Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam *Undang-undang Dua Puluh*, yaitu :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. <i>Tikam</i> | <i>Bunuh</i> |
| 2. <i>Samun</i> | <i>Sakeak</i> |
| 3. <i>Upet</i> | <i>Acun</i> |
| 4. <i>Sumbang</i> | <i>Saleak</i> |
| 5. <i>Maling</i> | <i>Lapat</i> |
| 6. <i>Johong</i> | <i>Permayo</i> |
| 7. <i>Mebut</i> | <i>Mapes</i> |
| 8. <i>Dawa</i> | <i>Dawi</i> |
| 9. <i>Tambang</i> | <i>Tapeket</i> |
| 10. <i>Temtung</i> | <i>Temotoa</i> |
| 11. <i>Bertando (anjuk)</i> | <i>Bebitet (ketiko)</i> |
| 12. <i>Pecea pecong</i> | <i>Terkas</i> |
| 13. <i>Tepeket</i> | <i>Betilei</i> |
| 14. <i>Tekambap pateak Tekeluk matei</i> | |
| 15. <i>Enggang melitas Ating pateak</i> | |
| 16. <i>Bepelat baru bekenek, pelakat dalen tu un</i> | |
| 17. <i>Bergegas</i> | <i>Pemicang</i> |
| 18. <i>Bejua mudeak</i> | |
| 19. <i>Kerineak pimatei tun dew</i> | |
| 20. <i>Mbuk mbon kemenyang matei</i> | |

Kedua puluh istilah yang tersebut di dalam *Undang-undang dua puluh* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Tikam*, yaitu pekerjaan, perbuatan atau tingkah laku yang dapat menyakiti orang lain, yakni sebelum *tikam* mencerote kata lecut, kata memukul, kata dorong, tepuk tempeleng dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut disebut *Tikam dan bunuh*.
2. *Samun*, yaitu perbuatan, tingkah laku yang menyakiti orang lain berupa pengambilan harta benda dengan kekerasan dan bahkan menyebabkan sampai orang tersebut meninggal dunia dengan darah berserak bangkai terbujur. Semua perbuatan tersebut dinamakan *Samun Sakeak*.
3. *Upet*, yaitu perbuatan, tingkah laku yang menceritakan atau menjelekkan orang lain yang belum tentu ada kebenarannya, menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap keluarganya yang seolah-olah sama halnya menghilangkan nyawanya. Semua perbuatan tersebut dinamakan *Upet dan Acun*.
4. *Sumbang*, yakni perbuatan, tingkah laku yang tidak pantas dilakukan yang menyebabkan perbuatan tersebut tidak enak dipandang mata, misalnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya duduk berdekatan berpegang-pegang tangan dan bergelut-gelut. Semua perbuatan ini dinamakan *Sumbang*.
5. *Maling*, yakni perbuatan, tingkah laku mengambil harta orang lain dengan cara melawan hukum baik siang atau malam baik diambil dari dalam tempat simpanan atau didalam rumah. Jika perbuatan itu tertangkap basah atau barang yang hilang tersebut dapat ditangan orang lain maka perbuatan ini dinamakan *maling dapat*.

6. *Johong*, yakni perbuatan atau tindakan yang berusaha membinasakan orang lain dengan segala daya upaya melalui perbuatan-perbuatan teluh atau santet yang menyebabkan orang lain menjadi gila, sakit atau menyebabkan orang tersebut berubah menjadi abnormal. Semua perbuatan tersebut dinamakan *Johong Permayo*.
7. *Mbut*, yakni perbuatan atau tingkah laku mengambil dan melarikan harta orang lain dengan cara bujuk rayu atau muslihat terlebih dahulu. Semua perbuatan tersebut dinamakan *Mbut Mapes*.
8. *Dawa*, yakni perbuatan, tingkah laku yang dilakukan yang bertentangan dengan kejadian atau keadaan yang sebenarnya atau perbuatan yang menyebut orang lain turut serta melakukan suatu pekerjaan padahal tidak. Semua perbuatan ini dinamakan *Dawa Dawi*.
9. *Tambang*, yakni perbuatan atau tingkah laku untuk memiliki sesuatu barang tanpa mengatakan asal usul atau sumber barang atau benda yang didapatkan. Semua perbuatan ini dinamakan *Tambang Tepeket*.
10. *Temtung*, yakni perbuatan atau tingkah laku menyusuri, menurut jajak pembicaraan atau janji baik dikalangan tua atau muda. Perbuatan ini dinamakan *Temtung Temotoa*.
11. *Betando*, yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang yang merubah sesuatu yang telah diberi tanda atau yang telah ditetapkan, kemudian tanda tersebut terlihat kembali perbuatan ini dinamakan *Betando bebitet*.

12. *Pecas Pecong*, yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang berupa rancasan atau tebasan pada hak milik orang lain menunjukkan maksud tidak baik atau buruk. Perbuatan ini dinamakan *Pecar terkas*.
13. *Tepeket*, yakni perbuatan atau tingkah laku mengambil barang orang lain dalam keadaan tertangkap tangan. Bila ia melakukan perbuatan itu karena suruhan orang lain karena dendam atau sebab lainnya maka perbuatan tersebut dinamakan *Tepeket Betilei*.
14. *Tekambab*, yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan kejahatan tetapi tidak mengaku dengan dalih pada waktu kejadian itu sedang bermalam di rumah si anu, atau tidak tahu menahu tentang kejadian itu padahal orang lain (saksi lain) yang mengatakan bahwa ia tahu persis tentang kejadian itu. Perbuatan ini dinamakan *Tekambab pateak, tekeluk matei*.
15. *Enggang melitas ating pateak*, yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang yang sedang berjalan-jalan yang tidak tentu siapa yang akan dijemput dan siapa yang diantar. Pada waktu orang tersebut sedang lewat terjadi pencurian di daerah itu. Pada saat itu kelihatan ada seseorang melarikan diri dengan membawa barang ke arah orang yang sedang berjalan tersebut, lalu didesak dan ditanyakan pada orang yang sedang lewat tersebut yang tidak mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Perbuatan ini dinamakan *Enggang melitas ating pateak*.

16. *Bepelat*, yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang yang ceroboh dengan tanpa terlebih dahulu mempelajari kebenarannya. Perbuatan ini dinamakan *Bepekat baru bekenek, pelakat dalen tu un*.
17. *Begegas*, yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang pada waktu bepergian atau pulang berlari-lari tidak ada suruhan atau dijemput yang menimbulkan tanda tanya bagi orang yang melihatnya. Perbuatan ini dinamakan *Begegas Pemicang*.
18. *Bejuoa Mudeak*, yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang yang menjual barang-barang dengan harga sangat murah sedangkan barang itu harganya mahal, sudah tentu ada apanya terhadap barang itu. Perbuatan ini dinamakan *Bejuoa Mudeak*.
19. *Kerineak*, yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang yang bila mengerjakan sesuatu ingin mendapatkan perhatian orang banyak. Perbuatan ini dinamakan *Kerineak pimatei tun daw*.
20. *Mbuk mbon kemenyang matei* yakni perbuatan atau tingkah laku seseorang yang sering berbicara yang indah-indah tapi tidak ada dalam kenyataan. Perbuatan ini dinamakan *Mbuk mbon kemenyang matei*.

Kedua puluh jenis perbuatan yang tercantum di dalam *Undang-undang Dua Puluh* di atas dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. 8 (delapan) perbuatan yang menunjukkan kelakuan jahat
2. 6 (enam) perbuatan yang menunjukkan ke jalan tuduhan
3. 6 (enam) perbuatan yang menunjukkan ke jalan cemoohan.

Terhadap perbuatan seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah pada waktu sidang lembaga *Kutei*, maka pada orang tersebut dijatuhilah sanksi (hukuman) sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan. Jenis sanksi yang dijatuhkan adalah berupa hukuman membayar denda. Jenis sanksi yang paling berat dikenal dengan istilah membayar "*Bangun*". Sanksi ini dijatuhkan biasanya terhadap perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain, baik karena kesengajaan (dibunuh) atau karena disebabkan karena kealpaannya menyebabkan orang tersebut mati.

Jika seseorang ditetapkan sanksinya berupa membayar *Bangun*, maka kepada orang tersebut ditetapkan membayar sejumlah uang sebesar 80 rial. Ketentuan rial tersebut untuk sekarang telah disesuaikan dengan jumlah keadaan nilai rupiah yang sedang berlaku. Di samping membayar sejumlah uang, kepada orang tersebut dibebankan pula untuk membayar atau memberi "*Keracak Mateak*", yakni bahan-bahan mentah berupa beras, beras ketan, gula merah, kelapa, ayam dan kambing.

Tujuan bayar bangun semata-mata sebagai ganti menurut adat bahwa jiwa tiada lagi dibayar dengan jiwa dan menghilangkan rasa dendam masing-masing pihak. Istilah "hutang nyawa dibayar nyawa" tidak berarti seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain harus pula dihilangkan nyawanya, tetapi telah berubah bahwa orang atau pihak keluarga yang menghilangkan nyawa orang lain diwajibkan mengganti nyawa dengan mengadakan hewan yang akan disembelih dalam upacara adat sebagai penebus dosa karena bersalah menghilangkan nyawa orang lain. Biasanya

upacara adat ini diikuti oleh penyerahan atau pengangkatan salah satu anggota keluarga pihak yang bersalah menjadi anggota atau bagian keluarga pihak korban. Misalnya, adik atau kakak pihak pelaku menjadi anak atau adik pihak korban.

Untuk jenis perbuatan yang lain penetapan sanksi yang dilakukan dalam pemufakatan *Kutei* harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam *Simbur Cahaya*.

Jika tindak pidana yang terjadi terlanjur diproses oleh lembaga formal (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), maka penyelesaian melalui lembaga *Kutei* tetap bisa dilaksanakan. Dan hasil penyelesaian lembaga *Kutei* ini dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan.

Berdasarkan bahasan yang dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa masyarakat suku bangsa Rejang mempunyai persepsi yang sangat positif terhadap keberadaan lembaga *Kutei* sebagai wadah penyelesaian konflik. Hal ini dapat diamati pada realitas di masyarakat suku bangsa Rejang yang sampai saat ini, masih memilih lembaga *Kutei* sebagai wadah menyelesaikan konflik. Lembaga *Kutei* dipilih sebagai lembaga penyelesaian konflik, karena masyarakat berpendirian dan menilai putusan *Kutei* lebih seimbang dan adil dibanding proses penyelesaian melalui peradilan pidana formal. Keseimbangan dan keadilan itu terlihat dalam proses persidangan *Kutei* yang memberikan kesempatan terbuka kepada para pihak untuk memilih cara yang sesuai dan dianggap wajar dan adil, baik bagi korban

maupun pelaku. Di samping itu, penyelesaian melalui Lembaga Kutei sesuai dengan prinsip “cost and benefit principles”.

B. Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Lembaga Adat Tradisional *Kutei* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pidana, yakni Polisi, Jaksa dan Hakim di Daerah Tingkat II Rejang Lebong, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) mengetahui dan mengakui adanya lembaga adat tradisional *Kutei* di dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di masyarakat, terutama di desa-desa di Kecamatan Curup;
- 2) Terdapat kesesuaian sikap antara Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi dan masyarakat, anggota lembaga *Kutei*, fungsionaris adat, tokoh masyarakat dalam memandang penyelesaian tindak pidana yang dilakukan di lembaga *Kutei*.
- 3) Kesesuaian sikap pandang di dalam menghadapi penyelesaian tindak pidana ini timbul dari saling pengertian masing-masing pihak. Di satu pihak masyarakat, fungsionaris adat, tokoh masyarakat dan anggota lembaga *Kutei* menyadari bahwa Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi mempunyai tugas dan kewajiban yang lebih penting sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Atas kesadaran seperti masyarakat,

fungisionaris adat, tokoh masyarakat dan anggota lembaga *Kutei* berusaha semaksimal mungkin untuk membantu tugas dan kewajiban penegak hukum, khususnya Polisi dengan jalan menyelesaikan masalah tindak pidana atau konflik yang terjadi di masyarakat melalui lembaga *Kutei*.

- 4) Polisi menyadari keterbatasan kemampuannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, maka penyelesaian tindak pidana melalui lembaga *Kutei* sebagai wujud dalam penegakan hukum tetap memberikan tempat kepada institusi Hukum Adat Rejang dalam penyelesaian tindak pidana sepanjang hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan.

Terhadap tindak pidana yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga *Kutei* terdapat perbedaan persepsi antara Polisi, Jaksa dan Hakim. Terjadinya perbedaan persepsi ini berkaitan erat dengan faktor kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Aparat Penegak Hukum.

Bagi Polisi penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat Rejang melalui lembaga *Kutei* dipandang sebagai hal yang wajar dan dapat dilakukan apabila:

- (1) Tindak pidana yang terjadi tersebut tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat bila diselesaikan di lembaga *Kutei*;

- (2) Tindak pidana yang terjadi dinilai dalam kasus-kasus tertentu yang bersifat ringan memang lebih pantas diselesaikan di lembaga *Kutei* daripada diselesaikan di lembaga formal;
- (3) Tindak pidana yang terjadi tersebut tidak tergolong ke dalam kejahatan terhadap nyawa, misalnya pembunuhan;
- (4) Terhadap tindak pidana yang terjadi tersebut baik korban maupun pelaku memang telah sepakat untuk diselesaikan di lembaga *Kutei*.

Khusus kejahatan terhadap nyawa akibat kealpaan seseorang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, Polisi tetap memproses perkara tersebut sebagaimana mestinya. Sedangkan hasil penyelesaian yang dilakukan di lembaga *Kutei* dilampirkan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam mengambil putusannya.

Adanya pengakuan Polisi terhadap penyelesaian tindak pidana di lembaga *Kutei* ini, berkait erat dengan tugas pokok yang diemban oleh Polisi, yaitu di satu pihak sebagai penyidik tunggal dalam kasus tindak pidana, dilain pihak sebagai pengayom masyarakat Polisi juga harus menjaga keamanan dan kententraman di dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai wujud dari tugas Polisi menjaga keamanan dan kententraman dalam masyarakat adalah memberi tempat kepada lembaga *Kutei* untuk menyelesaikan tindak pidana. Untuk penghormatan terhadap keputusan lembaga *Kutei* Polisi sebagai penyidik tidak menganggap perlu meneruskan kasus-kasus yang telah diselesaikan di lembaga *Kutei*. Dengan kata lain Polisi tidak akan menggunakan haknya untuk melakukan proses

penyidikan terhadap perkara tersebut. Khusus kasus-kasus yang telah terlanjur diproses oleh penyidik sepanjang perkara itu belum dilimpahkan ke Penuntut Umum Polisi memberi kebijaksanaan agar perkara itu dapat diselesaikan di lembaga *Kutei*.

Tindakan polisi sebagai penegak hukum yang menghormati putusan Lembaga *Kutei* dalam penyelesaian perkara pidana yang dimintakan oleh pihak korban dan atau pelaku, sesungguhnya bukan suatu tindakan yang dapat dinyatakan salah. Sebab, dalam hukum acara pidana tiap penegak hukum, tidak terkecuali Polisi mempunyai "diskresi" dalam arti apakah suatu perkara akan berakibat lebih baik diproses dibanding tidak diproses berdasarkan prosedur hukum formal. Hal ini sesuai dengan prinsip "cost and benefit principles" pelaksanaan penegakan hukum. Artinya, jika masyarakat atau kedua pihak ternyata memilih penyelesaian secara tradisional dan tidak menimbulkan ketidaktenteraman, maka merupakan hal yang lebih baik suatu perkara yang telah diproses dan diselesaikan melalui lembaga *Kutei*, tidak lagi diteruskan berdasarkan hukum formal.

Di samping diskresi, sebagai dasar yang dapat dijadikan alasan untuk tidak meneruskan suatu perkara yang telah diputus Lembaga *Kutei* ke peradilan formal, maka tujuan pemidanaan dalam hukum pidana sesungguhnya telah mengambil aspek hukum adat, yaitu memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Oleh karena itu, apabila penjatuhan putusan Lembaga *Kutei* ternyata telah memulihkan keseimbangan dalam arti kedua pihak ikhlas dan merasakan keadilan serta reaksi negatif

dalam masyarakat tidak muncul, maka proses hukum pidana formal tidak harus diterapkan. Oleh karena itu, diskresi polisi dalam penegakan hukum akan menentukan suatu perkara yang telah diproses dan diselesaikan lembaga Kutei akan diteruskan atau tidak dalam proses peradilan hukum formal. Sebab, tahap awal yang akan menentukan proses peradilan pidana melalui hukum formal ada pada polisi sebagai penyidik.

Persepsi mengenai peran dan fungsi lembaga Kutei dikemukakan pula Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat Rejang melalui lembaga *Kutei* tersebut hanyalah semata-mata penyelesaian menurut Hukum Adat. Oleh karena itu, apabila ada suatu perkara telah diselesaikan oleh Lembaga Kutei dan kedua pihak telah menerima sebagai suatu penyelesaian terbaik dan adil, maka tidak berarti perkara itu selesai sebatas penyelesaian lembaga Kutei. Artinya perkara itu tidak mengesampingkan atau meniadakan penyelesaian berdasarkan hukum formal melalui lembaga pengadilan sebagai lembaga penyelesaian konflik.

Aparatur kejaksaan tetap berpendirian bahwa suatu tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya adalah tindak pidana yang tergolong ke dalam delik aduan dengan bukti pernyataan pencabutan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak diteruskan di lembaga formal karena telah diselesaikan secara kekeluargaan lembaga *Kutei*. Misalnya delik kesusilaan seperti zina atau pencurian dalam

kalangan keluarga. Sedangkan untuk jenis tindak pidana yang lain tetap akan diproses dan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan penjelasan bahwa terus atau tidak suatu perkara termasuk perkara yang diselesaikan melalui Lembaga Kutei bergantung pada kelengkapan alat bukti dan diskresi pada tahap penyidikan yang menjadi kewenangan polisi. Oleh sebab itu, diskresi polisi akan menentukan apakah suatu perkara yang diselesaikan oleh Kutei akan diteruskan lebih lanjut ke proses peradilan pidana formal bergantung pada penilaian polisi. Ditegaskan pula bahwa Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan dalam tindak pidana umum akan ditentukan oleh hasil penyidikan yang dilimpahkan kepada Kejaksaan. Oleh karena itu, apabila tidak ada suatu perkara yang dilimpahkan kepada penyidik, maka Jaksa sebagai aparatur penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan.

Berhubungan dengan suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui Lembaga Kutei, aparatur kejaksaan menjelaskan sebagai berikut:

1. Apabila aparatur Kejaksaan yang dapat bertindak sebagai Penuntut Umum mengetahui ada perkara pidana yang diselesaikan di lembaga *Kutei*, Jaksa penuntut Umum tetap menghormati penyelesaian perkara yang menjadi pilihan masyarakat, karena penyelesaian melalui lembaga *Kutei* tersebut merupakan bentuk kebersamaan, kekeluargaan dalam masyarakat menyelesaikan konflik yang memiliki aspek hukum yakni hukum adat yang berlaku dan terpelihara dalam masyarakat;

2. Penuntut Umum mengakui penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat melalui lembaga tradisional seperti Lembaga Kutei, masih terus berlangsung, karena warga masyarakat khususnya di desa beranggapan bahwa penyelesaian adat merupakan bentuk penyelesaian yang adil;
3. Penggunaan lembaga tradisional yang menjadi pilihan warga masyarakat dalam penyelesaian konflik, didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelesaian di lembaga tradisional seperti Lembaga *Kutei*, lebih sederhana dibandingkan penyelesaiannya melalui lembaga formal. Dalam daerah tertentu suatu penyelesaian konflik sering dilakukan pada malam hari, sehingga tidak mengganggu aktivitas pihak-pihak dalam mencari nafkah. Alasan lain bahwa di Lembaga Tradisional tidak dikenal lembaga penahanan seperti peradilan formal. Misalnya penahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan suatu pemahaman bahwa tindakan warga masyarakat yang memilih lembaga tradisional Kutei sebagai lembaga penyelesaian konflik merupakan cermin persepsi masyarakat bahwa penyelesaian secara kekeluargaan dengan menerapkan hukum adat yang berlaku setempat merupakan penyelesaian yang dianggap lebih adil dibanding penyelesaian lembaga peradilan formal. Cermin persepsi masyarakat didasarkan pula pada "cost and benefit principles" artinya dari segi biaya dan waktu lebih murah dan

menguntungkan dibanding memilih penyelesaian melalui lembaga peradilan formal yang kadangkala memerlukan waktu yang relatif lama dan pemulihan keseimbangan lebih nyata dibanding penyelesaian oleh lembaga formal.

Khusus mengenai sanksi negatif atau hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga *Kutei*, Penuntut Umum menyatakan bahwa suatu hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh *Kutei* dan oleh pengadilan formal merupakan hal yang relatif yang akan bergantung pada kasus yang terjadi. Sebab, ukuran efektif tidaknya suatu hukuman juga bersifat fakultatif dan ukuran rasa keadilan melalui bentuk dan lamanya hukuman juga merupakan hal yang relatif. Namun, aparatur kejaksaan yang menjadi responden mengakui bahwa masyarakat lebih merasakan keadilan putusan lembaga tradisional, karena penyelesaian konflik lebih didasarkan pada asas kekeluargaan dalam arti penyelesaian adat diputuskan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Oleh sebab itu, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali seperti yang diatur dalam hukum acara pidana, tidak dikenal karena tidak diperlukan. Di samping itu, upaya paksa atau intimidasi yang sering menjadi isu dalam penegakan hukum formal hampir tidak ada.

Persepsi mengenai keberadaan Lembaga *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian konflik dikemukakan pula oleh Hakim yang menjadi responden penelitian yang menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui lembaga *Kutei* hanya merupakan bahan pertimbangan yang meringankan bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Hakim tidak terikat

dengan ada atau tidaknya penyelesaian tindak pidana di lembaga *Kutei*, Hakim terikat pada hal-hal atau alat bukti yang terungkap di persidangan. Alat-alat bukti yang terungkap di persidangan itulah yang akan menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipidana atau tidak. Namun demikian bila di persidangan baik pihak korban maupun pihak terdakwa telah menyatakan bahwa perkara mereka telah diselesaikan juga di lembaga *Kutei*, maka hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim dalam menentukan putusannya.

Pendirian hakim tersebut didasarkan pada alasan yuridis bahwa Hakim harus memeriksa dan mengadili serta memutuskan setiap perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya. Dalam menentukan kesalahan terdakwa maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan Lembaga *Kutei* sebagai wujud hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang menyelesaikan konflik dijadikan bahan pertimbangan hakim.

Khusus untuk delik aduan bila pihak korban atau pihak yang dirugikan menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan di lembaga *Kutei*, maka hal ini bagi Hakim dapat dikabulkan asal saja pernyataan pencabutan tersebut dilakukan pada awal-awal sidang atau sebelum pemeriksaan alat-alat bukti. Tapi untuk perkara pidana yang lain ada atau tidaknya penyelesaian di lembaga *Kutei* tidak mempengaruhi proses persidangan di pengadilan.

Untuk mengadili suatu perkara pidana menurut Hakim, ia sangat tergantung pada Surat Dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum. Jadi menurut Hakim walaupun ia mengetahui ada suatu perkara pidana itu diselesaikan hanya di lembaga *Kutei* maka hal ini bagi Hakim tetap saja boleh dilakukan oleh masyarakat sepanjang para pihak memang telah menyepakati bahwa perkara itu diselesaikan di lembaga *Kutei* dan Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi juga tidak mengetahui dan atau tidak menggunakan haknya untuk memproses perkara itu.

Menurut Hakim, ia sependapat bahwa penyelesaian tindak pidana melalui lembaga *Kutei* lebih sederhana bila dibandingkan melalui proses pengadilan. Kesederhanaan itu dapat dilihat dari pada waktu, biaya dan proses penyelesaiannya. Penyelesaian melalui Pengadilan terikat dengan ketentuan Undang-undang dan birokrasi yang ada dan Hakim tidak boleh melakukan proses penyelesaian di luar aturan yang telah tercantum dalam Undang-undang.

Kemudian menurut Hakim apakah hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga *Kutei* itu lebih efektif bila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan, hal ini sangat relatif sifatnya tergantung pada perkara yang diadili dan bagaimana pandangan masyarakat, korban ataupun pelaku terhadap pidana yang dijatuhkan itu. Karena pengertian adil itu sangat relatif sifatnya. Oleh karena itu untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu hukuman itu akan dapat dilihat sejauh mana perasaan keadilan masing-masing pihak maupun masyarakat menerima putusan yang dijatuhkan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa lembaga adat tradisioal *Kutei* sebagai lembaga informal dalam penyelesaian tindak pidana masih diakui peran dan fungsinya baik oleh masyarakat Rejang maupun Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Rejang Lebong.

Bagi masyarakat Rejang, lembaga *Kutei* mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati terutama peran dan fungsinya dalam menyelesaikan konflik atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat setempat. Keputusan *Kutei* dinilai sebagai penyelesaian yang adil bagi para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, penegak hukum formal tidak perlu lagi memproses kasus yang telah diputus oleh lembaga *Kutei* berdasarkan proses dan prosedur hukum formal, sekalipun dalam hukum formal dinyatakan bahwa “*penyelesaian berdasarkan hukum adat tidak berarti meniadakan roses hukum negara*”.

Kebijakan penegak hukum yang demikian itu di lihat dari aspek kepastian hukum, kamanfaatan hukum, dan keadilan hukum, bukan merupakan kebijakan yang tidak beralasan. Sebab, pencapaian tujuan keadilan melalui praktek penegakan hukum formal sampai saat ini, dinilai masyarakat masih bermasalah. Alasan lain dapat didasarkan pertimbangan *Cost and Benefit Principle* karena proses hukum formal hampir selalu memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, keputusan *Kutei* tidak berarti si bersalah tidak dijatuhi sanksi dan sanksi hukum formal tidak senantiasa bermanfaat dalam membina pelanggar hukum.

Jika dilihat dari aspek struktur lembaga *Kutei* dibandingkan dengan struktur hukum formal, ternyata keanggotaan majelis lembaga *Kutei* yang memutuskan kasus yang dihadapi dapat dikatakan mempunyai keterhubungan persamaan fungsional dibanding keanggotaan dalam peradilan pidana. Susunan keanggotaan lembaga *Kutei* dalam menyelesaikan suatu kasus adalah sebagai berikut :

- (1) *Ketua Kutei* secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa di masing-masing tempat *Kutei* berada dengan anggota-anggota sebagai berikut:
- (2) *Kepala Suku*, saebagai anggota *Kutei* cenderung berperan sebagai Rukun Warga (RW) ;
- (3) *Ketua Syara'* seperti Imam (Khotib) dan Ketua Adat ;
- (4) *Cendikiawan* yang terdiri dari para pejabat pemerintah yang ada di desa seperti Babinsa dan para petugas lapangan ; dan
- (5) *Pemuka Masyarakat* yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dan dinilai mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai masalah-masalah yang mempunyai perkaitan dengan (hukum) adat.

Berdasarkan struktur lembaga *Kutei* di atas, yang menjadi anggota tetap lembaga *Kutei* adalah Kepala Desa, Ketua Syara', Ketua-ketua Suku dan tokoh masyarakat. Susunan lengkap lembaga *Kutei* sebenarnya sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan konflik yang besar di masyarakat, misalnya kasus perzinahan, melarikan anak gadis, perkosaan, konflik antar suku, dan perebutan harta waris. Sedangkan kasus-kasus yang bersifat ringan dapat diselesaikan oleh hanya Kepala Desa saja,

Ketua Syara' saja atau Ketua Adat saja. Dengan demikian penyelesaian di lembaga *Kutei* bisa dilakukan secara majelis dengan dihadiri oleh seluruh anggota *Kutei* dan bisa juga dilakukan secara tunggal (tanpa majelis). Hal ini mempunyai persamaan fungsional dengan struktur hukum dalam hukum formal dalam proses penyelesaian konflik di masyarakat.

Jika kita mencermati sikap dan pandangan masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana, maka teori Bredehoefer mengenai fungsi hukum (yang diidentikkan dengan fungsi pengadilan) yang menjalankan fungsi integratif dalam masyarakat.

- (1) Adaptasi adalah proses ekonomi memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana penyelesaian konflik dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerjasama yang produktif. Pertukaran antara proses integrasi dan adaptasi menghasilkan keluaran berupa pengorganisasian atau penstrukturan masyarakat. Melalui keputusan lembaga *Kutei* ditentukan apa yang menjadi hak, kewajiban dan pertanggungjawaban.
- (2) Pencapaian tujuan dengan bidang garapan masalah penentuan tujuan-tujuan yang harus dicapai. Fungsi hukum adat, dalam hal ini lembaga *Kutei* menerima masukan dalam bentuk petunjuk tentang apa dan bagaimana lembaga *Kutei* menjalankan fungsinya.
- (3) Mempertahankan pola adalah pertukaran proses sosialisasi dengan hukum. Hukum Adat sebagai mekanisme pengintegrasi menjalankan pekerjaannya yang ditunjukkan oleh kesediaan masyarakat menggunakan

jasa *Kutei* sebagai wadah atau saluran penyelesaian konflik. Pertukaran atas masukan yang datang dari bidang budaya adalah keluaran yang datang dari *Kutei* yakni KEADILAN.

Di dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku sidang lembaga *Kutei* mempunyai kemiripan dengan sidang di Pengadilan. Hakim Pengadilan menjatuhkan hukuman berpedoman pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

Pasal 183 : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹³⁷

Dari bunyi Pasal 183 KUHP di atas, jelaslah bahwa Hakim (Pengadilan) baru dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang bila terdapat minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan bahwa orang tersebut benar-benar bersalah melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pada lembaga *Kutei* hukuman itu baru dapat dijatuhkan kepada seseorang bila orang tersebut telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum adat Rejang. Untuk menyatakan orang tersebut terbukti bersalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Adanya perbuatan yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan ;
- (2) Adanya saksi atau ada keterangan buat menuduh ;
- (3) Ada bukti yang jelas.

¹³⁷ . Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, CV. Mayasari, Solo, 1983, halaman 83

Dengan demikian dalam lembaga *Kutei* untuk memidana seseorang harus terbukti kesalahannya, hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam Hukum Pidana, yaitu : “ *Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*” atau *Green Straf Zonder Schuld*”.¹³⁸

Mengenai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku terdapat perbedaan antara Pengadilan dengan lembaga *Kutei*. Pada pengadilan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang berbunyi :¹³⁹

Pasal 10:

Jenis pidana yaitu :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda
5. Pidana tutupan (UU No. 20/1946)

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan beberapa barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Sedangkan hukuman yang dapat dijatuhkan pada lembaga *Kutei* hanya berupa hukuman denda. Denda ini berfungsi sebagai manifestasi dari celaan bagi perbuatan yang melanggar. Selain itu denda ini juga berfungsi sebagai simbol pengakuan bersalah dari pelaku dan keluarganya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di pihak lain denda ini berfungsi sebagai simbol permohonan maaf, yang diwujudkan dengan kesediaan pelaku membayar

¹³⁸ . Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, halaman 5.

¹³⁹ . M. Boediarto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, halaman 29.

denda yang dibebankan kepadanya. Keseluruhan fungsi denda tersebut merupakan sarana pengembalian keseimbangan yang telah terganggu akibat terjadinya perbuatan yang dilanggar oleh si pelaku.

Pemenuhan denda yang dijatuhkan pada saat ini mempunyai makna sebagai penghargaan dan ketaatan terhadap ketentuan Hukum Adat Rejang. Selain fungsi-fungsi denda yang telah diuraikan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa denda yang dijatuhkan berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang menurut Hukum Adat Rejang.

Dengan dibayarnya denda, maka sifat tercelanya dihapus, hal ini dibuktikan dengan penerimaan kembali pelaku tersebut sebagai anggota masyarakat biasa yang selalu diikutsertakan di dalam semua aktivitas bersama di dalam masyarakat.

Dengan membandingkan bentuk dan jenis hukuman serta fungsi denda dengan bentuk dan jenis pidana dalam KUHP dapat dikatakan bahwa fungsi denda yang jatuhkan di lembaga *Kutei* lebih mendekati tujuan pemidanaan seperti yang diatur dalam konsep KUHP baru, yaitu :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu pembedaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Bagi masyarakat Rejang hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan baginya agar ia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karenanya betapa pun besarnya kesalahan seseorang, jika masyarakat dapat menerima dan yang salah bersedia kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan itu dapat dimaafkan. Tetapi walaupun kesalahan seseorang mungkin hanya kecil saja sifatnya, jika si pelaku memang sudah sukar untuk diperbaiki lagi budi pekertinya, maka orang demikian ini kalau perlu disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan kampung halaman.

Pemilihan penyelesaian tindak pidana melalui lembaga *Kutei* merupakan cara untuk menghindari proses lembaga hukum formal (pengadilan). Masyarakat lebih suka mencari jalan damai melalui lembaga *Kutei* daripada diperiksa dihadapan Aparat Penegak Hukum. Hal ini dilakukan salah satu sebabnya adalah lunturnya kepercayaan masyarakat pada Aparat Penegak Hukum dalam menangani berbagai kasus yang ada selama ini.

Peran dan fungsi lembaga *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana tidak hanya diakui keberadaannya oleh masyarakat Rejang tetapi juga seluruh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Rejang Lebong. Terdapat perbedaan persepsi dari Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam memandang keberadaan lembaga *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana bagi masyarakat Rejang.

Timbulnya persepsi yang berbeda ini disebabkan oleh faktor kewenangan masing-masing yang melekat pada Aparat Penegak Hukum tersebut. Akibat dari persepsi yang berbeda ini, maka berbeda pula perlakuan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh masing-masing Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus yang telah atau akan diselesaikan oleh lembaga *Kutei*.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan Umum

Peranan lembaga adat tradisional masyarakat Rejang *Kutei* sebagai lembaga informal yang dapat menyelesaikan tindak pidana masih diakui dan dipertahankan. Penggunaan lembaga adat tradisional *Kutei* dalam penyelesaian tindak pidana bagi masyarakat Rejang merupakan jalan guna menghindari penyelesaian melalui lembaga formal pemerintah. Di samping sebagai wadah atau saluran masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana, lembaga adat tradisional *Kutei* juga mempunyai fungsi integratif dalam memperlancar proses produktivitas, pencapaian atau konkretisasi tujuan masyarakat dan keadilan dalam rangka mempertahankan pola (budaya) masyarakat.

B. Kesimpulan Khusus

1. Bahwa persepsi masyarakat Rejang terhadap peran dan fungsi lembaga adat tradisional *Kutei* sebagai lembaga informal yang dapat menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan, kepatuhan dan

penghormatan warga masyarakat Rejang terhadap keputusan lembaga *Kutei*. Keputusan lembaga *Kutei* mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati bagi masyarakat Rejang.

2. Terdapat perbedaan persepsi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam memandang keberadaan lembaga adat tradisional *Kutei* sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana. Bagi polisi penyelesaian melalui lembaga *Kutei* dianggap telah selesai, oleh karena itu sebagai penghormatan terhadap keputusan tersebut Polisi menganggap tidak perlu lagi meneruskan proses kasus tersebut lebih lanjut. Kecuali terhadap kejahatan yang menyangkut nyawa, maka meskipun telah diselesaikan di lembaga *Kutei* proses hukum dalam lembaga hukum formal tetap berjalan. Sedangkan Jaksa dan Hakim memandang bahwa penyelesaian tindak pidana melalui lembaga *Kutei* tidak mempengaruhi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Keputusan lembaga *Kutei* hanya dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang meringankan terdakwa bukan faktor yang menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dipidana.

C. Saran

1. Sejalan dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam UU tersebut diantaranya mengakui keberadaan lembaga adat desa sebagai lembaga yang dapat membantu penyelesaian

konflik di masyarakat, maka keberadaan lembaga adat tradisional *Kutei* ini perlu mendapat pengakuan nyata dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah karena pada kenyataan yang ada lembaga adat tradisional *Kutei* ini mampu memberi dan menjaga keseimbangan di dalam masyarakat.

2. Dalam rangka menghadapi terbentuk dan lahirnya KUHP baru yang dianggap mampu menampung rasa keadilan di masyarakat, maka sudah selayaknya usaha-usaha untuk menggali Hukum Adat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.
3. Guna menghindari terjadinya dualisme hukum yang berlaku maka penyelesaian tindak pidana melalui KUHP Nasional nanti diusahakan menerapkan sanksi-sanksi adat yang berlaku, sehingga dengan adanya penerapan sanksi-sanksi tersebut penyelesaian tindakan pidana melalui lembaga adat tradisional *Kutei* tidak diperlukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988.
- Apeldoorn, van DJ., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, *Orientasi dalam hukum adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1981.
- Arief, Barda Nawawi, *Pendekatan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1996.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. MHP-BPG. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Attamimi.S.,A.Hamid, *Perkembangan hukum tertulis peraturan perundang-undangan Indonesia*, Makalah Seminar Hukum Nasional ke VI. Jakarta, 1994.
- Basri, Chaidir, *Pemantapan Pembangunan Melalui Pendekatan Nasional*, PPS-UI Dirjen Persmanvet Mabes ABRI, Jakarta, 1994.
- Blumer, Herbert, *Symbolic Interactionism, Perspektif and Method*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall Inc. 1969.
- Boediarto, M, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.
- Budhisantoso, *Kebudayaan dan Integrasi Nasional Dalam Masyarakat Majemuk*, dalam Chaidir Basrie (ed) *Pemantapan pembangunan melalui pendekatan Ketahanan Nasional*, PPS-UI, Dirjen Persmanvet Mabes ABRI, Jakarta, 1994.
- BPHN, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Charon, M.Joel, *Symbolic Interaction, An Introduction, An Interpretation, An Integration*, New Jersey, Prentice Hall, 1989.

- Collecta, Nat.j., Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Hukum*, Susunan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Friedman, Lawrence M dan Stewart Macaulay. *Law and Behavioral Science*. Illinois, The Bobbs-Merrill, 1969
- Fuller, Lon.L., *The Morality of Law*, New Haven, Conn Yale University Press, 1964.
- Gerungan, WA., *Psikologi Sosial*, Erisco, Bandung, 1983.
- Hadikusumah Hilman, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984.
- _____, *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hazairin, *De Rejang*, AC NIX&CO. Bandung, 1939.
- Hamner, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Hennessy, Bernard, *Pendapat Umum*. (dialih bahasakan) oleh Amiruddin Nasution, Edisi ke empat, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Hoesin, Kiagoes, *Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkoelen*, Sriwijaya Media Utama, Palembang, 1938.
- Huijbers, *Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1988.
- Kartawidjaja, Hidjazie, *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat Tanah Dalam Hukum Agraria Nasional Indonesia*, Akademi Agraria, Jakarta, 1984.

- Koesnoe, Mohd., *Pokok permasalahan hukum kita dewasa ini (sebuah pengantar)*, Dalam Artidjo Alkotsar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Akademico Pressindo, Jakarta, 1989.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap POLRI* (buku 2), Bina Cipta, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, 1994.
- Lev. S, Daniel, *The Banyan Tree : Civil Law Change in Indonesia*, " The America Journal of Comparative Law, Vol. XIV, 1965.
- Makamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, 1978.
- _____, *Yurisprudensi Indonesia*, Jilid II, 1979
- Marsden, William, *History of Sumatra*, Bandung, 1983, MD CCLXXXIII
- Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum*, pada Simposium masalah penegakan hukum BPHN, Bina Cipta, Denpasar Bali, 1979.
- Marmosudjono, Sukarton, *Menegakkan Hukum Di Negara Pancasila*, Ceramah Jaksa Agung RI, Universitas Bengkulu, 1988.
- Martokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moleong, J., Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roesdakarya, Bandung, 1990.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Persahi, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Poloma, M. Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Poedjosoewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Universitas Gajah Mada Press, Jogjakarta, 1961.

- Pound, Roescoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara, Jakarta, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Keadaan dan permasalahan dalam penegakan hukum dewasa ini*, Simposium masalah penegakan hukum BPHN, Bina Cipta. Denpasar Bali, 1979.
- _____, *Hukum dan masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- _____, *Aneka persoalan hukum dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1983.
- _____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rajab, Muhammad, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata, Jakarta, 1989.
- Rasyidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (penyadur Drs. Alimandan), Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Saleh. K., Wantjik, *Kehakiman dan Keadilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976.
- Sani, Abdullah, *Bengkulu Menjadi Propinsi ke XXVI*, Curup, 1980.
- _____, *Jurai Adat Rejang*, Curup, 1983.
- Schmid, Van. J., *Ahli-ahli Fikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan, Jakarta, 1988.
- Siahaan, Hotman, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Erlangga, Surabaya, 1986
- Siddik, Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Sihombing, Herman, *Pengembangan Hukum Kebiasaan*, Makalah Seminar Hukum Nasional Ke VI, Jakarta, 1994.
- Skolnick, Jerome. H, *Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society*, Indiana Polis : The Bobb – Merrill, 1969.

- Soekanto, Soerjono, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academica, Jakarta, 1971.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1976.
- _____, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, 1977.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1981.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- _____, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soemitro, Hanitijo Ronny, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- _____, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989.
- _____, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- _____, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Agung, Semarang, 1990.
- _____, *Politik Kekuasaan dan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Universitas Jakarta, 1963.
- _____, *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*, Pustaka rakyat, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- Sudarsono, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Mata Hukum Nasional*, Dalam Jurnal Yustika, Vol. I, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1998.

- Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sugangga, IGN., *Pengantar Hukum Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- _____, *Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Susanto, I.S., *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, dalam masalah-masalah hukum Nomor 9, 1992.
- Suseno, Frans Magnis, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedi, Jakarta, 1985.
- _____, *Etika Politik*, (prinsip-prinsip moral kenegaraan Modern), Gramedia, Jakarta.
- Tabah, Anton, *Polri dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Toha, Miftah, *Perilaku Organisasi Ke Arah Sejarah dan Aplikasinya*, CV.Rajawali, Jakarta, 1983
- Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung, 1993.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, 1968.
- _____, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, 1982.
- Wuisman, J.J.J.M., *Perubahan Sosial di Bengkulu*, Prisma 6, 1985.